



BADAN PEMERIKSA
REPUBLIK INDONESIA

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2023**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
JAKARTA**



Nomor : 21.a/LHP/XV/05/2024
Tanggal : 20 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS
LAPORAN KEUANGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2023**

**AUDITORAT UTAMA KEUANGAN NEGARA II
JAKARTA**

Nomor : 21.a/LHP/XV/05/2024
Tanggal : 20 Mei 2024



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah memeriksa Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) yang terdiri dari Neraca tanggal 31 Desember 2023, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

BPS bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi Kode Etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih didasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan BPS untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern BPS. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang

digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh BPS, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut diatas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan BPS tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, operasional, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 21.b/LHP/05/2024 tanggal 20 Mei 2024, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Jakarta, 20 Mei 2024

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Dr. Nelson Ambarita S.E., S.H., M.M., Ak., CFE., CA, CSFA. 
Register Negara Akuntan Nomor 9630

**SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2023**

Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 terdiri dari dua laporan yaitu:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan

Laporan ini memuat:

- a. Hasil pemeriksaan yang memuat opini BPK;
- b. Gambaran Umum Pemeriksaan BPK yang berisi dasar hukum pemeriksaan, standar pemeriksaan, tujuan pemeriksaan, entitas yang diperiksa, lingkup pemeriksaan, metodologi pemeriksaan, jangka waktu pemeriksaan, dan batasan pemeriksaan; dan
- c. Laporan Keuangan BPS Tahun 2023.

2. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

Laporan ini memuat:

- a. Resume Laporan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- c. Ikhtisar Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Keuangan sebelumnya.

DAFTAR ISI

Halaman

SISTEMATIKA LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2023.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS LAPORAN KEUANGAN.....	1
GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN.....	3
LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK TAHUN 2023 (AUDITED)	
I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN	
II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN	
III. NERACA	
IV. LAPORAN OPERASIONAL	
V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	
VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2023 berpedoman pada Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) yang ditetapkan dengan Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2017.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPS Tahun 2023 bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan BPS Tahun 2023 yang didasarkan pada kriteria:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan (*adequate disclosure*);
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern (SPI).

4. Entitas yang Diperiksa

Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPS Tahun 2023 dilakukan terhadap satuan kerja yang menjadi sampel pemeriksaan baik satuan kantor pusat maupun kantor daerah.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan adalah Laporan Keuangan BPS Tahun 2023 yang terdiri dari:

- a. Neraca per 31 Desember 2023;
- b. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Pengujian atas laporan keuangan tersebut meliputi:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2023;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Realisasi Anggaran untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;
- c. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023;

- d. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada Catatan atas Laporan Keuangan;
- e. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Tahun 2023;
- f. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- g. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan negara dalam rangka penyusunan laporan keuangan.

6. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan Laporan Keuangan BPS Tahun 2023 dilakukan dengan pendekatan pemeriksaan berbasis risiko. Kegiatan pemeriksaan meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Perencanaan pemeriksaan diawali dari proses identifikasi dan penilaian risiko kesalahan penyajian material. Identifikasi dan penilaian risiko tersebut dilakukan melalui pemahaman entitas, termasuk Sistem Pengendalian Internal (SPI) terkait, serta penelaahan atas tindak lanjut hasil pemeriksaan sebelumnya. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan. Hal tersebut dimaksudkan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat, tetapi tidak bertujuan untuk menyatakan opini atas efektivitas pengendalian internal.

Berdasarkan hasil penilaian risiko, Pemeriksa mengumpulkan dan menguji bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Pengujian tersebut meliputi pengujian pengendalian maupun pengujian substantif atas transaksi dan saldo laporan keuangan. Prosedur pengujian mencakup inspeksi, observasi, konfirmasi, perhitungan kembali, pelaksanaan ulang (*reperformance*), dan prosedur analitis serta memadukan beberapa prosedur sebagai tambahan atas permintaan keterangan dari manajemen entitas. Prosedur dipilih berdasarkan pada pertimbangan profesional Pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Berdasarkan pengujian dan bukti-bukti yang diperoleh, Pemeriksa mengomunikasikan permasalahan-permasalahan yang ditemukan terkait dengan kelemahan SPI, ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kesalahan penyajian laporan keuangan, serta kecukupan pengungkapan kepada manajemen/pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola entitas. Pejabat entitas yang diperiksa memberikan komentar/tanggapan atas permasalahan tersebut. Permasalahan-permasalahan yang ditemukan kemudian dievaluasi dampaknya terhadap kewajaran penyajian laporan keuangan.

Laporan hasil pemeriksaan keuangan menghasilkan kesimpulan berupa opini serta laporan hasil pemeriksaan terkait kelemahan SPI dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundangan, serta permasalahan lain yang perlu ditekankan kepada pembaca laporan.

7. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 81 hari berdasarkan Surat Tugas Anggota II BPK RI Nomor 31/ST/IV-XV/01/2024 tanggal 18 Januari 2024, yaitu sejak tanggal 22 Januari s.d. 28 Mei 2024.

8. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen. Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan. Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**



ST 2023
SENSUS PERTANIAN

LAPORAN KEUANGAN BADAN PUSAT STATISTIK

UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023
(AUDITED)



KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

Badan Pusat Statistik adalah salah satu entitas pelaporan sehingga berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dengan menyusun Laporan Keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023.

Penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Diharapkan Laporan Keuangan ini dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Badan Pusat Statistik. Di samping itu Laporan Keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Jakarta, 20 Mei 2024

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,



Amalia Adininggar Widyasanti

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Indeks Tabel	viii
Indeks Grafik	xiii
Indeks Singkatan	xiv
Indeks CaLK LRA	xv
Indeks CaLK Neraca	xvi
Indeks CaLK LO	xvii
Indeks CaLK LPE	xviii
Indeks CaLK Pengungkapan Penting Lainnya	xix
Pernyataan Tanggung Jawab	xx
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran	4
III. Neraca	5
IV. Laporan Operasional	6
V. Laporan Perubahan Ekuitas	7
VI. Catatan atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1 Profil dan Kebijakan Teknis Badan Pusat Statistik	8
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	12
A.3 Basis Akuntansi	14
A.4 Dasar Pengukuran	14
A.5 Kebijakan Akuntansi	14
B. Penjelasan atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran	20
B.1 Pendapatan Negara dan Hibah	22
B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	25
B.1.2 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	27
B.1.3 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	29
B.1.4 Pendapatan Denda	30
B.1.5 Pendapatan Lain-lain	31
B.2 Belanja	33
B.2.1 Belanja Pegawai	39
B.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	39
B.2.1.2 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	42
B.2.1.3 Belanja Uang Lembur	43
B.2.1.4 Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	44
B.2.2 Belanja Barang	45
B.2.2.1 Belanja Barang Operasional	46
B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional	48
B.2.2.3 Belanja Barang Persediaan	50
B.2.2.4 Belanja Jasa	51

	B.2.2.5 Belanja Pemeliharaan	53
	B.2.2.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri	55
	B.2.2.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri	57
B.2.3	Belanja Modal	58
	B.2.3.1 Belanja Modal Tanah	59
	B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60
	B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61
	B.2.3.4 Belanja Modal Lainnya	63
B.2.4	Belanja Dalam Rangka COVID-19	64
C.	Penjelasan atas Pos-Pos Neraca	67
C.1	Aset	67
C.1.1	Aset Lancar	67
	C.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran	67
	C.1.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas	67
	C.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	69
	C.1.1.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima	71
	C.1.1.5 Piutang Bukan Pajak	71
	C.1.1.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	73
	C.1.1.7 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	74
	C.1.1.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	76
	C.1.1.9 Persediaan	77
C.1.2	Aset Tetap	79
	C.1.2.1 Tanah	80
	C.1.2.2 Peralatan dan Mesin	82
	C.1.2.3 Gedung dan Bangunan	85
	C.1.2.4 Aset Tetap Lainnya	91
	C.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	93
	C.1.2.6 Akumulasi Penyusutan	94
C.1.3	Piutang Jangka Panjang	96
	C.1.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	96
	C.1.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	97
C.1.4	Aset Lainnya	97
	C.1.4.1 Aset Tak Berwujud	98
	C.1.4.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	99
	C.1.4.3 Aset Lain-lain	100
	C.1.4.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	101
C.2	Kewajiban	103
C.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	103
	C.2.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga	104
	C.2.1.2 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak	105

	C.2.1.3	Pendapatan Yang Diterima Dimuka	106
	C.2.1.4	Uang Muka Dari KPPN	108
	C.2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	108
	C.3	Ekuitas	109
	C.3.1	Ekuitas	109
D.		Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Operasional	110
	D.1	Pendapatan Operasional	110
	D.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak	110
	D.1.1.1	Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	110
	D.2	Beban Operasional	111
	D.2.1	Beban Pegawai	111
	D.2.2	Beban Persediaan	113
	D.2.3	Beban Barang dan Jasa	113
	D.2.4	Beban Pemeliharaan	114
	D.2.5	Beban Perjalanan Dinas	115
	D.2.6	Beban Penyusutan dan Amortisasi	115
	D.2.7	Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	116
	D.3	Pendapatan dan Beban Non Operasional	116
	D.3.1	Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	116
	D.3.2	Beban Pelepasan Aset Non Lancar	117
	D.4	Pendapatan dan Beban Non Operasional Lainnya	117
	D.4.1	Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	117
	D.4.2	Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	118
E.		Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas	119
	E.1	Ekuitas Awal	119
	E.2	Surplus (Defisit) LO	119
	E.3	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	119
	E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	119
	E.3.2	Koreksi Atas Reklasifikasi	120
	E.3.3	Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi	122
	E.3.4	Koreksi Lain-Lain	125
	E.4	Transaksi Antar Entitas	125
	E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	126
	E.4.2	Transfer Masuk dan Transfer Keluar	127
	E.4.3	Pengesahan Hibah Langsung	127
	E.4.4	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	128
	E.4.5	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	128
	E.5	Ekuitas Akhir	128
F.		Pengungkapan Penting Lainnya	129
	F.1	Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	129
	F.2	Revisi DIPA	130
	F.3	Rekening BPS	134
	F.4	Kerjasama Swakelola Tipe I	135
	F.5	Kerjasama Swakelola Tipe II Dengan Mekanisme PNB	136
	F.6	Kerjasama Swakelola Tipe II Dengan Mekanisme RPL	140

F.7	Hibah Langsung Luar Negeri	140
F.8	Hibah Langsung Dalam Negeri	145
F.9	Pengungkapan Program Prioritas Nasional dan Capaian Output	146
F.10	Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	154
F.11	Pengungkapan Lain-Lain	154

INDEKS TABEL

	Halaman
1. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	1
2. Ringkasan Neraca	2
3. Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA	12
4. Rincian Jumlah Satker UAKPA	12
5. Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPB	14
6. Penggolongan Kualitas Piutang	16
7. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap	18
8. Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tak Berwujud	18
9. Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja	20
10. Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program	21
11. Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana	21
12. Rincian Pagu Belanja Penanganan Dampak Pandemi Covid-19	22
13. Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Neto	22
14. Perbandingan Realisasi Pendapatan Neto TA 2023 dan 2022	24
15. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Program	33
16. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana	34
17. Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana	34
18. Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana Periode TA 2023 dan 2022	36
19. Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja	36
20. Perbandingan Realisasi Belanja Periode TA 2023 dan 2022	38
21. Pagu dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	40
22. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	41
23. Pagu dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2023 dan 2022	42
24. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK TA 2023 dan 2022	42
25. Pagu dan Realisasi Belanja Uang Lembur	43
26. Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2023 dan 2022	44
27. Pagu dan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito	44
28. Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito TA 2023 dan 2022	45
29. Pagu dan Realisasi Belanja Barang Operasional	46
30. Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2023 dan 2022	47
31. Realisasi Belanja Barang Operasional Berdasarkan Sumber Dana	48
32. Pagu dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional	48
33. Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2023 dan 2022	49

34.	Realisasi Belanja Barang Non Operasional Berdasarkan Sumber Dana	50
35.	Pagu dan Realisasi Belanja Barang Persediaan	50
36.	Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2023 dan 2022	51
37.	Realisasi Belanja Barang Persediaan Berdasarkan Sumber Dana	51
38.	Pagu dan Realisasi Belanja Jasa	52
39.	Realisasi Belanja Jasa TA 2023 dan 2022	52
40.	Realisasi Belanja Jasa Berdasarkan Sumber Dana	53
41.	Pagu dan Realisasi Belanja Pemeliharaan	53
42.	Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023 dan 2022	54
43.	Realisasi Belanja Pemeliharaan Berdasarkan Sumber Dana	55
44.	Pagu dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri	55
45.	Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2023 dan 2022	56
46.	Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berdasarkan Sumber Dana	57
47.	Pagu dan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri	57
48.	Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2023 dan 2022	58
49.	Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berdasarkan Sumber Dana	58
50.	Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Modal	58
51.	Pagu dan Realisasi Belanja Modal Tanah	59
52.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022	60
53.	Pagu dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60
54.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022	61
55.	Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Sumber Dana	61
56.	Pagu dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023	62
57.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022	62
58.	Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Berdasarkan Sumber Dana	63
59.	Pagu dan Realisasi Belanja Modal Lainnya	63
60.	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022	64
61.	Realisasi Belanja Modal Lainnya Berdasarkan Sumber Dana	64
62.	Pagu dan Realisasi Belanja Dalam Rangka Covid-19	65
63.	Perbandingan Realisasi Belanja Belanja Dalam Rangka Covid-19 TA 2023 dan 2022	65
64.	Rincian Aset Lancar	67
65.	Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Wilayah/Satker	68
66.	Rincian Mutasi Transaksi Kas Lainnya dan Setara Kas	68
67.	Rincian Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>) per Wilayah/Satker	70
68.	Rincian Pendapatan Yang Masih Harus Diterima per Wilayah/Satker	71
69.	Rincian Piutang Bukan Pajak per Wilayah/Satker	71

70.	Mutasi Piutang Bukan Pajak	72
71.	Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak	73
72.	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Wilayah/Satker	74
73.	Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker	75
74.	Rincian Transaksi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	75
75.	Rincian Debitur Yang Mengikuti Kebijakan CP Tahun 2023	76
76.	Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker	77
77.	Rincian Persediaan	77
78.	Rincian Persediaan Per Wilayah/Satker	78
79.	Rincian Aset Tetap	79
80.	Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan Laporan BMN Per 31 Desember 2023	80
81.	Perubahan Saldo Tanah Per 31 Desember 2023 dan 2022	80
82.	Rincian Hibah Masuk Tanah per Wilayah	81
83.	Rincian Hibah Keluar Tanah per Wilayah	82
84.	Rincian Transfer Tanah	82
85.	Perubahan Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 dan 2022	83
86.	Rincian Hibah Masuk Peralatan dan Mesin per Wilayah	85
87.	Perubahan Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 dan 2022	86
88.	Rincian Hibah Masuk Gedung dan Bangunan per Wilayah	88
89.	Rincian Hibah Keluar Gedung dan Bangunan per Wilayah	88
90.	Rincian Transfer Gedung dan Bangunan	88
91.	Rincian Pembelian Aset Pada Gedung dan Bangunan Per Wilayah	89
92.	Rincian Pengembangan Melalui KDP Aset Pada Gedung dan Bangunan Per Wilayah	89
93.	Rincian Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Aset Pada Gedung dan Bangunan Per Wilayah	90
94.	Rincian Aset Tetap Lainnya	91
95.	Rincian KDP Per Wilayah/Satker	93
96.	Kondisi KDP Per Wilayah/Satker	93
97.	Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 2022	94
98.	Rincian Nilai Buku Aset Tetap	95
99.	Perbandingan Akumulasi Penyusutan antara Neraca dan Laporan BMN Per 31 Desember 2023	96
100.	Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker	97
101.	Rincian Transaksi Piutang Tagihan TP/TGR	97

102.	Rincian Aset Lainnya	98
103.	Perubahan Saldo Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023 dan 2022	98
104.	Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per Wilayah/Satker	100
105.	Perubahan Saldo Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2023 dan 2022	100
106.	Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022	101
107.	Rincian Nilai Buku Aset Lainnya	102
108.	Rincian Kewajiban Jangka Pendek	103
109.	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga	104
110.	Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Wilayah/Satker	104
111.	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Per Wilayah/Satker	105
112.	Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Wilayah/Satker	106
113.	Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Wilayah/Satker	108
114.	Rincian PNPB Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022	110
115.	Perbandingan PNPB Lainnya LO dan LRA Per 31 Desember 2023	110
116.	Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 2022	112
117.	Perbandingan Beban Pegawai LO dan LRA Per 31 Desember 2023	112
118.	Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022	113
119.	Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023 dan 2022	114
120.	Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2023 dan 2022	114
121.	Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2023 dan 2022	115
122.	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2023 dan 2022	115
123.	Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2023 dan 2022	116
124.	Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2023 dan 2022	116
125.	Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO dan LRA Per 31 Desember 2023	117
126.	Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2023 dan 2022	117
127.	Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022	117
128.	Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022	118
129.	Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	119
130.	Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas	126
131.	Rincian Saldo Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain	126
132.	Rincian Saldo Transfer Masuk dan Transfer Keluar	127
133.	Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung	127
134.	Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung TAYL	128

135.	Rekapitulasi Kerjasama Swakelola Tipe I	135
136.	Rekapitulasi Kerjasama Swakelola Tipe II-PNBP Berdasarkan Nilai PKS	136
137.	Rekapitulasi Kerjasama Swakelola Tipe II-RPL Berdasarkan Anggaran dan Realisasi	136
138.	Rekapitulasi Kerjasama RPL- APBN BPS	137
139.	Rekapitulasi Kerjasama PNBP- APBN BPS	139
140.	Rekapitulasi Kerjasama Swakelola Tipe II-RPL Berdasarkan Nilai PKS	140
141.	Rincian Hibah Langsung Luar Negeri Dalam Bentuk Uang dan Jasa Tahun Anggaran 2023	141
142.	Rincian SP2HL/SP4HL-BJS Berdasarkan Nomor Dokumen Tahun Anggaran 2023	141
143.	Rincian Hibah dari Pemerintah Daerah ke BPS	145
144.	Rincian Hibah dari BPS ke Pemerintah Daerah	146
145.	Rincian Output Prioritas Nasional I	147
146.	Rincian Output Prioritas Nasional III	147
147.	Indikator Pelaksanaan Anggaran	148
148.	Anomali Capaian Output	148

INDEKS GRAFIK

	Halaman
1 Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2023 dan 2022	24
2 Perbandingan Realisasi PNBPA TA 2023 dan 2022	25
3 Komposisi Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja TA 2023	38

INDEKS SINGKATAN

APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	: Badan Pusat Statistik
BPK	: Badan Pemeriksa Keuangan
BMN	: Barang Milik Negara
DIPA	: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	: Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	: Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	: Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	: Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	: Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
MONSAKTI	: <i>Monitoring</i> SAKTI
SAK	: Sistem Akuntansi Keuangan
SAKTI	: Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi
LRA	: Laporan Realisasi Anggaran
LO	: Laporan Operasional
LPE	: Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	: Kas Umum Negara
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP/TGR	: Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi
KDP	: Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP/TUP	: Uang Persediaan/Tambahan Uang Persediaan
SSBP	: Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	: Satuan Kerja
KPPN	: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
RKP	: Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	: Rencana Strategis

INDEKS CaLK LRA

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN			Halaman
Pendapatan Negara dan Hibah			
	B.1	Pendapatan Negara dan Hibah	22
Catatan	B.1.1	Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	25
Catatan	B.1.2	Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	27
Catatan	B.1.3	Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	29
Catatan	B.1.4	Pendapatan Denda	30
Catatan	B.1.5	Pendapatan Lain-lain	31
Belanja			
	B.2	Belanja	33
Catatan	B.2.1	Belanja Pegawai	39
	B.2.1.1	Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	39
	B.2.1.2	Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	42
	B.2.1.3	Belanja Uang Lembur	43
	B.2.1.4	Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	44
Catatan	B.2.2	Belanja Barang	45
	B.2.2.1	Belanja Barang Operasional	46
	B.2.2.2	Belanja Barang Non Operasional	48
	B.2.2.3	Belanja Barang Persediaan	50
	B.2.2.4	Belanja Jasa	51
	B.2.2.5	Belanja Pemeliharaan	53
	B.2.2.6	Belanja Perjalanan Dalam Negeri	55
	B.2.2.7	Belanja Perjalanan Luar Negeri	57
Catatan	B.2.3	Belanja Modal	58
	B.2.3.1	Belanja Modal Tanah	59
	B.2.3.2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	60
	B.2.3.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	61
	B.2.3.4	Belanja Modal Lainnya	63
Catatan	B.2.4	Belanja Dalam Rangka COVID-19	64

INDEKS CaLK NERACA

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA			Halaman
	C.1	ASET	67
	C.1.1	Aset Lancar	67
Catatan	C.1.1.1	Kas di Bendahara Pengeluaran	67
Catatan	C.1.1.2	Kas Lainnya dan Setara Kas	67
Catatan	C.1.1.3	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	69
Catatan	C.1.1.4	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	71
Catatan	C.1.1.5	Piutang Bukan Pajak	71
Catatan	C.1.1.6	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak	73
Catatan	C.1.1.7	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	74
Catatan	C.1.1.8	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	76
Catatan	C.1.1.9	Persediaan	77
	C.1.2	Aset Tetap	79
Catatan	C.1.2.1	Tanah	80
Catatan	C.1.2.2	Peralatan dan Mesin	82
Catatan	C.1.2.3	Gedung dan Bangunan	85
Catatan	C.1.2.4	Aset Tetap Lainnya	91
Catatan	C.1.2.5	Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)	93
Catatan	C.1.2.6	Akumulasi Penyusutan	94
	C.1.3	Piutang Jangka Panjang	96
Catatan	C.1.3.1	Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi	96
Catatan	C.1.3.2	Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	97
	C.1.4	Aset Lainnya	97
Catatan	C.1.4.1	Aset Tak Berwujud	98
Catatan	C.1.4.2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	99
Catatan	C.1.4.3	Aset Lain-lain	100
Catatan	C.1.4.4	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	101
	C.2	Kewajiban	103
	C.2.1	Kewajiban Jangka Pendek	103
Catatan	C.2.1.1	Utang Kepada Pihak Ketiga	104
Catatan	C.2.1.2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak	105
Catatan	C.2.1.3	Pendapatan Yang Diterima Dimuka	106
Catatan	C.2.1.4	Uang Muka Dari KPPN	108
Catatan	C.2.1.5	Utang Jangka Pendek Lainnya	108
	C.3	Ekuitas	109
Catatan	C.3.1	Ekuitas	109

INDEKS CaLK LO

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL	Halaman
Pendapatan Negara dan Hibah	
D.1 Pendapatan Operasional	110
D.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak	110
Catatan D.1.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	110
D.2 Beban Operasional	111
Catatan D.2.1 Beban Pegawai	111
Catatan D.2.2 Beban Persediaan	113
Catatan D.2.3 Beban Barang dan Jasa	113
Catatan D.2.4 Beban Pemeliharaan	114
Catatan D.2.5 Beban Perjalanan Dinas	115
Catatan D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi	115
Catatan D.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	116
D.3 Pendapatan dan Beban Non Operasional	116
Catatan D.3.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	116
Catatan D.3.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar	117
D.4 Pendapatan dan Beban Non Operasional Lainnya	117
Catatan D.4.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	117
Catatan D.4.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	118

INDEKS CaLK LPE

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS			Halaman
Catatan	E.1	Ekuitas Awal	119
Catatan	E.2	Surplus (Defisit) LO	119
	E.3	Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas	119
Catatan	E.3.1	Koreksi Nilai Persediaan	119
Catatan	E.3.2	Koreksi Atas Reklasifikasi	120
Catatan	E.3.3	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	122
Catatan	E.3.4	Koreksi Lain-Lain	125
Catatan	E.4	Transaksi Antar Entitas	125
	E.4.1	Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	126
	E.4.2	Transfer Masuk dan Transfer Keluar	127
	E.4.3	Pengesahan Hibah Langsung	127
	E.4.4	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	128
	E.4.5	Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)	128
Catatan	E.5	Ekuitas Akhir	128

INDEKS CALK PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA	Halaman
F.1 Temuan dan Tindak Lanjut Temuan BPK	129
F.2 Revisi DIPA	130
F.3 Rekening BPS	134
F.4 Kerjasama Swakelola Tipe I	135
F.5 Kerjasama Swakelola Tipe II Dengan Mekanisme PNB	136
F.6 Kerjasama Swakelola Tipe II Dengan Mekanisme RPL	140
F.7 Hibah Langsung Luar Negeri	140
F.8 Hibah Langsung Dalam Negeri	145
F.9 Pengungkapan Program Prioritas Nasional dan Capaian Output	146
F.10 Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	154
F.11 Pengungkapan Lain-Lain	154

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Jakarta, 20 Mei 2024

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,



Amalia Adininggar Widyasanti

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik TA 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi.

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan-LRA dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Realisasi Pendapatan Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak sebesar Rp378.472.797.063,00 atau mencapai 106,29 persen dari estimasi pendapatan sebesar Rp356.072.278.000,00.

Realisasi Belanja Negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp7.504.604.795.902,00 atau mencapai 97 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp7.737.050.832.000,00.

Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1
Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran

Uraian	TA 2023			TA 2022
	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan Negara	356.072.278.000	378.472.797.063	106,29	51.171.714.629
Belanja Negara	7.737.050.832.000	7.504.604.795.902	97,00	8.311.231.645.255

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas pada 31 Desember 2023 dan 2022.

Neraca yang disajikan adalah hasil proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2023 dicatat dan disajikan sebesar Rp5.428.569.787.170,00 yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp69.382.076.214,00, Aset Tetap (setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan) sebesar Rp5.259.776.645.128,00, Piutang Jangka Panjang sebesar Rp6.276.274,00, dan Aset Lainnya (setelah dikurangi Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi) sebesar Rp99.404.789.554,00.

Nilai Kewajiban tersaji sebesar Rp131.279.754.724,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek. Sementara itu nilai Ekuitas adalah sebesar Rp5.297.290.032.446,00.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 2
Ringkasan Neraca

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aset				
Aset Lancar	69.382.076.214	171.876.193.389	(102.494.117.175)	(59,63)
Aset Tetap	5.259.776.645.128	5.182.226.391.992	77.550.253.136	1,50
Piutang Jangka Panjang	6.276.274	171.040.919	(164.764.645)	(96,33)
Aset Lainnya	99.404.789.554	68.425.088.905	30.979.700.649	45,28
Jumlah Aset	5.428.569.787.170	5.422.698.715.205	5.871.071.965	0,11
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek	131.279.754.724	91.537.986.794	39.741.767.930	43,42
Jumlah Kewajiban	131.279.754.724	91.537.986.794	39.741.767.930	43,42
Ekuitas				
Ekuitas	5.297.290.032.446	5.331.160.728.411	(33.870.695.965)	(0,64)
Jumlah Ekuitas	5.297.290.032.446	5.331.160.728.411	(33.870.695.965)	(0,64)
Jumlah Kewajiban & Ekuitas	5.428.569.787.170	5.422.698.715.205	5.871.071.965	0,11

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari kegiatan operasional, surplus/defisit dari kegiatan non operasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp351.788.792.656,00, sedangkan jumlah beban operasional adalah sebesar Rp7.510.602.886.078,00, sehingga terdapat defisit dari kegiatan operasional sebesar Rp7.158.814.093.422,00. Kegiatan Non Operasional untuk periode sampai dengan 31 Desember 2023 mengalami surplus sebesar Rp5.852.534.241,00. Defisit dari Kegiatan Operasional dan Kegiatan Non Operasional menyebabkan BPS mengalami Defisit-LO sebesar Rp7.152.961.559.181,00.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 1 Januari 2023 adalah sebesar Rp5.331.160.728.411,00 dikurang dengan Defisit-LO sebesar Rp7.152.961.559.181,00 kemudian ditambah dengan koreksi-koreksi senilai minus Rp16.621.529.943,00 dan Transaksi Antar Entitas sebesar

Rp7.135.712.393.159,00 sehingga menghasilkan Ekuitas BPS pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.297.290.032.446,00.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun 2023 didasarkan pada basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atau timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening Kas Negara.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BADAN PUSAT STATISTIK LAPORAN REALISASI ANGGARAN UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2023			TA 2022
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)	Realisasi (Rp)
A. Pendapatan Negara dan Hibah					
A.I Pendapatan Negara					
A.I.1 Penerimaan Negara Bukan Pajak					
A.I.1.a Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha	B.1.1	4.112.922.000	13.108.222.360	318,71	7.748.341.184
A.I.1.b Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	B.1.2	349.468.758.000	347.950.827.133	99,57	16.451.800.916
A.I.1.c Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	B.1.3	146.237.000	2.984.945.919	2.041,17	5.521.292.054
A.I.1.d Pendapatan Denda	B.1.4	150.000	1.075.436.623	716.957,75	1.313.032.692
A.I.1.e Pendapatan Lain - Lain	B.1.5	2.344.211.000	13.353.365.028	569,63	20.137.247.783
Jumlah Penerimaan Negara Bukan Pajak		356.072.278.000	378.472.797.063	106,29	51.171.714.629
Jumlah Pendapatan Negara		356.072.278.000	378.472.797.063	106,29	51.171.714.629
A.II Hibah		0	0	0,00	0
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		356.072.278.000	378.472.797.063	106,29	51.171.714.629
B. Belanja Negara					
B.1 Belanja Pegawai	B.2.1	2.360.432.871.000	2.319.687.669.213	98,27	2.282.380.174.486
B.2 Belanja Barang	B.2.2	5.059.762.487.000	4.875.800.083.713	96,36	5.860.512.565.577
B.3. Belanja Modal	B.2.3	316.855.474.000	309.117.042.976	97,56	168.338.905.192
Jumlah Belanja Negara		7.737.050.832.000	7.504.604.795.902	97,00	8.311.231.645.255



Jakarta, 20 Mei 2024
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti
Amalia Adininggar Widyasanti

III. NERACA

**BADAN PUSAT STATISTIK
NERACA
PER 31 DESEMBER 2023 DAN 2022**

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31-Des-23	31-Des-22
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1.1.1	0	89.371.020
Kas Lainnya dan Setara Kas	C.1.1.2	78.979.277	57.062.405
Jumlah Kas dan Bank		78.979.277	146.433.425
Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	C.1.1.3	27.174.456.006	58.277.265.214
Pendapatan Yang Masih Harus Diterima	C.1.1.4	61.096.562	682.163.135
Piutang			
Piutang Bukan Pajak	C.1.1.5	1.583.944.337	1.632.771.160
Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Piutang Bukan Pajak	C.1.1.6	(440.851.173)	(8.163.699)
Piutang Bukan Pajak (<i>Netto</i>)		1.143.093.164	1.624.607.461
Bagian Lancar Tagihan TP / TGR	C.1.1.7	18.101.890.494	19.199.873.303
Penyisihan Piutang Tidak tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	C.1.1.8	(17.293.092.580)	(17.578.304.708)
Bagian Lancar Tagihan TP / TGR (<i>Netto</i>)		808.797.914	1.621.568.595
Jumlah Piutang (Bersih)		1.951.891.078	3.246.176.056
Persediaan	C.1.1.9	40.115.653.291	109.524.155.559
Jumlah Aset Lancar		69.382.076.214	171.876.193.389
Aset Tetap			
Tanah	C.1.2.1	3.203.381.161.527	3.157.600.032.227
Peralatan dan Mesin	C.1.2.2	2.183.257.236.943	2.150.345.084.810
Gedung dan Bangunan	C.1.2.3	2.030.816.486.155	1.977.048.451.023
Aset Tetap Lainnya	C.1.2.4	38.217.040.150	42.782.106.086
Konstruksi Dalam Pengerjaan	C.1.2.5	33.118.386.227	28.019.577.278
Akumulasi Penyusutan	C.1.2.6	(2.229.013.665.874)	(2.173.568.859.432)
Jumlah Aset Tetap		5.259.776.645.128	5.182.226.391.992
Piutang Jangka Panjang			
Piutang Tagihan TP/TGR	C.1.3.1	6.307.813	189.728.799
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Tagihan TP/TGR	C.1.3.2	(31.539)	(18.687.880)
Tagihan Tuntutan TP/TGR (<i>Netto</i>)		6.276.274	171.040.919
Jumlah Piutang Jangka Panjang (Bersih)		6.276.274	171.040.919
Aset Lainnya			
Aset tak Berwujud	C.1.4.1	409.256.575.075	390.531.435.503
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.1.4.2	54.066.534.264	0
Aset Lain-lain	C.1.4.3	140.593.954.423	286.977.715.708
Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	C.1.4.4	(504.512.274.208)	(609.084.062.306)
Jumlah Aset Lainnya		99.404.789.554	68.425.088.905
JUMLAH ASET		5.428.569.787.170	5.422.698.715.205
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Pada Pihak Ketiga	C.2.1.1	130.892.802.867	90.985.070.100
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	C.2.1.2	963.849	573.343
Pendapatan Diterima Dimuka	C.2.1.3	367.660.163	447.546.691
Uang Muka dari KPPN	C.2.1.4	0	89.371.020
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.1.5	18.327.845	15.425.640
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		131.279.754.724	91.537.986.794
JUMLAH KEWAJIBAN		131.279.754.724	91.537.986.794
EKUITAS			
Ekuitas	C.3.1	5.297.290.032.446	5.331.160.728.411
JUMLAH EKUITAS		5.297.290.032.446	5.331.160.728.411
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		5.428.569.787.170	5.422.698.715.205



Jakarta, 20 Mei 2024
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,

Amalia Adininggar Widyasanti
Amalia Adininggar Widyasanti

IV. LAPORAN OPERASIONAL

BADAN PUSAT STATISTIK LAPORAN OPERASIONAL UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1.1.1	351.788.792.656	21.366.306.307
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak		351.788.792.656	21.366.306.307
Jumlah Pendapatan Operasional		351.788.792.656	21.366.306.307
BEBAN OPERASIONAL			
Beban Pegawai	D.2.1	2.322.159.157.238	2.287.085.450.501
Beban Persediaan	D.2.2	160.189.367.274	115.075.308.785
Beban Barang dan Jasa	D.2.3	2.964.274.912.755	3.823.244.186.829
Beban Pemeliharaan	D.2.4	133.184.458.787	145.085.049.642
Beban Perjalanan Dinas	D.2.5	1.689.124.734.641	1.722.961.732.017
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.2.6	241.544.873.432	290.672.529.437
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D.2.7	125.381.951	(6.730.737.761)
Jumlah Beban Operasional		7.510.602.886.078	8.377.393.519.450
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Operasional		(7.158.814.093.422)	(8.356.027.213.143)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
SURPLUS/(DEFISIT) PELEPASAN ASET NON LANCAR			
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.1	10.286.368.971	5.281.817.748
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	D.3.2	26.704.284.420	15.147.990.559
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar		(16.417.915.449)	(9.866.172.811)
SURPLUS/(DEFISIT) KEGIATAN NON OPERASIONAL LAINNYA			
Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.1	431.395.300.328	100.705.233.635
Beban Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.4.2	409.124.850.638	79.666.069.054
Surplus/(Defisit) Kegiatan Non Operasional Lainnya		22.270.449.690	21.039.164.581
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional		5.852.534.241	11.172.991.770
SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL		(7.152.961.559.181)	(8.344.854.221.373)



Jakarta, 20 Mei 2024
Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,

[Signature]
Amalia Adininggar Widyasanti

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BADAN PUSAT STATISTIK LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2023 DAN 2022

(dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	2023	2022
EKUITAS AWAL	E.1	5.331.160.728.411	5.348.258.131.794
SURPLUS/(DEFISIT) LAPORAN OPERASIONAL	E.2	(7.152.961.559.181)	(8.344.854.221.373)
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS			
Koreksi Nilai Persediaan	E.3.1	(589.410.908)	782.455.926
Koreksi Atas Reklasifikasi	E.3.2	(35.559.360)	643.917.275
Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	E.3.3	(15.480.967.959)	60.168.227.681
Lain - Lain	E.3.4	(515.591.716)	(6.568.183.083)
Jumlah Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas		(16.621.529.943)	55.026.417.799
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	E.4	7.135.712.393.159	8.272.730.400.191
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS		(33.870.695.965)	(17.097.403.383)
EKUITAS AKHIR	E.5	5.297.290.032.446	5.331.160.728.411

Jakarta, 20 Mei 2024

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik,



Amalia Adininggar Widyasanti

VI. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

A. PENJELASAN UMUM

Entitas dan Rencana Strategis

A.1. PROFIL DAN KEBIJAKAN TEKNIS BADAN PUSAT STATISTIK

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional, berupaya untuk menjalankan perannya sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif, dan membangun dan menyiapkan SDM yang berkualitas unggul dan adaptif.

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) Tahun 2020-2024 disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

Visi BPS : **“Penyedia Data Statistik Berkualitas Untuk Indonesia Maju”**,

(“Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia”)

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesional, integritas, dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.

2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN.
3. Meningkatnya pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN.
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Program teknis BPS ini bertujuan untuk menyediakan informasi statistik melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, pengkajian dan analisis statistik, serta diseminasi data dan informasi statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di bidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan.

2. Program Dukungan Manajemen BPS (Dukman).

Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas dengan strategi yang dilakukan adalah: (a) Meningkatkan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan; (b) Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan; (c) Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah; serta (d) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun daerah.

Struktur Organisasi

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK

Badan Pusat Statistik sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah.

Susunan organisasi Badan Pusat Statistik (BPS) diatur dalam Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik terdiri dari:

1. Kepala

Mempunyai tugas memimpin BPS dalam menjalankan tugas dan fungsi BPS.

2. Sekretaris Utama

Mempunyai tugas mengkoordinasikan perencanaan, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, administrasi, dan sumber daya di lingkungan BPS.

3. Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang metodologi dan informasi statistik.

4. Deputi Bidang Statistik Sosial

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik sosial.

5. Deputi Bidang Statistik Produksi

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik produksi.

6. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang statistik distribusi dan jasa.

7. Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik

Mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang neraca dan analisis statistik.

8. Inspektorat Utama

Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan fungsional terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan BPS.

9. Pusat Pendidikan dan Pelatihan

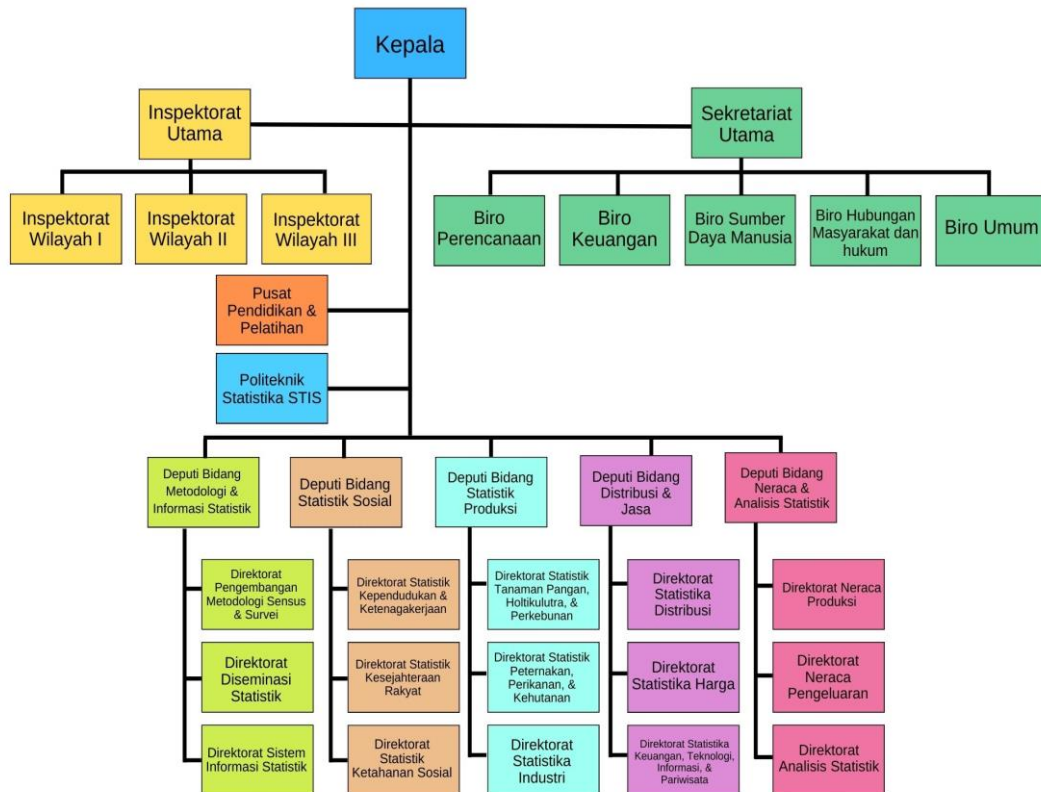
Mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan prajabatan dan kepemimpinan serta teknis dan fungsional.

10. Politeknik Statistika Sekolah Tinggi Ilmu Statistik

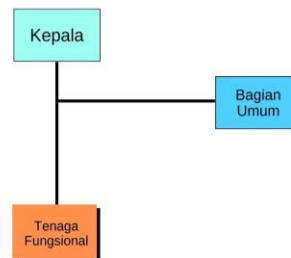
Mempunyai tugas mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang statistika dan komputasi statistik dengan mendidik kader yang memiliki kemampuan akademik/profesional.

11. Instansi Vertikal

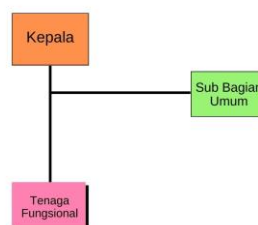
Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi vertikal BPS, dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di Daerah.



Gambar 1. Struktur Organisasi BPS Pusat



Gambar 2. Struktur Organisasi BPS Provinsi



Gambar 3. Struktur Organisasi BPS Kabupaten/Kota

A.2. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2023 ini merupakan laporan konsolidasi dari seluruh jenjang struktural di bawah BPS yaitu wilayah serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas anggaran yang diberikan.

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pusat Statistik adalah 517 satker. Dari jumlah tersebut satker yang menyampaikan laporan keuangan dan dikonsolidasikan sejumlah 517 satker. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3 berikut.

Tabel 3
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPA

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	054	Badan Pusat Statistik	3	-	514	-	-	-	-	-	517
Jumlah			3	-	514	-	-	-	-	-	517

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Keuangan

TM = Tidak Menyampaikan Laporan Keuangan

Pada Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 ini, satuan kerja yang dicakup dalam laporan keuangan BPS meliputi 517 satuan kerja yang berada dalam satu eselon I yang terdiri dari 3 satker pusat, 34 satker provinsi, dan 480 satker kabupaten/kota dengan rincian yang tersebut dalam Tabel 4 sebagai berikut.

Tabel 4
Rincian Jumlah Satker UAKPA

No.	Kode Wilayah	Satker Pusat/Provinsi	Jumlah Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0199	Sekretariat Utama BPS	1
2	0199	Pusdiklat BPS	1
3	0199	Politeknik Statistika STIS	1
4	0100	DKI Jakarta	7
5	0200	Jawa Barat	27
6	0300	Jawa Tengah	36
7	0400	DI Yogyakarta	6
8	0500	Jawa Timur	39
9	0600	Aceh	24
10	0700	Sumatera Utara	32
11	0800	Sumatera Barat	20

No.	Kode Wilayah	Satker Pusat/Provinsi	Jumlah Satuan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
12	0900	Riau	13
13	1000	Jambi	12
14	1100	Sumatera Selatan	16
15	1200	Lampung	15
16	1300	Kalimantan Barat	15
17	1400	Kalimantan Tengah	15
18	1500	Kalimantan Selatan	14
19	1600	Kalimantan Timur	10
20	1700	Sulawesi Utara	13
21	1800	Sulawesi Tengah	12
22	1900	Sulawesi Selatan	25
23	2000	Sulawesi Tenggara	14
24	2100	Maluku	11
25	2200	Bali	10
26	2300	Nusa Tenggara Barat	11
27	2400	Nusa Tenggara Timur	20
28	2500	Papua	22
29	2600	Bengkulu	11
30	2800	Maluku Utara	10
31	2900	Banten	9
32	3000	Bangka Belitung	8
33	3100	Gorontalo	7
34	3200	Kepulauan Riau	8
35	3300	Papua Barat	10
36	3400	Sulawesi Barat	6
37	3500	Kalimantan Utara	6
Total Satuan Kerja			517

Laporan Keuangan BPS Tahun Anggaran 2023 disusun melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang merupakan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan keuangan negara. SAKTI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan untuk berbagai jenjang pelaporan dari tingkat satuan kerja sampai dengan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan keuangan dihasilkan oleh modul-modul yang terdapat pada SAKTI. Laporan keuangan yang menginformasikan tentang pengelolaan keuangan dihasilkan oleh modul penganggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, piutang, dan pelaporan (GLP). Laporan keuangan yang menginformasikan pengelolaan Barang Milik Negara dihasilkan oleh modul persediaan dan aset tetap.

Jumlah satuan kerja di lingkup Badan Pusat Statistik adalah 517 satker yang menyampaikan Laporan Barang Milik Negara tingkat satker dan dikonsolidasikan menjadi

Laporan Barang Milik Negara tingkat wilayah sampai dengan tingkat Kementerian Negara/Lembaga. Rincian satuan kerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 5 sebagai berikut.

Tabel 5
Rekapitulasi Jumlah Satker UAKPB

No.	Kode Eselon I	Uraian	Jumlah Jenis Kewenangan								Jumlah Satker
			KP		KD		DK		TP		
			M	TM	M	TM	M	TM	M	TM	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	054	Badan Pusat Statistik	3	-	514	-	-	-	-	-	517
Jumlah			3	-	514	-	-	-	-	-	517

Keterangan:

M = Menyampaikan Laporan Barang

TM = Tidak Menyampaikan Laporan Barang

Basis Akuntansi

A.3. BASIS AKUNTANSI

Badan Pusat Statistik menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar Pengukuran

A.4. DASAR PENGUKURAN

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Badan Pusat Statistik dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh Aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan Akuntansi

A.5. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik Tahun Anggaran 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan

keuangan ini adalah merupakan kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Di samping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintah.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:

Pendapatan - LRA

(1) Pendapatan - LRA

- Pendapatan – LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan – LRA dilaksanakan berdasarkan Asas Bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan – LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan - LO

(2) Pendapatan – LO

- Pendapatan – LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan/atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan – LO pada Badan Pusat Statistik adalah sebagai berikut:
 - a. Pendapatan dari penjualan publikasi BPS diakui setelah munculnya permintaan data publikasi dari konsumen.
 - b. Pendapatan sewa gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - c. Pendapatan penjualan aset.
 - d. Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan.
 - e. Pendapatan uang ujian masuk, kenaikan, dan akhir pendidikan.
 - f. Pendapatan penyelesaian ganti rugi.
- Akuntansi pendapatan – LO dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (Setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja

(3) Belanja

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban

(4) Beban

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadinya konsumsi Aset, dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset

(5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

Aset Lancar

a. Aset Lancar

- Aset disajikan di Neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di Neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia (BI) pada tanggal Neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam Neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan Piutang Tak Tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas Piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 6
Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*first in first out*).
- Nilai Persediaan disajikan di Neraca berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada

tanggal Neraca dikalikan dengan:

- biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar, apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap

b. Aset Tetap

- Nilai Aset Tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan Aset Tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a. Pengeluaran untuk per satuan Peralatan dan Mesin serta peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk Gedung dan Bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai beban kecuali pengeluaran untuk Tanah, Jalan/Irigasi/Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset Tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan Aset Tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu Aset Tetap.
- Penyusutan Aset Tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah;
 - b. Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.

- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat tersebut tersaji pada tabel 7.

Tabel 7
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat (Tahun)
Peralatan dan Mesin	2 s/d 20
Gedung dan Bangunan	10 s/d 50
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	5 s/d 40
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4

Piutang Jangka Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah Piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah Aset pemerintah selain Aset Lancar, Aset Tetap, dan Piutang Jangka Panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat ATB ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 8
Penggolongan Masa Manfaat Kelompok Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
Software Komputer	4
Franchise	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20

Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol. I	70

- Aset Lain-lain berupa Aset Tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban

(6) Kewajiban

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban Jangka Pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai Kewajiban Jangka Panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas

(7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara Aset dengan Kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Estimasi pendapatan Badan Pusat Statistik TA 2023 adalah Rp356.072.278.000,00. Estimasi pendapatan tersebut naik sebesar Rp321.839.241.000,00 dari estimasi pendapatan yang semula tercatat sebesar Rp34.233.037.000,00.

Pagu belanja Badan Pusat Statistik TA 2023 adalah sebesar Rp7.737.050.832.000,00. Pagu tersebut turun sebesar Rp281.853.720.000,00 dari pagu awal belanja yang tercatat sebesar Rp8.018.904.552.000,00. Penurunan pagu belanja terjadi pada kelompok jenis belanja pegawai dan barang. Pagu kelompok jenis belanja pegawai turun sebesar Rp80.708.873.000,00. Kenaikan ini diperoleh dari pagu semula sebesar Rp2.441.141.744.000,00 berubah menjadi Rp2.360.432.871.000,00. Pagu kelompok jenis belanja barang turun sebesar Rp350.768.176.000,00 dari pagu semula sebesar Rp5.410.530.663.000,00 berubah menjadi Rp5.059.762.487.000,00. Sedangkan pada kelompok belanja modal terjadi kenaikan pagu sebesar Rp149.623.329.000,00 yaitu dari pagu semula sebesar Rp167.232.145.000,00 berubah menjadi sebesar Rp316.855.474.000,00.

Perubahan estimasi pendapatan dan pagu belanja selama TA 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 9
Perubahan Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja

Uraian	Estimasi Pendapatan dan Pagu Belanja (Rp)		
	Semula	Menjadi	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan			
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	4.019.584.000	4.112.922.000	93.338.000
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	27.722.855.000	349.468.758.000	321.745.903.000
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	146.237.000	146.237.000	0
Pendapatan Denda	150.000	150.000	0
Pendapatan Lain-lain	2.344.211.000	2.344.211.000	0
Jumlah Pendapatan	34.233.037.000	356.072.278.000	321.839.241.000
Belanja			
Belanja Pegawai	2.441.141.744.000	2.360.432.871.000	(80.708.873.000)
Belanja Barang	5.410.530.663.000	5.059.762.487.000	(350.768.176.000)
Belanja Modal	167.232.145.000	316.855.474.000	149.623.329.000
Jumlah Belanja	8.018.904.552.000	7.737.050.832.000	(281.853.720.000)

Estimasi pendapatan TA 2023 secara keseluruhan sebesar Rp356.072.278.000,00. Nilai estimasi pendapatan tersebut teralokasi atas estimasi pendapatan kelompok akun Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN dengan nilai estimasi sebesar Rp4.112.922.000,00, kelompok akun Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi dengan nilai estimasi sebesar Rp349.468.758.000,00, kelompok akun Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan dengan nilai estimasi sebesar Rp146.237.000,00,

kelompok akun Pendapatan Denda dengan nilai estimasi sebesar Rp150.000,00 dan kelompok akun Pendapatan Lain-lain dengan nilai estimasi sebesar Rp2.344.211.000,00. Estimasi pendapatan kelompok akun Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi mendapatkan alokasi estimasi pendapatan yang lebih besar. Hal ini dikarenakan kelompok akun pendapatan ini berpotensi penerimaan yang besar. Potensi ini dikarenakan kelompok akun pendapatan ini memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok dan fungsi Badan Pusat Statistik sebagai lembaga yang menyediakan layanan data statistik.

Pagu belanja selama TA 2023 dialokasikan berdasarkan kelompok program kegiatan sebanyak 2 (dua) kelompok, yaitu kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan Dukungan Manajemen. Pagu belanja menurut kelompok program mengalami perubahan selama TA 2023. Secara ringkas perubahan pagu belanja menurut kelompok program disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 10
Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Program

Uraian Program	Pagu Belanja (Rp)		
	Semula	Menjadi	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	4.771.388.872.000	4.546.509.594.000	(224.879.278.000)
Program Dukungan Manajemen	3.247.515.680.000	3.190.541.238.000	(56.974.442.000)
Jumlah	8.018.904.552.000	7.737.050.832.000	(281.853.720.000)

Pagu belanja kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik selama TA 2023 adalah sebesar Rp4.546.509.594.000,00 yang mengalami penurunan sebesar Rp224.879.278.000,00 dari nilai pagu semula yang sebesar Rp4.771.388.872.000,00. Untuk pagu belanja kelompok program Dukungan Manajemen selama TA 2023 adalah sebesar Rp3.190.541.238.000,00 dan juga mengalami penurunan sebesar Rp56.974.442.000,00 dari nilai pagu semula yang sebesar Rp3.247.515.680.000,00

Selain dikelompokkan berdasarkan program, pagu belanja selama TA 2023 juga dikelompokkan berdasarkan sumber dana. Kelompok pagu belanja menurut sumber dana terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu kelompok sumber dana Rupiah Murni (RM), Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN). Perubahan pagu belanja berdasarkan kelompok sumber dana selama TA 2023 tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 11
Perubahan Pagu Belanja Berdasarkan Sumber Dana

Sumber Dana	Pagu Belanja (Rp)		
	Semula	Menjadi	Perubahan
(1)	(2)	(3)	(4)
Rupiah Murni (RM)	7.993.306.282.000	7.408.963.367.000	(584.342.915.000)
PNBP	25.598.270.000	325.486.367.000	299.888.097.000
Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN)	0	2.601.098.000	2.601.098.000
Jumlah	8.018.904.552.000	7.737.050.832.000	(281.853.720.000)

Pagu belanja kelompok sumber dana selama TA 2023 terdapat perubahan baik pada kelompok sumber dana Rupiah Murni, kelompok sumber dana PNBPN, maupun kelompok sumber dana HLLN. Pagu belanja kelompok sumber dana Rupiah Murni selama TA 2023 adalah sebesar Rp7.408.963.367.000,00, mengalami penurunan sebesar Rp584.342.915.000,00 dari pagu semula sebesar Rp7.993.306.282.000,00. Pagu belanja kelompok sumber dana PNBPN sebesar Rp325.486.367.000,00, mengalami kenaikan sebesar Rp299.888.097.000,00 dari pagu semula sebesar Rp25.598.270.000,00. Untuk pagu belanja kelompok sumber dana HLLN sebesar Rp2.601.098.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.601.098.000,00 dari pagu semula yang sebesar Rp0,00.

Pagu belanja kelompok sumber dana RM selama TA 2023 terdapat pada satuan kerja (satker) BPS di seluruh Indonesia. Begitu pula pada pagu belanja kelompok sumber dana PNBPN terdapat pada satuan kerja (satker) BPS Provinsi di seluruh Indonesia kecuali Satker BPS Provinsi DI Yogyakarta. Untuk pagu belanja kelompok sumber dana HLLN hanya terdapat pada satker Sekretariat Utama (Settama) BPS.

Berkenaan dalam upaya penanganan dampak pandemi Covid-19, selama TA 2023, BPS mengalokasikan pagu belanja yang dikhususkan untuk kegiatan tersebut sebesar Rp172.162.000,00. Rincian pagu semula dan revisi terkait alokasi belanja penanganan dampak pandemi Covid-19 selama TA 2023 dijelaskan pada tabel berikut ini.

Tabel 12
Rincian Pagu Belanja Penanganan Dampak Pandemi Covid-19

Kode Akun	Uraian	Pagu Belanja (Rp)	
		Semula	Menjadi
(1)	(2)	(3)	(4)
521131	Belanja Barang Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	0	57.632.000
521241	Belanja Barang Non Operasional-Penanganan Pandemi COVID-19	2.032.756.000	54.823.000
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi COVID-19	0	59.707.000
Jumlah		2.032.756.000	172.162.000

Realisasi Pendapatan
Rp378.472.797.063,00

B.1. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH

Realisasi pendapatan selama TA 2023 sebesar Rp378.472.797.063,00 atau mencapai 106,29 persen dari estimasi pendapatan yang telah ditetapkan yaitu sebesar Rp356.072.278.000,00. Realisasi pendapatan selama TA 2023 secara keseluruhan merupakan kelompok pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Rincian estimasi dan realisasi pendapatan selama TA 2023 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 13
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan Neto

Uraian	TA 2023		
	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)
(1)	(2)	(3)	(4)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	4.112.922.000	13.108.222.360	318,71
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi	349.468.758.000	347.950.827.133	99,57
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	146.237.000	2.984.945.919	2.041,17

Pendapatan Denda	150.000	1.075.436.623	716.957,75
Pendapatan Lain-Lain	2.344.211.000	13.353.365.028	569,63
Jumlah	356.072.278.000	378.472.797.063	106,29

Realisasi pendapatan selama TA 2023 sebesar Rp378.472.797.063,00 yang tersaji dalam Tabel 13 merupakan nilai bersih pendapatan yang diperoleh dari realisasi pendapatan bruto sebesar Rp378.472.797.063,00 dikurangi dengan pengembalian pendapatan sebesar Rp0,00.

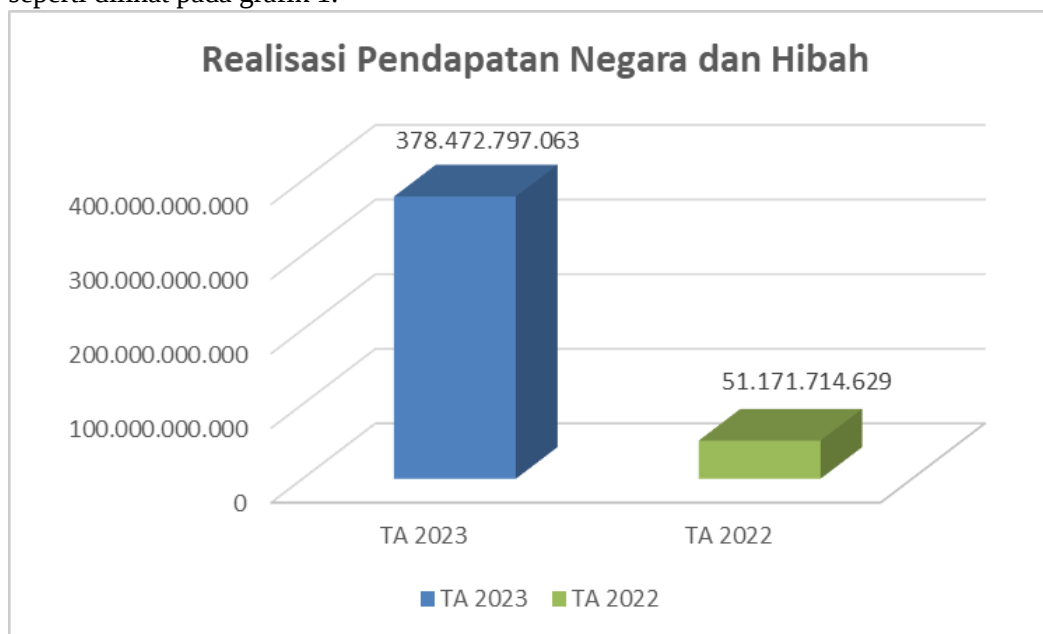
Penjelasan realisasi penerimaan PNBP secara rinci sebagai berikut:

1. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penjualan dan pemanfaatan atas pengelolaan aset BMN. Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN yang tercatat pada Laporan Keuangan TA 2023 ini terdiri dari pendapatan dari penjualan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan mesin, pendapatan dari pemindahtanganan BMN lainnya, pendapatan sewa atas tanah, gedung, dan bangunan, serta pendapatan dari penerimaan klaim asuransi BMN.
2. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi merupakan pendapatan yang perolehannya berasal dari penyelenggaraan kegiatan pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi. Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi yang tercatat pada Laporan Keuangan TA 2023 terdiri dari pendapatan ujian/seleksi masuk pendidikan, Pendapatan Biaya Pendidikan, pendapatan layanan pendidikan dan/atau pelatihan, pendapatan dari layanan survey dan pemetaan, serta pendapatan hasil survey dan pemetaan.
3. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengelolaan rekening perbankan dan keuangan oleh Kementerian Negara/Lembaga. Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan yang tercatat pada Laporan Keuangan TA 2023 terdiri dari Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) dan pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.
4. Pendapatan Denda merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan denda lainnya. Pendapatan Denda yang tercatat pada Laporan Keuangan TA 2023 ini terdiri dari pendapatan denda penyelesaian pekerjaan pemerintah dan pendapatan denda lainnya.
5. Pendapatan Lain-lain adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan tugas pokok dan fungsi BPS. Pendapatan Lain-lain yang tercatat pada Laporan Keuangan TA 2023 terdiri dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (TAYL), penerimaan kembali belanja barang TAYL, penerimaan kembali belanja modal TAYL, pendapatan setoran dari sisa utang non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pensiunan PNS, penerimaan kembali persekot/uang muka gaji dan pendapatan anggaran lain-lain.

Realisasi pendapatan yang tidak terestimasi atau tidak diperkirakan diterima dalam DIPA TA 2023 adalah pendapatan dari penjualan tanah, gedung, dan bangunan,

Pendapatan Biaya Pendidikan, pendapatan denda lainnya, penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (TAYL), penerimaan kembali belanja barang TAYL, penerimaan kembali belanja modal TAYL pendapatan setoran dari sisa utang non TP/TGR pensiunan PNS, dan penerimaan kembali persekot/uang muka gaji.

Perbandingan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah selama TA 2023 dan 2022 seperti dilihat pada grafik 1.



**Grafik 1: Perbandingan Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah
TA 2023 dan 2022**

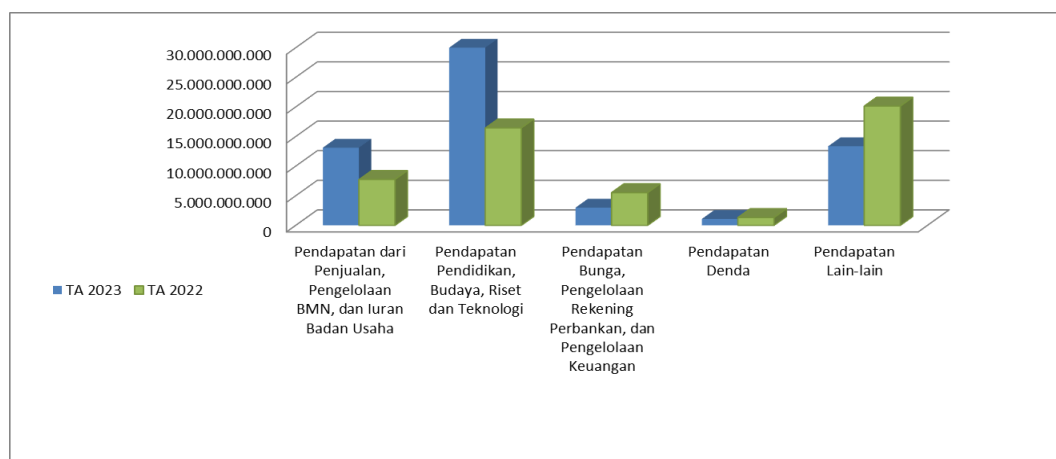
Realisasi pendapatan selama TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp327.301.082.434,00 atau sebesar 639,61 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada periode yang sama TA 2022. Perbandingan realisasi pendapatan berupa PNPB TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 14
Perbandingan Realisasi Pendapatan Neto
TA 2023 dan 2022

Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
			(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	13.108.222.360	7.748.341.184	5.359.881.176	69,17
Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi	347.950.827.133	16.451.800.916	331.499.026.217	2.014,97
Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan	2.984.945.919	5.521.292.054	(2.536.346.135)	(45,94)
Pendapatan Denda	1.075.436.623	1.313.032.692	(237.596.069)	(18,10)
Pendapatan Lain-lain	13.353.365.028	20.137.247.783	(6.783.882.755)	(33,69)
Jumlah	378.472.797.063	51.171.714.629	327.301.082.434	639,61

Penurunan realisasi pendapatan terdapat pada Pendapatan Bunga Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan sebesar 45,94 persen, Pendapatan Denda sebesar 18,10 persen, dan Pendapatan Lain-lain sebesar 33,69 persen.

Selain penurunan realisasi, terdapat penerimaan negara bukan pajak yang mengalami kenaikan selama TA 2023 jika dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022 yaitu Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN sebesar 69,17 persen dan Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset dan Teknologi sebesar 2.014,97 persen.



**Grafik 2: Perbandingan Realisasi PNBPNP
TA 2023 dan 2022**

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN Rp13.108.222.360,00

B.1.1 Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN

Berdasarkan DIPA TA 2023, BPS menetapkan estimasi penerimaan PNBPNP yang akan diperoleh selama TA 2023 berupa pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha, dan penerimaan klaim asuransi BMN sebesar Rp4.112.922.000,00. Realisasi penerimaan PNBPNP dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha, dan penerimaan klaim asuransi BMN selama TA 2023 tercatat sebesar Rp13.108.222.360,00 atau 318,71 persen.

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha, dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan penjualan dan pemanfaatan atas pengelolaan aset BMN. Pendapatan ini terinci diperoleh dari transaksi penjualan tanah, gedung dan bangunan berupa penjualan pembongkaran hasil renovasi gedung kantor, penjualan peralatan dan mesin, serta penjualan aset lainnya yang berlebih/rusak/dihapuskan berupa penjualan kendaraan bermotor dan benda inventaris kantor, pendapatan sewa berupa sewa rumah dinas, dan sewa gedung dan bangunan (sewa kantin).

Adapun rincian realisasi pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha, dan penerimaan klaim asuransi BMN adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425113	Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	11.526.000	0	0,00

425121	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	22.104.888	0,00
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	336.673.000	797.269.873	236,81
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	1.160.260.000	9.466.994.210	815,94
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.415.140.000	2.648.101.717	109,65
425139	Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya	15.572.000	0	0,00
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	173.751.000	173.751.672	100,00
Jumlah		4.112.922.000	13.108.222.360	318,71

Terdapat estimasi pendapatan yang tidak terealisasi selama TA 2023 pada kelompok berupa pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha, dan penerimaan klaim asuransi BMN. Pendapatan tersebut adalah Pendapatan Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan dan Pendapatan dari Pemanfaatan BMN Lainnya yang besaran estimasinya pada TA 2023 masing-masing adalah Rp11.526.000,00 dan Rp15.572.000,00. Hal ini dikarenakan selama TA 2023 tidak ada transaksi penerimaan pendapatan dari penjualan dokumen pelelangan dan pemanfaatan BMN lainnya.

Realisasi pendapatan dari penjualan, pengelolaan BMN, iuran badan usaha per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan (Rp)	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin (Rp)	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya (Rp)	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan (Rp)	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN (Rp)
1	SETTAMA	0	0	890.095.354	477.623.870	173.751.672
2	PUSDIKLAT	0	0	143.107.999	6.592.496	0
3	POLSTAT STIS	0	0	0	68.490.065	0
4	DKI JAKARTA	0	6.224.059	33.522.599	10.963.508	0
5	JAWA BARAT	0	0	1.313.338.127	69.980.798	0
6	JAWA TENGAH	0	0	2.400.511.148	94.414.472	0
7	DI YOGYAKARTA	0	24.679.000	168.719.896	33.861.833	0
8	JAWA TIMUR	0	0	212.409.397	121.347.541	0
9	ACEH	0	0	168.761.968	59.697.153	0
10	SUMATERA UTARA	0	258.548.920	818.798.878	88.416.694	0
11	SUMATERA BARAT	11.578.999	10.650.605	0	86.687.243	0
12	RIAU	0	103.648.000	0	48.131.468	0
13	JAMBI	0	0	65.801.067	55.589.343	0
14	SUMATERA SELATAN	0	0	237.885.476	54.566.729	0
15	LAMPUNG	10.525.889	0	111.705.208	36.690.672	0
16	KALIMANTAN BARAT	0	18.384.000	15.340.000	49.527.767	0
17	KALIMANTAN TENGAH	0	0	90.806.621	53.743.700	0
18	KALIMANTAN SELATAN	0	10.433.577	0	44.487.466	0
19	KALIMANTAN TIMUR	0	15.262.867	27.978.999	45.534.533	0
20	SULAWESI UTARA	0	96.813.816	241.191.156	34.982.959	0
21	SULAWESI TENGAH	0	1.855.555	218.899.998	53.763.816	0
22	SULAWESI SELATAN	0	8.556.998	18.123.999	74.991.007	0
23	SULAWESI TENGGARA	0	108.407.141	574.743.048	39.546.261	0
24	MALUKU	0	0	46.700.000	89.571.631	0
25	BALI	0	0	325.847.720	46.283.758	0
26	NUSA TENGGARA BARAT	0	8.324.000	693.310.522	36.085.505	0
27	NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	5.690.749	50.426.189	0
28	PAPUA	0	0	0	250.226.167	0
29	BENGKULU	0	81.256.337	151.999	40.476.123	0
30	MALUKU UTARA	0	32.825.000	689.000	98.457.263	0
31	BANTEN	0	0	65.055.557	36.888.460	0
32	KEP. BANGKA BELITUNG	0	0	7.970.000	30.647.689	0
33	GORONTALO	0	11.399.998	50.109.032	12.925.850	0
34	KEPULAUAN RIAU	0	0	0	55.105.559	0
35	PAPUA BARAT	0	0	313.018.895	133.740.653	0
36	SULAWESI BARAT	0	0	206.709.798	26.693.422	0
37	KALIMANTAN UTARA	0	0	0	30.942.054	0

Jumlah	22.104.888	797.269.873	9.466.994.210	2.648.101.717	173.751.672
--------	------------	-------------	---------------	---------------	-------------

Pendapatan
Pendidikan, Budaya,
Riset, dan Teknologi
Rp347.950.827.133,00

B.1.2 Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi

Berdasarkan DIPA TA 2023, BPS menetapkan estimasi PNPB yang akan diperoleh selama TA 2023 berupa pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi sebesar Rp349.468.758.000,00. Realisasi PNPB tersebut selama TA 2023 sebesar Rp347.950.827.133,00 atau 99,57 persen.

Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi merupakan pendapatan yang diperoleh dari kegiatan ujian/seleksi masuk pendidikan yaitu biaya pendaftaran ujian masuk penerimaan mahasiswa baru Politeknik Statistika STIS, layanan pendidikan dan/atau pelatihan pada satker Pusdiklat BPS, layanan survei dan pemetaan kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Badung, kerjasama Pendataan Lengkap KUMKM (PL-KUMKM) 2023 dengan Kementerian Koperasi dan UMKM, serta kegiatan hasil survei dan pemetaan berupa penjualan buku-buku publikasi baik dalam bentuk *softcopy* maupun *hardcopy*, penjualan data mikro (dalam bentuk *Dbase file*), tabulasi (data mikro dengan proses), penjualan publikasi elektronik/*softcopy* (menurut jumlah halaman dan dalam bentuk *pdf*), dan penjualan peta digital wilayah (dalam bentuk *softfile*).

Adapun rincian realisasi pendapatan pendidikan, budaya, riset, dan teknologi adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	5.400.000.000	6.364.500.000	117,86
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	0	70.525.000	0,00
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	4.023.500.000	4.023.500.000	100,00
425432	Pendapatan Layanan Survei dan Pemetaan	331.509.133.000	331.509.133.000	100,00
425435	Pendapatan Hasil Survei dan Pemetaan	8.536.125.000	5.983.169.133	70,09
Jumlah		349.468.758.000	347.950.827.133	99,57

Realisasi Pendapatan Pendidikan, Budaya, Riset, dan Teknologi per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan (Rp)	Pendapatan Biaya Pendidikan (Rp)	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan (Rp)	Pendapatan Layanan Survei dan Pemetaan (Rp)	Pendapatan Hasil Survei dan Pemetaan (Rp)
1	SETTAMA	0	0	0	34.834.329.000	5.859.749.874
2	PUSDIKLAT	0	0	4.023.500.000	0	0
3	POLSTAT STIS	6.364.500.000	70.525.000	0	0	0
4	DKI JAKARTA	0	0	0	410.938.000	544.359
5	JAWA BARAT	0	0	0	8.384.504.000	63.821.952
6	JAWA TENGAH	0	0	0	4.242.032.000	9.753.900
7	DI YOGYAKARTA	0	0	0	0	1.533.061
8	JAWA TIMUR	0	0	0	20.373.600.000	20.337.593
9	ACEH	0	0	0	13.648.095.000	447.446
10	SUMATERA UTARA	0	0	0	20.966.360.000	771.041

11	SUMATERA BARAT	0	0	0	7.272.182.000	5.837.405
12	RIAU	0	0	0	4.256.342.000	0
13	JAMBI	0	0	0	9.231.373.000	422.063
14	SUMATERA SELATAN	0	0	0	12.931.767.000	10.641.271
15	LAMPUNG	0	0	0	12.050.455.000	795.442
16	KALIMANTAN BARAT	0	0	0	13.942.893.000	0
17	KALIMANTAN TENGAH	0	0	0	9.222.561.000	3.566
18	KALIMANTAN SELATAN	0	0	0	12.857.789.000	0
19	KALIMANTAN TIMUR	0	0	0	3.168.785.000	94.618
20	SULAWESI UTARA	0	0	0	9.141.003.000	125.125
21	SULAWESI TENGAH	0	0	0	10.796.010.000	1.172.685
22	SULAWESI SELATAN	0	0	0	27.675.645.000	468.289
23	SULAWESI TENGGARA	0	0	0	11.019.127.000	69.500
24	MALUKU	0	0	0	6.546.400.000	0
25	BALI	0	0	0	522.749.000	0
26	NUSA TENGGARA BARAT	0	0	0	2.683.378.000	846.408
27	NUSA TENGGARA TIMUR	0	0	0	19.641.332.000	3.929.253
28	PAPUA	0	0	0	7.862.532.000	0
29	BENGKULU	0	0	0	6.909.025.000	410
30	MALUKU UTARA	0	0	0	3.711.730.000	0
31	BANTEN	0	0	0	13.254.910.000	252.004
32	KEP. BANGKA BELITUNG	0	0	0	5.878.728.000	160.000
33	GORONTALO	0	0	0	3.506.730.000	847.042
34	KEPULAUAN RIAU	0	0	0	1.517.866.000	100.000
35	PAPUA BARAT	0	0	0	4.801.662.000	444.826
36	SULAWESI BARAT	0	0	0	5.574.016.000	0
37	KALIMANTAN UTARA	0	0	0	2.672.285.000	0
Jumlah		6.364.500.000	70.525.000	4.023.500.000	331.509.133.000	5.983.169.133

Realisasi Pendapatan Layanan Survei dan Pemetaan salah satunya merupakan realisasi pendapatan yang diperoleh dari kegiatan kerja sama Pendataan Lengkap KUMKM (PL-KUMKM) 2023 dengan Kementerian Koperasi dan UMKM. Kegiatan ini didasarkan pada Nota Kesepahaman antara BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM dengan nomor 2/KB/M.KUMKM/III/2022 dan nomor MoU-01/HK.610/NK/03/2022 tanggal 9 Maret 2022 tentang Penyediaan, Pemanfaatan Data dan Informasi Statistik Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah serta Pengembangan Kerjasama Kelembagaan. Kesepahaman ini kemudian dituangkan dalam Kesepakatan Kerjasama (KKS) antara BPS dengan Kementerian Koperasi dan UKM yang ditandatangani pada tanggal 11 Juli 2023.

Mekanisme pembiayaan kegiatan PL-KUMKM 2023 melalui pagu dengan sumber dana PNBK. Kementerian Koperasi dan UKM memberikan dana kegiatan yang

berasal dari belanja Kementerian kepada BPS yang kemudian disetorkan ke Kas Negara dan dimasukkan dalam pagu BPS melalui mekanisme PNBPN untuk membiayai kegiatan PL-KUMKM 2023. Atas mekanisme ini maka teridentifikasi sebagai transaksi resiprokal antara BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM. Kegiatan PL-KUMKM 2023 dilaksanakan pada 33 satker di BPS.

Berdasarkan Petunjuk Teknis Akuntansi 19: Identifikasi dan Eliminasi Transaksi Resiprokal pada Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (K/L) dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), transaksi resiprokal antara BPS dan Kementerian Koperasi dan UKM dicatat melalui aplikasi SAKTI. Rekapitulasi transaksi resiprokal yang tersaji dalam aplikasi MonSAKTI BPS periode 13 tahun 2023 sebagai berikut:

No.	Satker Pengirim (Kemenkop dan UKM)	Belanja (Rp)	Satker Penerima (BPS)	Pendapatan (Rp)	Selisih (Rp)
1	Deputi Bid. Kewirausahaan	5.878.728.000	Prov. Kep. Babel	5.878.728.000	0
2	Deputi Bid. Kewirausahaan	3.506.730.000	Prov. Gorontalo	3.506.730.000	0
3	Deputi Bid. Kewirausahaan	1.517.866.000	Prov. Kep. Riau	1.517.866.000	0
4	Deputi Bid. Kewirausahaan	4.801.662.000	Prov. Papua Barat	4.801.662.000	0
5	Deputi Bid. Kewirausahaan	5.574.016.000	Prov. Sulawesi Barat	5.574.016.000	0
6	Deputi Bid. Kewirausahaan	13.648.095.000	Prov. Aceh	13.648.095.000	0
7	Deputi Bid. Kewirausahaan	34.834.329.000	Settama	34.834.329.000	0
8	Deputi Bid. Kewirausahaan	8.384.504.000	Prov. Jawa Barat	8.384.504.000	0
9	Deputi Bid. Kewirausahaan	20.966.360.000	Prov. Sumatera Utara	20.966.360.000	0
10	Deputi Bid. Kewirausahaan	4.242.032.000	Prov. Jawa Tengah	4.242.032.000	0
11	Deputi Bid. Kewirausahaan	4.256.342.000	Prov. Riau	4.256.342.000	0
12	Deputi Bid. Kewirausahaan	27.675.645.000	Prov. Sulawesi Selatan	27.675.645.000	0
13	Deputi Bid. Kewirausahaan	6.546.400.000	Prov. Maluku	6.546.400.000	0
14	Deputi Bid. Kewirausahaan	2.683.378.000	Prov. NTB	2.683.378.000	0
15	Deputi Bid. Kewirausahaan	19.641.332.000	Prov. NTT	19.641.332.000	0
16	Deputi Bid. Kewirausahaan	12.050.455.000	Prov. Lampung	12.050.455.000	0
17	Deputi Bid. Kewirausahaan	13.942.893.000	Prov. Kalimantan Barat	13.942.893.000	0
18	Deputi Bid. Kewirausahaan	9.222.561.000	Prov. Kalimantan Tengah	9.222.561.000	0
19	Deputi Bid. Kewirausahaan	13.254.910.000	Prov. Banten	13.254.910.000	0
20	Deputi Bid. Kewirausahaan	11.019.127.000	Prov. Sulawesi Tenggara	11.019.127.000	0
21	Deputi Bid. Kewirausahaan	7.862.532.000	Prov. Papua	7.862.532.000	0
22	Deputi Bid. Kewirausahaan	20.373.600.000	Prov. Jawa Timur	20.373.600.000	0
23	Deputi Bid. Kewirausahaan	410.938.000	Prov. DKI Jakarta	410.938.000	0
24	Deputi Bid. Kewirausahaan	7.272.182.000	Prov. Sumatera Barat	7.272.182.000	0
25	Deputi Bid. Kewirausahaan	6.909.025.000	Prov. Bengkulu	6.909.025.000	0
26	Deputi Bid. Kewirausahaan	3.711.730.000	Prov. Maluku Utara	3.711.730.000	0
27	Deputi Bid. Kewirausahaan	9.141.003.000	Prov. Sulawesi Utara	9.141.003.000	0
28	Deputi Bid. Kewirausahaan	10.796.010.000	Prov. Sulawesi Tengah	10.796.010.000	0
29	Deputi Bid. Kewirausahaan	12.857.789.000	Prov. Kalimantan Selatan	12.857.789.000	0
30	Deputi Bid. Kewirausahaan	3.168.785.000	Prov. Kalimantan Timur	3.168.785.000	0
31	Deputi Bid. Kewirausahaan	9.231.373.000	Prov. Jambi	9.231.373.000	0
32	Deputi Bid. Kewirausahaan	12.931.767.000	Prov. Sumatera Selatan	12.931.767.000	0
33	Deputi Bid. Kewirausahaan	2.672.285.000	Prov. Kalimantan Utara	2.672.285.000	0
Jumlah		330.986.384.000	Jumlah	330.986.384.000	0

Pendapatan
Bunga,
Pengelolaan
Rekening
Perbankan, dan
Pengelolaan
Keuangan
Rp2.984.945.919,00

B.1.3 Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan

Berdasarkan DIPA TA 2023, BPS menetapkan estimasi PNBPN yang akan diperoleh selama TA 2023 berupa pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan sebesar Rp146.237.000,00. Realisasi atas PNBPN yang berasal dari pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan selama TA 2023 adalah sebesar Rp2.984.945.919,00 atau 2.041,17 persen.

Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan merupakan pendapatan yang terdiri dari pendapatan penyelesaian ganti kerugian negara terhadap pegawai negeri bukan bendahara atau pejabat lain.

Adapun rincian realisasi penerimaan pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	5.737.000	0	0,00
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Rugi Kerugian Negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara	140.500.000	2.984.945.919	2.124,52
Jumlah		146.237.000	2.984.945.919	2.041,17

Terdapat estimasi pendapatan yang tidak terealisasi selama TA 2023 pada kelompok pendapatan bunga, pengelolaan rekening perbankan, dan pengelolaan keuangan. Pendapatan tersebut adalah Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) yang besaran estimasinya pada TA 2023 adalah Rp5.737.000,00. Hal ini dikarenakan selama TA 2023 tidak ada transaksi penerimaan pendapatan dari jasa lembaga keuangan (jasa giro).

Realisasi Pendapatan Bunga, Pengelolaan Rekening Perbankan, dan Pengelolaan Keuangan per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro) (Rp)	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain (Rp)
1	SETTAMA	0	2.983.445.919
2	JAMBI	0	1.500.000
Jumlah		0	2.984.945.919

Pendapatan Denda
Rp1.075.436.623,00

B.1.4 Pendapatan Denda

Berdasarkan DIPA TA 2023, BPS menetapkan estimasi PNBP yang akan diperoleh selama TA 2023 berupa pendapatan denda sebesar Rp150.000,00. Realisasi atas PNBP yang berasal dari pendapatan denda selama TA 2023 adalah sebesar Rp1.075.436.623,00 atau 716.957,75 persen. Pendapatan Denda merupakan pendapatan yang diperoleh dari pengenaan denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah dan pendapatan denda lainnya.

Adapun perolehan realisasi pendapatan denda adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	150.000	1.032.935.345	688.623,56
425839	Pendapatan Denda Lainnya	0	42.501.278	0,00
Jumlah		150.000	1.075.436.623	716.957,75

Realisasi Pendapatan Denda per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah (Rp)	Pendapatan Denda Lainnya (Rp)
1	SETTAMA	837.471.757	0
2	PUSDIKLAT	0	0
3	POLSTAT STIS	493.200	0
4	DKI JAKARTA	132.442	870.000
5	JAWA TENGAH	21.885.660	16.456.000
6	JAWA TIMUR	6.297.000	0
7	SUMATERA UTARA	32.574.390	0
8	SUMATERA BARAT	5.148.800	1.358.000
9	RIAU	4.245.384	15.771.000
10	JAMBI	4.311.000	0
11	SUMATERA SELATAN	51.986.000	1.358.000
12	LAMPUNG	3.696.000	0
13	KALIMANTAN BARAT	1.400.000	0
14	KALIMANTAN TENGAH	2.219.400	0
15	KALIMANTAN SELATAN	93.923	0
16	KALIMANTAN TIMUR	1.940.677	0
17	SULAWESI UTARA	5.419.105	1.703.278
18	SULAWESI TENGAH	731.436	0
19	SULAWESI SELATAN	959.766	0
20	SULAWESI TENGGARA	2.301.000	0
21	MALUKU	3.024.000	0
22	BALI	0	3.680.000
23	NUSA TENGGARA BARAT	2.138.967	0
24	NUSA TENGGARA TIMUR	495.677	0
25	PAPUA	1.204.417	0
26	BENGKULU	1.193.754	1.305.000
27	MALUKU UTARA	2.943.878	0
28	BANTEN	24.446.712	0
29	GORONTALO	10.241.000	0
30	PAPUA BARAT	3.940.000	0
Jumlah		1.032.935.345	42.501.278

Pendapatan Lain-lain
Rp13.353.365.028,00

B.1.5 Pendapatan Lain-lain

Berdasarkan DIPA TA 2023, BPS menetapkan estimasi PNBP yang akan diperoleh selama TA 2023 berupa pendapatan lain-lain sebesar Rp2.344.211.000,00. Realisasi atas PNBP yang berasal dari pendapatan lain-lain selama TA 2023 adalah sebesar Rp13.353.365.028,00 atau 569,63 persen.

Pendapatan Lain-lain adalah pendapatan yang terdiri dari penerimaan kembali belanja pegawai tahun anggaran yang lalu (TAYL), penerimaan kembali belanja barang TAYL, penerimaan kembali belanja modal TAYL, pendapatan setoran dari sisa utang non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pensiunan PNS, Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji dan pendapatan anggaran lain-lain. Penerimaan pendapatan berupa setoran dari sisa utang non Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) pensiunan PNS merupakan penerimaan setoran atas kelebihan pembayaran belanja pegawai berupa dana pensiun PNS yang dipungut dan disetor ke Kas Negara oleh PT TASPEN (Persero) dengan menggunakan kode satker Sekretariat Utama BPS. Adapun rincian realisasi pendapatan lain-lain adalah sebagai berikut.

Akun	Uraian	Estimasi (Rp)	Realisasi (Rp)	%
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai TAYL	0	879.140.048	0,00
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang TAYL	0	1.499.695.745	0,00
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal TAYL	0	10.872.796.902	0,00
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	0	63.019.741	0,00
425991	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka	0	2.686.492	0,00

Gaji

425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	2.344.211.000	36.026.100	1,54
Jumlah		2.344.211.000	13.353.365.028	569,63

Realisasi Pendapatan Lain-Lain per Wilayah/Satker dirinci sebagai berikut.

No.	Wilayah/Satker	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu (Rp)	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran yang Lalu (Rp)	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran yang Lalu (Rp)	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang NonTP/TGR Pensiunan PNS (Rp)	Penerimaan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji (Rp)	Pendapatan Anggaran Lain-lain (Rp)
1	SETTAMA	96.544.271	990.963.023	491.539.322	63.019.741	0	35.398.800
2	PUSDIKLAT BPS	560.900	7.732.600	0	0	0	0
3	POLSTAT STIS	0	44.300.000	0	0	0	0
4	DKI JAKARTA	1.212.576	537.500	0	0	0	0
5	JAWA BARAT	68.465.962	17.040.048	0	0	0	0
6	JAWA TENGAH	19.769.983	28.195.000	71.081.083	0	0	0
7	DI YOGYAKARTA	4.034.806	0	0	0	0	0
8	JAWA TIMUR	20.396.944	109.625.140	0	0	0	3.080
9	ACEH	10.242.284	94.375.759	0	0	0	19.400
10	SUMATERA UTARA	32.332.737	53.524.126	32.274.669	0	0	0
11	SUMATERA BARAT	7.590.749	6.543.565	0	0	0	0
12	RIAU	71.102	0	0	0	0	0
13	JAMBI	0	1.455.410	0	0	0	0
14	SUMATERA SELATAN	5.631.372	6.293.090	23.028.965	0	0	0
15	LAMPUNG	26.154.790	160.000	0	0	0	0
16	KALIMANTAN BARAT	2.392.359	14.302.000	0	0	0	0
17	KALIMANTAN TENGAH	29.596.200	956.000	0	0	0	720
18	KALIMANTAN SELATAN	45.443.032	3.900.327	30.071.602	0	0	0
19	KALIMANTAN TIMUR	0	0	0	0	0	29.996
20	SULAWESI UTARA	3.057.972	11.004.250	0	0	0	0
21	SULAWESI TENGAH	32.400.000	0	0	0	0	0
22	SULAWESI SELATAN	27.555.417	0	42.500.000	0	0	0
23	SULAWESI TENGGARA	13.990.822	0	0	0	0	0
24	MALUKU	174.961.496	1.534.000	0	0	0	9.611
25	BALI	21.600.041	0	0	0	0	0
26	NUSA TENGGARA BARAT	28.616.042	5.340.000	0	0	0	0
27	NUSA TENGGARA TIMUR	118.861.037	950.000	0	0	0	0
28	PAPUA	35.697.668	34.218.639	0	0	0	555.162
29	BENGKULU	3.320.000	6.072.500	20.884.000	0	0	0
30	MALUKU UTARA	12.072.634	16.640.268	5.000.000	0	2.686.492	0
31	BANTEN	5.548.376	0	0	0	0	331
32	KEP. BANGKA BELITUNG	12.416.200	0	0	0	0	0
33	GORONTALO	246	0	0	0	0	0
34	KEPULAUAN RIAU	15.676.380	0	0	0	0	0
35	PAPUA BARAT	2.849.600	42.497.500	0	0	0	9.000
36	SULAWESI BARAT	76.000	1.400.000	0	0	0	0
37	KALIMANTAN UTARA	50	135.000	10.156.417.261	0	0	0
Jumlah		879.140.048	1.499.695.745	10.872.796.902	63.019.741	2.686.492	36.026.100

Realisasi Belanja
Rp 7.504.604.795.902,00

B.2 BELANJA

Realisasi belanja pada Badan Pusat Statistik selama TA 2023 adalah sebesar Rp7.504.604.795.902,00 atau 97,00 persen dari pagu yang sebesar Rp7.737.050.832.000,00. Pagu dan realisasi belanja pada Badan Pusat Statistik pada TA 2023 dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu kelompok program, sumber dana, dan jenis belanja. Masing-masing kelompok belanja akan dijelaskan sebagai berikut.

Rincian pagu dan realisasi belanja selama TA 2023 menurut kelompok program tersaji sebagai berikut:

Tabel 15
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Program

Kode	Program	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
054.01.WA	Program Dukungan Manajemen	3.190.541.238.000	3.113.574.509.223	97,59
054.01.GG	Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	4.546.509.594.000	4.391.030.286.679	96,58
Jumlah		7.737.050.832.000	7.504.604.795.902	97,00

Pagu belanja menurut kelompok program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.190.541.238.000,00 atau 41,24 persen dari total pagu belanja yang sebesar Rp7.737.050.832.000,00. Pagu ini digunakan untuk menampung kebutuhan biaya gaji dan tunjangan pegawai termasuk tunjangan kinerja pegawai dan sudah di alokasi ke seluruh satker, operasional perkantoran sebanyak 517 satker, penyelenggaraan kegiatan pendidikan kedinasan di Politeknik Statistika STIS (Polstat STIS), penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di Pusdiklat BPS, dan kegiatan non operasional lainnya.

Pagu menurut kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp4.546.509.594.000,00 atau 58,76 persen dari total pagu. Pagu ini digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BPS yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data.

Realisasi belanja menurut kelompok program selama TA 2023 adalah sebagai berikut: program Dukungan Manajemen sebesar Rp3.113.574.509.223,00 atau 97,59 persen dari pagu belanja dan realisasi Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp4.391.030.286.679,00 atau 96,58 persen dari pagu belanja.

Realisasi belanja menurut kelompok program selama TA 2023 secara keseluruhan adalah Rp7.504.604.795.902,00. Dari seluruh nilai realisasi belanja menurut kelompok program, persentase realisasi belanja kelompok program Dukungan Manajemen adalah 41,49 persen dan realisasi belanja kelompok program PPIS adalah 58,51 persen.

Pagu dan realisasi belanja selama TA 2023 selain dikelompokkan berdasarkan program kegiatan, juga dikelompokkan berdasarkan sumber dana. Pagu dan realisasi belanja berdasarkan kelompok sumber dana terdiri dari pagu dan realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni (RM), sumber dana PNBPN, dan sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN). Pagu dan realisasi belanja masing-masing sumber dana disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 16
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana

Kode	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Rupiah Murni (RM)	7.408.963.367.000	7.195.776.092.221	97,12
04	PNBP	325.486.367.000	306.237.800.081	94,09
11	Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN)	2.601.098.000	2.590.903.600	99,61
Jumlah		7.737.050.832.000	7.504.604.795.902	97,00

Berdasarkan tabel di atas dapat dijelaskan bahwa belanja dengan sumber dana Rupiah Murni memiliki pagu sebesar Rp7.408.963.367.000,00 dan realisasi sebesar Rp7.195.776.092.221,00 atau 97,12 persen dari pagu. Rincian kegiatan yang dibiayai dengan sumber dana berdasarkan besaran pagu dan realisasi belanja sebagai berikut.

Tabel 17
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana

Kode	Sumber Dana	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
01	Rupiah Murni			
2881	Penyusunan, Pengembangan, dan Evaluasi Program dan Anggaran	14.549.989.000	12.570.514.898	86,40
2882	Pelayanan Publik, Hubungan Masyarakat dan Hukum	16.271.309.000	8.700.587.427	53,47
2883	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Kepegawaian	12.302.331.000	11.393.962.635	92,62
2884	Pengelolaan dan Pengembangan Administrasi Keuangan	258.384.205.000	247.208.961.523	95,67
2885	Dukungan Manajemen BPS Lainnya	126.258.183.000	116.274.230.529	92,09
2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	2.640.044.012.000	2.596.613.237.158	98,35
2887	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	68.696.373.000	68.408.486.188	99,58
2888	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	41.641.934.000	40.435.857.560	97,10
2896	Pengembangan dan Analisis Statistik	5.716.175.000	5.073.302.582	88,75
2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	22.782.399.000	21.299.808.201	93,49
2898	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	69.925.507.000	64.148.054.159	91,74
2899	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	39.810.820.000	37.038.908.834	93,04
2900	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	8.905.215.000	8.407.598.122	94,41
2901	Pengembangan Sistem Informasi Statistik	34.139.317.000	33.246.368.839	97,38
2902	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	11.997.177.000	10.273.749.834	85,63
2903	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	113.446.362.000	105.563.778.612	93,05
2904	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan	48.576.840.000	45.050.677.239	92,74

	Penggalan, Energi, dan Konstruksi			
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	146.337.226.000	139.569.063.176	95,37
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	218.567.656.000	208.874.050.000	95,56
2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	805.408.739.000	781.499.468.586	97,03
2908	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	66.600.860.000	63.218.356.154	94,92
2909	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	5.151.843.000	4.678.615.381	90,81
2910	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	2.630.333.879.000	2.563.137.721.354	97,45
4203	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat I	1.044.327.000	1.032.335.108	98,85
4204	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat II	1.009.657.000	1.002.875.159	99,33
4205	Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Inspektorat III	1.061.032.000	1.055.522.963	99,48
Sub Jumlah		7.408.963.367.000	7.195.776.092.221	97,12
04	PNBP			
2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	173.751.000	0	0,00
2887	Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Negara (BPS)	3.057.860.000	3.038.768.161	99,38
2888	Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Statistik (STIS)	6.046.275.000	5.839.169.914	96,57
2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	315.722.325.000	296.896.278.222	94,04
2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	486.156.000	463.583.784	95,36
Sub Jumlah		325.486.367.000	306.237.800.081	94,09
11	Hibah Langsung Luar Negeri			
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	1.185.728.000	1.178.260.088	99,37
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat	1.415.370.000	1.412.643.512	99,81
Sub Jumlah		2.601.098.000	2.590.903.600	99,61
Jumlah		7.737.050.832.000	7.504.604.795.902	97,00

Pagu belanja kelompok sumber dana selama TA 2023 adalah sebesar Rp7.737.050.832.000,00. Persentase pagu belanja kelompok sumber dana Rupiah Murni dari keseluruhan nilai pagu adalah 95,76 persen atau sebesar Rp7.408.963.367.000,00. Persentase pagu belanja kelompok sumber dana PNBPN adalah 4,21 persen dari keseluruhan pagu atau sebesar Rp325.486.367.000,00. Persentase pagu belanja kelompok sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri adalah 0,03 persen dari keseluruhan pagu atau sebesar Rp2.601.098.000,00.

Realisasi belanja kelompok sumber dana selama TA 2023 adalah sebesar Rp7.504.604.795.902,00. Pada realisasi belanja kelompok sumber dana, persentase realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni adalah 95,88 persen atau sebesar Rp7.195.776.092.221,00 dari keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana. Realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni mendominasi realisasi belanja kelompok sumber dana. Persentase realisasi belanja sumber dana PNPB memiliki porsi 4,08 persen atau sebesar Rp306.237.800.081,00 keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana. Sedangkan persentase realisasi belanja sumber dana Hibah Langsung Luar Negeri memiliki porsi 0,03 persen atau sebesar Rp2.590.903.600,00 dari keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana.

Perbandingan realisasi belanja kelompok sumber dana sampai dengan periode TA 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 18
Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana
Periode TA 2023 dan 2022

Kode	Sumber Dana	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
01	Rupiah Murni (RM)	7.195.776.092.221	8.294.796.622.648	(1.099.020.530.427)	(13,25)
04	PNBP	306.237.800.081	13.628.472.552	292.609.327.529	2147,04
11	Hibah Langsung Luar Negeri	2.590.903.600	2.806.550.055	(215.646.455)	(7,68)
Jumlah		7.504.604.795.902	8.311.231.645.255	(806.626.849.353)	(9,71)

Secara keseluruhan realisasi belanja kelompok sumber dana mengalami penurunan sebesar 9,71 persen dibandingkan dengan periode yang sama pada TA 2022. Penurunan terjadi pada realisasi belanja sumber dana Rupiah Murni sebesar Rp1.099.020.530.427,00 atau sebesar 13,25 persen, sedangkan realisasi belanja sumber dana PNPB kenaikan sebesar Rp292.609.327.529,00 atau sebesar 2.147,04 persen dan realisasi belanja hibah langsung luar negeri mengalami penurunan sebesar Rp215.646.455,00 atau sebesar 7,68 persen.

Pagu dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik selama TA 2023 selain dikelompokkan menurut sumber dana, juga dikelompokkan menurut jenis belanja. Pengelompokan pagu dan realisasi belanja menurut jenis belanja ini terdiri dari Belanja Pegawai dengan kode jenis belanja 51, Belanja Barang dengan kode jenis belanja 52, dan Belanja Modal dengan kode jenis belanja 53.

Pagu dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik menurut kelompok jenis belanja periode TA 2023 disajikan berikut ini.

Tabel 19
Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja

Kode Jenis Belanja	Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Belanja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
51	Belanja Pegawai	2.360.432.871.000	2.319.687.669.213	98,27
52	Belanja Barang	5.059.762.487.000	4.875.800.083.713	96,36
53	Belanja Modal	316.855.474.000	309.117.042.976	97,56

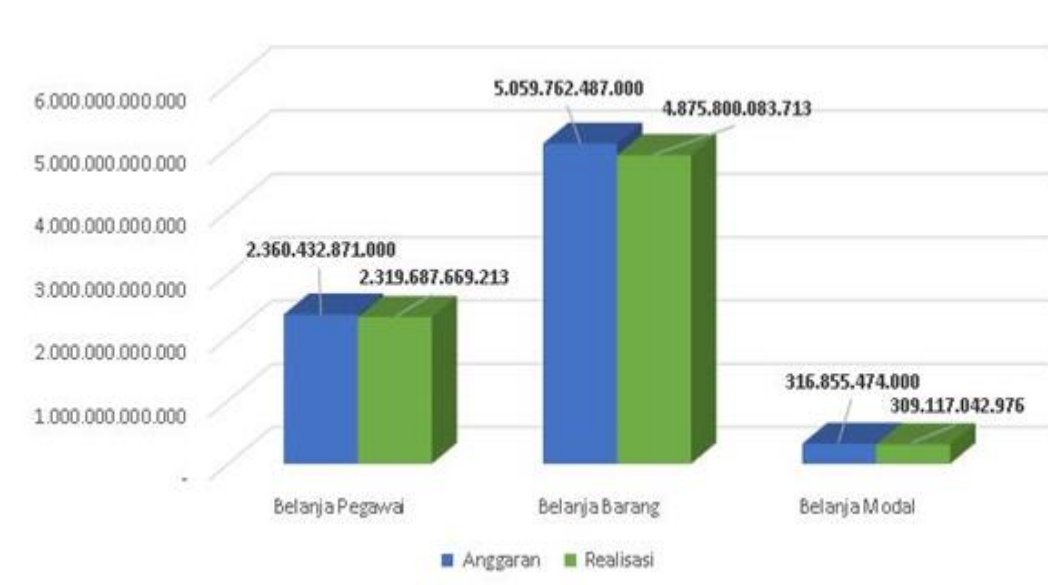
Jumlah	7.737.050.832.000	7.504.604.795.902	97,00
--------	-------------------	-------------------	-------

Pagu dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik selama TA 2023 menurut kelompok jenis belanja, masing-masing sebesar Rp7.737.050.832.000,00 dan Rp7.504.604.795.902,00. Komposisi pagu dan realisasi belanja yang terbagi menjadi tiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dari keseluruhan nilai pagu dan realisasi adalah sebagai berikut:

1. Komposisi pagu Belanja Pegawai dari keseluruhan nilai pagu per jenis belanja adalah 30,51 persen atau senilai Rp2.360.432.871.000,00. Komposisi realisasi Belanja Pegawai netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 30,91 persen atau senilai Rp2.319.687.669.213,00. Sedangkan persentase realisasi Belanja Pegawai jika dibandingkan dengan pagu Belanja Pegawai adalah 98,27 persen.
2. Komposisi pagu Belanja Barang dari keseluruhan nilai pagu per jenis belanja adalah 65,40 persen atau senilai Rp5.059.762.487.000,00. Komposisi realisasi Belanja Barang netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 64,97 persen atau senilai Rp4.875.800.083.713,00. Sedangkan persentase realisasi Belanja Barang jika dibandingkan dengan pagu Belanja Barang adalah 96,36 persen.
3. Komposisi pagu Belanja Modal dari keseluruhan nilai pagu per jenis belanja adalah 4,10 persen atau senilai Rp316.855.474.000,00. Komposisi realisasi Belanja Modal netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 4,12 persen atau senilai Rp309.117.042.976,00. Sedangkan persentase realisasi Belanja Modal jika dibandingkan dengan pagu Belanja Modal adalah 97,56 persen.

Persentase pagu belanja barang merupakan yang terbesar dari keseluruhan nilai pagu menurut jenis belanja dibandingkan dengan pagu belanja pegawai dan belanja modal selama TA 2023.

Komposisi pagu dan realisasi belanja menurut jenis belanja selama TA 2023 dapat dilihat dalam grafik berikut:



Grafik 3. Komposisi Pagu dan Realisasi Belanja Menurut Jenis Belanja Periode TA 2023

Realisasi belanja menurut jenis belanja selama TA 2023 dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2022 seperti tersaji sebagai berikut.

Tabel 20
Perbandingan Realisasi Belanja
Periode TA 2023 dan 2022

Kode	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
51	Belanja Pegawai	2.319.687.669.213	2.282.380.174.486	37.307.494.727	1,63
52	Belanja Barang	4.875.800.083.713	5.860.512.565.577	(984.712.481.864)	(16,80)
53	Belanja Modal	309.117.042.976	168.338.905.192	140.778.137.784	83,63
Jumlah		7.504.604.795.902	8.311.231.645.255	(806.626.849.353)	(9,71)

Secara keseluruhan realisasi belanja berdasarkan jenis belanja selama TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp806.626.849.353,00 atau sebesar 9,71 persen dibandingkan dengan periode yang sama di tahun 2022.

Realisasi Belanja Pegawai selama periode TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp37.307.494.727,00 atau sebesar 1,63 persen dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2022. Kenaikan realisasi Belanja Pegawai pada periode TA 2023 terjadi pada Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS yang terdiri dari: Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS, Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS, dan Belanja Tunjangan Profesi Dosen mengalami kenaikan pada periode TA 2023 dibandingkan periode yang sama di TA 2022. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK, Realisasi Belanja Lembur dan Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito juga mengalami kenaikan pada periode TA 2023 dibandingkan dengan periode TA 2022.

Realisasi Belanja Barang selama periode TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp984.712.481.864,00 sebesar 16,80 persen dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2022. Penurunan tersebut terdapat pada realisasi belanja barang operasional, belanja barang non operasional, belanja barang persediaan, dan belanja perjalanan dalam negeri. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan skala dan jumlah kegiatan besar pada TA 2023 dibandingkan dengan TA 2022. Pada TA 2022 terdapat pelaksanaan kegiatan dengan skala besar dan membutuhkan biaya yang besar yaitu Kegiatan Pendataan Awal Regsosek, Pelaksanaan Sensus Sampel Long Form SP2020, serta Pemutakhiran Kerangka Geospasial dan Muatan Wilkerstat ST2023.

Realisasi Belanja Modal selama periode TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp140.778.137.784,00 atau sebesar 83,63 persen dibandingkan dengan periode yang sama di TA 2022. Kenaikan tersebut terdapat pada realisasi belanja modal tanah, belanja modal peralatan dan mesin, belanja modal gedung dan bangunan, dan belanja modal lainnya.

*Belanja Pegawai
Rp2.319.687.669.213,00*

B.2.1 Belanja Pegawai

Belanja Pegawai adalah belanja kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil/Aparatur Sipil Negara (PNS/ASN), pensiunan, dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS/ASN sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan dalam rangka mendukung tugas dan fungsi unit organisasi pemerintah.

Realisasi Belanja Pegawai selama periode TA 2023 adalah sebesar Rp2.319.687.669.213,00 atau 98,27 persen dari pagu yang sebesar Rp2.360.432.871.000,00. Nilai realisasi belanja ini adalah nilai belanja neto yaitu nilai bruto Belanja Pegawai yang nilainya sebesar Rp2.321.278.419.727,00 dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.590.750.514,00.

Realisasi Belanja Pegawai Badan Pusat Statistik selama periode TA 2023 meliputi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK, Belanja Uang Lembur, dan Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito. Realisasi Belanja Pegawai selama periode TA 2023 seluruhnya bersumber dari Rupiah Murni (RM).

*Belanja Gaji dan
Tunjangan PNS
Rp1.177.452.307.799,00*

B.2.1.1 Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS (5111) untuk periode TA 2023 adalah Rp1.177.452.307.799,00 atau sebesar 97,79 persen dari pagu anggaran belanja gaji dan tunjangan PNS senilai Rp1.204.034.118.000,00. Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ini terdiri dari belanja gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji selain tunjangan kinerja.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS selama periode TA 2023 tersaji sebagai berikut.

Tabel 21
Pagu dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS

Kode Akun	Uraian	Pagu(Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			
			Bruto	Pengembalian Belanja	Netto	% Netto
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	817.433.000.000	806.002.400.830	146.577.914	805.855.822.916	98,58
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.933.000	13.299.679	140.310	13.159.369	77,71
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	51.508.456.000	50.302.731.102	17.410.447	50.285.320.655	97,63
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15.910.114.000	15.385.440.116	2.400.205	15.383.039.911	96,69
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	16.347.137.000	15.711.890.000	101.823.335	15.610.066.665	95,49
511124	Belanja Tun. Fungsional PNS	114.538.913.000	112.694.441.170	261.264.611	112.433.176.559	98,16
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	3.312.983.000	2.982.950.940	119.540	2.982.831.400	90,03
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	44.322.800.000	43.468.925.790	5.721.240	43.463.204.550	98,06
511129	Belanja Uang Makan PNS	119.858.484.000	112.312.856.286	28.854.250	112.284.002.036	93,68
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	479.492.000	439.725.000	400.000	439.325.000	91,62
511138	Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	4.195.952.000	4.109.870.000	5.350.000	4.104.520.000	97,82
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	13.958.286.000	13.283.870.050	816.742.728	12.467.127.322	89,32
511153	Belanja Tunj. Profesi Dosen	2.151.568.000	2.130.711.416	0	2.130.711.416	99,03
Jumlah		1.204.034.118.000	1.178.839.112.379	1.386.804.580	1.177.452.307.799	97,79

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS secara netto selama periode TA 2023 adalah Rp1.177.452.307.799,00. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS secara netto berasal dari nilai bruto Belanja Gaji dan Tunjangan PNS yaitu Rp1.178.839.112.379,00 yang dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.386.804.580,00. Realisasi belanja pegawai periode TA 2023 digunakan untuk pembayaran gaji pokok PNS, pembayaran pembulatan gaji PNS, pembayaran tunjangan suami/istri PNS, pembayaran tunjangan anak PNS, pembayaran tunjangan struktural PNS, pembayaran tunjangan fungsional PNS, pembayaran tunjangan PPh PNS, pembayaran tunjangan beras PNS, pembayaran uang makan PNS, pembayaran tunjangan daerah terpencil/sangat terpencil PNS, pembayaran tunjangan khusus Papua PNS, pembayaran tunjangan umum PNS, dan pembayaran tunjangan profesi dosen. Nilai pengembalian belanja ini terdiri dari pengembalian Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunjangan Suami/Istri PNS, Belanja Tunjangan Anak PNS, Belanja Tunjangan Struktural PNS, Belanja Tunjangan Fungsional PNS, Belanja Tunjangan PPh PNS, Belanja Tunjangan Beras PNS, Belanja Uang Makan PNS, Belanja Tunjangan Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS, Belanja Tunjangan Khusus Papua PNS, dan Belanja Tunjangan Umum PNS.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 22
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS
TA 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511111	Belanja Gaji Pokok PNS	805.855.822.916	781.356.515.493	24.499.307.423	3,14
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	13.159.369	12.134.544	1.024.825	8,45
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	50.285.320.655	49.796.594.973	488.725.682	0,98
511122	Belanja Tunj. Anak PNS	15.383.039.911	15.334.619.918	48.419.993	0,32
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	15.610.066.665	18.024.444.933	(2.414.378.268)	(13,40)
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	112.433.176.559	129.954.443.942	(17.521.267.383)	(13,48)
511125	Belanja Tunj. PPh PNS	2.982.831.400	4.958.820.833	(1.975.989.433)	(39,85)
511126	Belanja Tunj. Beras PNS	43.463.204.550	43.159.393.014	303.811.536	0,70
511129	Belanja Uang Makan PNS	112.284.002.036	117.609.269.850	(5.325.267.814)	(4,53)
511135	Belanja Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	439.325.000	409.775.000	29.550.000	7,21
511138	Belanja Tunj. Khusus Papua PNS	4.104.520.000	3.868.800.000	235.720.000	6,09
511151	Belanja Tunj. Umum PNS	12.467.127.322	15.059.191.137	(2.592.063.815)	(17,21)
511153	Belanja Tunj. Profesi Dosen	2.130.711.416	1.944.340.972	186.370.444	9,59
Jumlah		1.177.452.307.799	1.181.488.344.609	(4.036.036.810)	(0,34)

Realisasi belanja pegawai secara neto periode TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp4.036.036.810,00 atau sebesar 0,34 persen dibandingkan realisasi belanja pegawai pada periode yang sama di TA 2022. Kenaikan dan penurunan realisasi belanja pegawai pada periode TA 2023 dibandingkan dengan periode yang sama TA 2022 antara lain dijelaskan sebagai berikut:

1. Realisasi Belanja Gaji Pokok PNS mengalami kenaikan sebesar Rp24.499.307.423,00 atau sebesar 3,14 persen. Realisasi Belanja Gaji Pokok PNS sampai dengan periode TA 2023 digunakan untuk pembayaran gaji induk pegawai, gaji susulan, gaji ke-13 dan ke-14 TA 2023, kekurangan gaji pokok, kenaikan pangkat PNS, pengangkatan CPNS menjadi PNS, Tunjangan Hari Raya (THR) TA 2023, dan gaji terusan.
2. Realisasi Belanja Tunjangan Struktural PNS selama periode TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp2.414.378.268,00 atau sebesar 13,40 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu periode TA 2022. Penurunan ini disebabkan adanya kebijakan Pemerintah Pusat dalam penyerderhanaan birokrasi struktur jabatan PNS. Dalam hal ini, BPS telah melakukan penyetaraan jabatan struktural eselon 3 dan 4 menjadi Jabatan Fungsional Tertentu (JFT).
3. Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional mengalami penurunan sebesar Rp17.521.267.383,00 atau sebesar 13,48 persen. Realisasi Belanja Tunjangan Fungsional sampai dengan periode TA 2023 digunakan untuk pembayaran tunjangan fungsional dan kekurangan tunjangan fungsional. Penurunan ini diantaranya disebabkan oleh adanya pegawai dengan jabatan fungsional tertentu yang menjalankan tugas belajar, menduduki jabatan struktural, dan/atau berpindah ke jabatan fungsional tertentu lainnya.

Belanja Gaji dan
Tunjangan PPPK
Rp609.560.172,00

B.2.1.2 Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK (5116) untuk periode TA 2023 adalah Rp609.560.172,00 atau sebesar 90,19 persen dari pagu anggaran belanja gaji dan tunjangan PPPK senilai Rp675.841.000,00. Kelompok Belanja Gaji dan Tunjangan ini terdiri dari belanja gaji pokok beserta tunjangan-tunjangan yang melekat pada gaji selain tunjangan kinerja.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK selama periode TA 2023 tersaji sebagai berikut.

Tabel 23
Pagu dan Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK
TA 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	438.809.000	415.042.600	0	415.042.600	94,58
511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	314.000	9.060	0	9.060	2,89
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	22.819.000	17.817.560	0	17.817.560	78,08
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	5.619.000	3.476.782	0	3.476.782	61,88
511624	Belanja Tunj. Fungsional PPPK	73.310.000	67.560.000	0	67.560.000	92,16
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	23.053.000	19.263.720	0	19.263.720	83,56
511628	Belanja Uang Makan PPPK	111.917.000	86.988.000	597.550	86.390.450	77,19
Jumlah		675.841.000	610.157.722	597.550	609.560.172	90,19

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK secara netto selama periode TA 2023 adalah Rp609.560.172,00. Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK secara netto berasal dari nilai bruto Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK yaitu Rp610.157.722,00 yang dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp597.550,00. Realisasi belanja gaji dan tunjangan PPPK periode TA 2023 digunakan untuk pembayaran gaji pokok PPPK, pembayaran pembulatan gaji PPPK, pembayaran tunjangan suami/istri PPPK, pembayaran tunjangan anak PPPK, pembayaran tunjangan fungsional PPPK, pembayaran tunjangan beras PPPK, dan pembayaran uang makan PPPK.

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK periode TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 24
Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK
TA 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
511611	Belanja Gaji Pokok PPPK	415.042.600	0	415.042.600	100,00

511619	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	9.060	0	9.060	100,00
511621	Belanja Tunj. Suami/Istri PPPK	17.817.560	0	17.817.560	100,00
511622	Belanja Tunj. Anak PPPK	3.476.782	0	3.476.782	100,00
511624	Belanja Tun. Fungsional PPPK	67.560.000	0	67.560.000	100,00
511625	Belanja Tunj. Beras PPPK	19.263.720	0	19.263.720	100,00
511628	Belanja Uang Makan PPPK	86.390.450	0	86.390.450	100,00
Jumlah		609.560.172	0	609.560.172	100,00

Realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK selama periode TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp609.560.172,00 atau sebesar 100,00 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2022. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya realisasi belanja gaji dan tunjangan PPPK pada TA 2022.

Belanja Uang Lembur
Rp35.166.936.817,00

B.2.1.3 Belanja Uang Lembur

Realisasi Belanja Uang Lembur (5122) untuk periode TA 2023 adalah Rp35.166.936.817,00 atau 91,13 persen dari pagu anggaran belanja uang lembur senilai Rp38.591.325.000,00. Belanja Uang Lembur merupakan komponen belanja pegawai yang digunakan untuk pembayaran uang lembur. Uang lembur adalah segala pekerjaan yang harus dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada waktu-waktu tertentu di luar waktu kerja sebagaimana telah ditetapkan bagi tiap-tiap instansi dan kantor pemerintah. Uang lembur diberikan dalam rangka meningkatkan gairah kerja dalam menyelesaikan tugas-tugas dan pekerjaan di luar jam kerja.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Uang Lembur selama TA 2023 tersaji sebagai berikut.

Tabel 25
Pagu dan Realisasi Belanja Uang Lembur

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
512211	Belanja Uang Lembur	38.575.825.000	35.177.827.917	12.585.100	35.165.242.817	91,16
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	15.500.000	1.694.000	0	1.694.000	10,93
Jumlah		38.591.325.000	35.179.521.917	12.585.100	35.166.936.817	91,13

Realisasi Belanja Uang Lembur netto sebesar Rp35.166.936.817,00 berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Uang Lembur sebesar Rp35.179.521.917,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp12.585.100,00. Perbandingan Realisasi Belanja Uang Lembur periode TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 26
Realisasi Belanja Uang Lembur TA 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512211	Belanja Uang Lembur	35.165.242.817	23.679.597.400	11.485.645.417	48,50
512212	Belanja Uang Lembur PPPK	1.694.000	0	1.694.000	100,00
Jumlah		35.166.936.817	23.679.597.400	11.487.339.417	48,51

Realisasi Belanja Uang Lembur selama periode TA 2023 sebesar Rp35.166.936.817,00 sedangkan realisasi Belanja Uang Lembur untuk periode yang sama pada TA 2022 sebesar Rp23.679.597.400,00. Realisasi Belanja Uang Lembur selama periode TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp11.487.339.417,00 atau sebesar 48,51 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu periode TA 2022. Kenaikan ini disebabkan sistem kerja yang sudah kembali normal atau penerapan *Work From Office* (WFO) secara 100 persen sehingga kerja lembur diberlakukan secara normal kembali, adanya beberapa kegiatan pada tahun 2023 yang membutuhkan tambahan jam kerja/lembur diantaranya lembur untuk kegiatan Pengolahan Regsosek, Susenas, dan beberapa kegiatan lainnya, serta adanya belanja lembur untuk PPPK yang sebelumnya tidak tersedia pada tahun 2022.

Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito
Rp1.106.458.864.425,00

B.2.1.4 Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito (5124) selama periode TA 2023 adalah sebesar Rp1.106.458.864.425,00 atau sebesar 99,04 persen dari pagu yang senilai Rp1.117.131.587.000,00. Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito terdiri dari Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan) yang berupa belanja tunjangan kinerja dan Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK. Tunjangan kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang besarnya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil. Pengertian ini termuat dalam Lampiran Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penghitungan Tunjangan Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito selama TA 2023 tersaji sebagai berikut.

Tabel 27
Pagu dan Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.116.593.361.000	1.106.192.421.722	190.763.284	1.106.001.658.438	99,05
512414	Belanja Pegawai Tunjangan	538.226.000	457.205.987	0	457.205.987	84,95

	Khusus/Kegiatan/ Kinerja PPPK					
Jumlah		1.117.131.587.000	1.106.649.627.709	190.763.284	1.106.458.864.425	99,04

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito secara netto selama periode TA 2023 adalah Rp1.106.458.864.425,00 atau sebesar 99,04 persen dari pagu anggaran. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito sebesar Rp1.106.649.627.709,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp190.763.284,00.

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 28
Realisasi Belanja Tunjangan Khusus & Belanja Pegawai Transito
TA 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan)	1.106.001.658.438	1.077.212.232.477	28.789.425.961	2,67
512414	Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	457.205.987	0	457.205.987	100,00
Jumlah		1.106.458.864.425	1.077.212.232.477	29.246.631.948	2,72

Realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito selama periode TA 2023 sebesar Rp1.106.458.864.425,00 sedangkan realisasi Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito selama periode TA 2022 sebesar Rp1.077.212.232.477,00. Realisasi Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito selama periode TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp29.246.631.948,00 atau sebesar 2,72 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2022. Kenaikan ini disebabkan karena adanya perubahan kebijakan dalam pembayaran gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya TA 2023 yaitu dengan diberikan tambahan Tunjangan Kinerja sebesar 50 persen, sedangkan pada TA 2022 pembayaran gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya TA 2022 tidak diberikan tambahan berupa Tunjangan Kinerja.

Belanja Barang
Rp4.875.800.083.713,00

B.2.2 Belanja Barang

Belanja Barang adalah pengeluaran untuk pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai untuk memproduksi barang dan/atau jasa yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan serta pengadaan barang yang dimaksudkan untuk diserahkan atau dijual kepada masyarakat di luar kriteria belanja bantuan sosial serta belanja perjalanan. Realisasi Belanja Barang selama TA 2023 adalah sebesar Rp4.875.800.083.713,00 atau 96,36 persen dari pagu yang sebesar Rp5.059.762.487.000,00. Nilai realisasi belanja ini adalah nilai belanja neto yaitu nilai bruto Belanja Barang yang nilainya sebesar Rp4.878.137.909.694,00 dikurangi pengembalian belanja sebesar Rp2.337.825.981,00.

Realisasi Belanja Barang Badan Pusat Statistik TA 2023 meliputi Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Barang Persediaan, Belanja Jasa, Belanja Pemeliharaan, Belanja Perjalanan Dalam Negeri, dan Belanja Perjalanan Luar

Negeri. Realisasi Belanja Barang selama TA 2023 bersumber dari sumber dana Rupiah Murni, PNB, dan Hibah Langsung Luar Negeri.

Belanja Barang
Operasional
Rp209.950.209.566,00

B.2.2.1 Belanja Barang Operasional

Belanja Barang Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai yang dipergunakan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat internal. Realisasi Belanja Barang Operasional (5211) untuk TA 2023 adalah Rp209.950.209.566,00 atau 98,22 persen dari pagu yang senilai Rp213.758.145.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Barang Operasional selama TA 2023 tersaji sebagai berikut.

Tabel 29
Pagu dan Realisasi Belanja Barang Operasional

Kode Akun	Uraian	Pagu	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	150.517.914.000	148.172.073.162	81.122.639	148.090.950.523	98,39
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	0	0	0	0,00
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	10.256.000	8.510.600	0	8.510.600	82,98
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	751.647.000	682.531.034	5.856.200	676.674.834	90,03
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	59.039.649.000	57.879.349.550	17.268.700	57.862.080.850	98,01
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.380.897.000	3.263.792.558	3.629.000	3.260.163.558	96,43
521121	Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementrian Negara/ Lembaga	150.000	0	0	0	0,00
521131	Belanja Barang Operasional- Penanganan Pandemi Covid-19	57.632.000	51.829.201	0	51.829.201	89,93
Jumlah		213.758.145.000	210.058.086.105	107.876.539	209.950.209.566	98,22

Realisasi Belanja Barang Operasional secara neto selama TA 2023 adalah Rp209.950.209.566,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang Operasional sebesar Rp210.058.086.105,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp107.876.539,00. Pengembalian belanja terdiri atas pengembalian belanja keperluan perkantoran, pengembalian belanja pengiriman surat

dinas pos pusat, pengembalian belanja honor operasional satuan kerja, dan pengembalian belanja barang operasional lainnya.

Terdapat realisasi belanja barang operasional pada TA 2023 yang bukan merupakan akun belanja yang sesuai dengan kegiatan inti BPS yaitu Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh. Realisasi Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh selama TA 2023 adalah sebesar Rp8.510.600,00 dengan pagu sebesar Rp10.256.000,00 sehingga persentase realisasi belanja terhadap pagu adalah 85,98 persen. Realisasi belanja ini terdapat pada satker BPS Provinsi Jambi sebesar Rp8.334.600,00 dan BPS Kota Palangkaraya sebesar Rp176.000,00.

Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 30
Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	148.090.950.523	183.017.936.855	(34.926.986.332)	(19,08)
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	504.000	(504.000)	(100,00)
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8.510.600	22.136.702	(13.626.102)	(61,55)
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	676.674.834	3.171.058.079	(2.494.383.245)	(78,66)
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57.862.080.850	53.777.012.452	4.085.068.398	7,60
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.260.163.558	691.274.068	2.568.889.490	371,62
521121	Belanja Barang Operasional kepada BLU dalam Satu Kementerian	0	0	0	00,00
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	51.829.201	3.305.924.744	(3.254.095.543)	(98,43)
Jumlah		209.950.209.566	243.985.846.900	(34.035.637.334)	(13,95)

Realisasi Belanja Barang Operasional selama TA 2023 sebesar Rp209.950.209.566,00, sedangkan realisasi Belanja Barang Operasional selama TA 2022 sebesar Rp243.985.846.900,00. Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp34.035.637.334,00 atau sebesar 13,95 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2022. Penurunan ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan pada belanja keperluan perkantoran, penurunan pada belanja pengadaan bahan makanan, penurunan pada belanja penambah daya tahan tubuh, penurunan pada belanja pengiriman surat dinas pos surat, dan penurunan pada belanja barang operasional - penanganan pandemi Covid-19.

Realisasi Belanja Barang Operasional TA 2023 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PNBP, yang masing-masing nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 31
Realisasi Belanja Barang Operasional Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521111	Belanja Keperluan Perkantoran	148.090.950.523	0	0	148.090.950.523
521112	Belanja Pengadaan Bahan Makanan	0	0	0	0
521113	Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	8.510.600	0	0	8.510.600
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	676.674.834	0	0	676.674.834
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja	57.862.080.850	0	0	57.862.080.850
521119	Belanja Barang Operasional Lainnya	3.260.163.558	0	0	3.260.163.558
521131	Belanja Barang Operasional – Penanganan Pandemi Covid-19	51.829.201	0	0	51.829.201
Jumlah		209.950.209.566	0	0	209.950.209.566

Belanja Barang Non Operasional
Rp2.500.433.763.716,00

B.2.2.2 Belanja Barang Non Operasional

Belanja Barang Non Operasional merupakan pembelian barang dan/atau jasa yang habis pakai dikaitkan dengan strategi pencapaian target kinerja suatu satuan kerja dan umumnya pelayanan yang bersifat eksternal. Realisasi Belanja Barang Non Operasional (5212) untuk TA 2023 adalah Rp2.500.433.763.716,00 atau 98,84 persen dari pagu yang senilai Rp2.529.694.312.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Barang Non Operasional selama TA 2023 tersaji sebagai berikut.

Tabel 32
Pagu dan Realisasi Belanja Barang Non Operasional

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
521211	Belanja Bahan	197.949.706.000	187.978.216.478	24.342.700	187.953.873.778	94,95
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2.267.097.711.000	2.252.542.102.721	719.739.412	2.251.822.363.309	99,33
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	59.863.855.000	56.165.078.570	10.084.222	56.154.994.348	93,80
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	54.823.000	44.965.203	50.000	44.915.203	81,93
521252	Belanja Peralatandan Mesin - Ekstrakomptabel	4.436.950.000	4.191.417.782	0	4.191.417.782	94,47
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	291.262.000	266.199.296	0	266.199.296	91,40
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	5.000	0	0	0	0,00
Jumlah		2.529.694.312.000	2.501.187.980.050	754.216.334	2.500.433.763.716	98,84

Realisasi Belanja Barang Non Operasional secara neto selama TA 2023 adalah Rp2.500.433.763.716,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang Non Operasional sebesar Rp2.501.187.980.050,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp754.216.334,00. Pengembalian terdiri atas pengembalian belanja bahan, pengembalian belanja honor output kegiatan, pengembalian belanja barang non operasional lainnya dan pengembalian belanja barang non operasional-penanganan pandemi Covid-19.

Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 33
Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan	187.953.873.778	335.141.926.305	(147.188.052.527)	(43,92)
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2.251.822.363.309	3.001.098.440.930	(749.276.077.621)	(24,97)
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	56.154.994.348	60.171.286.062	(4.016.291.714)	(6,67)
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	44.915.203	32.966.967.533	(32.922.052.330)	(99,86)
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4.191.417.782	3.091.057.971	1.100.359.811	35,60
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	266.199.296	405.585.981	(139.386.685)	(34,37)
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0	0	0	0,00
Jumlah		2.500.433.763.716	3.432.875.264.782	(932.441.501.066)	(27,16)

Realisasi Belanja Barang Non Operasional selama TA 2023 sebesar Rp2.500.433.763.716,00, sedangkan realisasi Belanja Barang Non Operasional selama TA 2022 sebesar Rp3.432.875.264.782,00. Realisasi Belanja Barang Non Operasional TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp932.441.501.066,00 atau sebesar 27,16 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2022. Penurunan ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan pada belanja bahan, penurunan pada belanja honor output kegiatan, penurunan pada belanja barang non operasional lainnya, penurunan pada belanja barang non operasional-penanganan pandemi Covid-19, dan penurunan pada belanja gedung dan bangunan ekstrakomptabel.

Realisasi Belanja Barang Non Operasional periode TA 2023 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM), PNBPN, dan Hibah Langsung Luar Negeri yang masing-masing nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 34
Realisasi Belanja Barang Non Operasional Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521211	Belanja Bahan	187.953.873.778	6.247.700.602	0	194.201.574.380
521213	Belanja Honor Output Kegiatan	2.251.822.363.309	175.529.734.526	0	2.427.352.097.835
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya	56.154.994.348	2.263.374.255	2.590.903.600	61.009.272.203
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	44.915.203	0	0	44.915.203
521252	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	4.191.417.782	35.861.880	0	4.227.279.662
521253	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	266.199.296	0	0	266.199.296
521254	Belanja Aset Tetap Lainnya - Ekstrakomptabel	0	0	0	0
Jumlah		2.500.433.763.716	184.076.671.263	2.590.903.600	2.687.101.338.579

Belanja Barang
Persediaan
Rp101.206.680.957,00

B.2.2.3 Belanja Barang Persediaan

Belanja Barang Persediaan merupakan pengeluaran pemerintah untuk perolehan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Realisasi Belanja Barang Persediaan (5218) untuk TA 2023 adalah Rp101.206.680.957,00 atau 86,52 persen dari pagu yang senilai Rp116.977.575.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Barang Persediaan selama TA 2023 tersaji sebagai berikut.

Tabel 35
Pagu dan Realisasi Belanja Barang Persediaan

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	116.977.549.000	101.206.680.957	0	101.206.680.957	86,52
521831	Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga	26.000	0	0	0	0,00
521841	Belanja Barang	0	0	0	0	0,00
Jumlah		116.977.575.000	101.206.680.957	0	101.206.680.957	86,52

Realisasi Belanja Barang Persediaan secara netto selama TA 2023 adalah Rp101.206.680.957,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang

Persediaan sebesar Rp101.206.680.957,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp0,00. Tidak terdapat realisasi pengembalian belanja barang persediaan untuk TA 2023.

Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 36
Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	101.206.680.957	157.654.028.640	(56.4447.347.683)	(35,80)
521831	Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga	0	0	0	0,00
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	0	818.328.858	(818.328.858)	(100,00)
Jumlah		101.206.680.957	158.472.357.498	(57.265.676.541)	(36,14)

Realisasi Belanja Barang Persediaan selama TA 2023 sebesar Rp101.206.680.957,00, sedangkan realisasi Belanja Barang Persediaan selama TA 2022 sebesar Rp158.472.357.498,00. Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp57.265.676.541,00 atau sebesar 36,14 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2022. Penurunan ini disebabkan karena adanya penurunan pada belanja barang persediaan barang konsumsi dan penurunan belanja barang persediaan - penanganan pandemi Covid-19.

Realisasi Belanja Barang Persediaan TA 2023 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PNPB yang masing-masing disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 37
Realisasi Belanja Barang Persediaan Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521811	Belanja Barang PersediaanBarang Konsumsi	101.206.680.957	1.335.702.608	0	102.542.383.565
521831	Belanja Barang Persediaan untuk tujuan strategis/ berjaga-jaga	0	0	0	0
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0	0
Jumlah		101.206.680.957	1.335.702.608	0	102.542.383.565

Belanja Jasa
Rp228.350.857.578,00

B.2.2.4 Belanja Jasa

Realisasi Belanja Jasa (5221) untuk TA 2023 adalah Rp228.350.857.578,00 atau 95,08 persen dari pagu yang senilai Rp240.170285.000,00. Besaran pagu dan realisasi Belanja Jasa selama TA 2023 tersaji sebagai berikut.

Tabel 38
Pagu dan Realisasi Belanja Jasa

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
522111	Belanja Langganan Listrik	50.741.471.000	49.813.561.698	139.763	49.813.421.935	98,17
522112	Belanja Langganan Telepon	1.336.938.000	1.249.879.578	269.350	1.249.610.228	93,47
522113	Belanja Langganan Air	1.904.858.000	1.754.983.715	1.776.871	1.753.206.844	92,04
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	713.410.000	640.881.955	0	640.881.955	89,83
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0	0,00
522131	Belanja Jasa Konsultan	1.708.201.000	1.373.615.923	0	1.373.615.923	80,41
522141	Belanja Sewa	41.052.195.000	39.188.711.415	2.000.000	39.186.711.415	95,46
522151	Belanja Jasa Profesi	43.092.069.000	38.844.687.150	10.820.500	38.833.866.650	90,12
522191	Belanja Jasa Lainnya	99.561.436.000	95.444.101.722	174.094	95.443.927.628	95,86
522192	Belanja Jasa-Penanganan Pandemi Covid-19	59.707.000	55.615.000	0	55.615.000	93,15
Jumlah		240.170.285.000	228.366.038.156	15.180.578	228.350.857.578	95,08

Realisasi Belanja Jasa secara netto selama TA 2023 adalah Rp228.350.857.578,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Barang Persediaan sebesar Rp228.366.038.156,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp15.180.578,00.

Realisasi Belanja Jasa TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 39
Realisasi Belanja Jasa TA 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522111	Belanja Langganan Listrik	49.813.421.935	40.884.615.933	8.928.806.002	21,84
522112	Belanja Langganan Telepon	1.249.610.228	1.398.482.139	(148.871.911)	(10,65)
522113	Belanja Langganan Air	1.753.206.844	1.563.609.920	189.596.924	12,13
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	640.881.955	1.067.097.262	(426.215.307)	(39,94)
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	0	7.000.000	(7.000.000)	(100,00)
522131	Belanja Jasa Konsultan	1.373.615.923	588.911.176	784.704.747	133,25
522141	Belanja Sewa	39.186.711.415	39.219.735.512	(33.024.097)	(0,08)
522151	Belanja Jasa Profesi	38.833.866.650	9.508.793.500	29.325.073.150	308,40
522191	Belanja Jasa Lainnya	95.443.927.628	64.135.665.174	31.308.262.454	48,82
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	55.615.000	5.603.278.162	(5.547.663.162)	(99,01)
Jumlah		228.350.857.578	163.977.188.778	64.373.668.800	39,26

Realisasi Belanja Jasa selama TA 2023 sebesar Rp228.350.857.578,00, sedangkan realisasi Belanja Jasa selama TA 2022 sebesar Rp163.977.188.778,00. Realisasi Belanja Jasa TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp64.373.668.800,00 atau sebesar 39,26 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2022. Kenaikan ini disebabkan antara lain karena adanya kenaikan pada belanja langganan listrik, kenaikan pada belanja langganan air, kenaikan pada belanja jasa konsultan, kenaikan pada belanja jasa profesi, dan kenaikan pada belanja jasa lainnya.

Realisasi Belanja Jasa TA 2023 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PNBPN, yang masing-masing disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 40
Realisasi Belanja Jasa Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
522111	Belanja Langganan Listrik	49.813.421.935	0	0	49.813.421.935
522112	Belanja Langganan Telepon	1.249.610.228	0	0	1.249.610.228
522113	Belanja Langganan Air	1.753.206.844	0	0	1.753.206.844
522119	Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya	640.881.955	31.746.010	0	672.627.965
522121	Belanja Jasa Pos dan Giro	0	0	0	0
522131	Belanja Jasa Konsultan	1.373.615.923	190.809.033	0	1.564.424.956
522141	Belanja Sewa	39.186.711.415	243.672.929	0	39.430.384.344
522151	Belanja Jasa Profesi	38.833.866.650	251.520.000	0	39.085.386.650
522191	Belanja Jasa Lainnya	95.443.927.628	1.814.466.393	0	97.258.394.021
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	55.615.000	0	0	55.615.000
Jumlah		228.350.857.578	2.532.214.365	0	230.883.071.943

Belanja Pemeliharaan
Rp146.758.540.138,00

B.2.2.5 Belanja Pemeliharaan

Belanja Pemeliharaan merupakan pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk mempertahankan Aset Tetap atau Aset Lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normalnya. Realisasi Belanja Pemeliharaan (5231) untuk TA 2023 adalah Rp146.758.540.138,00 atau 96,55 persen dari pagu yang senilai Rp152.005.962.000,00. Besaran pagu dan realisasi Belanja Pemeliharaan selama TA 2023 tersaji sebagai berikut.

Tabel 41
Pagu dan Realisasi Belanja Pemeliharaan

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	34.392.945.000	33.535.002.868	26.477.400	33.508.525.468	97,43
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	634.740.000	612.236.920	0	612.236.920	96,45
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	2.526.924.000	2.510.238.623	0	2.510.238.623	99,34
523119	Belanja Pemeliharaan	591.321.000	582.551.073	730.000	581.821.073	98,39

	Gedung dan Bangunan					
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	106.839.705.000	102.639.385.051	25.476.561	102.613.908.490	96,04
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	838.662.000	772.029.564	0	772.029.564	92,05
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	0	0	0	0,00
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	2.000.000	0	0	0	0,00
523199	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	6.179.665.000	6.159.780.000	0	6.159.780.000	99,68
Jumlah		152.005.962.000	146.811.224.099	52.683.961	146.758.540.138	96,55

Realisasi Belanja Pemeliharaan secara neto selama TA 2023 adalah Rp146.758.540.138,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Pemeliharaan sebesar Rp146.811.224.099,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp52.683.961,00. Pengembalian belanja merupakan pengembalian belanja pemeliharaan gedung dan bangunan, pengembalian belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya dan pengembalian belanja pemeliharaan peralatan dan mesin.

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 42
Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.508.525.468	34.601.537.272	(1.093.011.804)	(3,16)
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	612.236.920	332.869.629	279.367.291	83,93
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	2.510.238.623	2.211.577.288	298.661.335	13,50
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	581.821.073	737.633.696	(155.812.623)	(21,12)
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.613.908.490	99.744.352.179	2.869.556.311	2,88
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	772.029.564	738.824.497	33.205.067	4,49
523133	Belanja Pemeliharaan Jaringan	0	575.000	(575.000)	(100,00)
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	1.007.500	(1.007.500)	(100,00)
523199	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	6.159.780.000	0	6.159.780.000	100,00
Jumlah		146.758.540.138	138.368.377.061	8.390.163.077	6,06

Realisasi Belanja Pemeliharaan selama TA 2023 sebesar Rp146.758.540.138,00, sedangkan realisasi Belanja Pemeliharaan selama TA 2022 sebesar Rp138.368.377.061,00. Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.390.163.077,00 atau 6,06 persen dibandingkan periode sebelumnya yaitu TA 2022. Kenaikan ini disebabkan karena adanya kenaikan belanja barang persediaan pemeliharaan gedung dan bangunan, kenaikan belanja asuransi gedung dan bangunan, kenaikan belanja pemeliharaan peralatan dan mesin, kenaikan belanja barang persediaan pemeliharaan peralatan dan mesin dan kenaikan belanja pemeliharaan lainnya.

Realisasi Belanja Pemeliharaan TA 2023 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) yang nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 43
Realisasi Belanja Pemeliharaan Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana(Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.508.525.468	0	0	33.508.525.468
523112	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	612.236.920	0	0	612.236.920
523113	Belanja Asuransi Gedung dan Bangunan	2.510.238.623	0	0	2.510.238.623
523119	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	581.821.073	0	0	581.821.073
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	102.613.908.490	0	0	102.613.908.490
523123	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	772.029.564	0	0	772.029.564
523191	Belanja Barang Persediaan Pemeliharaan Lainnya	0	0	0	0
523199	Belanja Pemeliharaan Lainnya	6.159.780.000	0	0	6.159.780.000
Jumlah		146.758.540.138	0	0	146.758.540.138

*Belanja Perjalanan
Dalam Negeri
Rp1.687.025.868.836,00*

B.2.2.6 Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Belanja Perjalanan Dalam Negeri merupakan pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk membiayai perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan negara. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri (5241) untuk TA 2023 adalah Rp1.687.025.868.836,00 atau 93,61 persen dari pagu yang senilai Rp1.802.150.328.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri selama TA 2023 tersaji sebagai berikut.

Tabel 44
Pagu dan Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	259.309.146.000	230.571.567.285	434.971.362	230.136.595.923	88,75

524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	238.674.791.000	214.489.119.097	105.753.000	214.383.366.097	89,82
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	886.787.465.000	865.139.947.339	639.254.266	864.500.693.073	97,49
524115	Belanja Perjalanan Dinas- Penanganan Pandemi Covid-19	0	0	0	0	0,00
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	417.378.926.000	378.230.103.190	224.889.447	378.005.213.743	90,57
Jumlah		1.802.150.328.000	1.688.430.736.911	1.404.868.075	1.687.025.868.836	93,61

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri secara neto selama TA 2023 adalah Rp1.687.025.868.836,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi belanja perjalanan dalam negeri sebesar Rp1.688.430.736.911,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp1.404.868.075,00. Pengembalian belanja terdiri atas pengembalian belanja perjalanan biasa, pengembalian belanja perjalanan dinas dalam kota, pengembalian belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota dan pengembalian belanja perjalanan dinas paket *meeting* luar kota.

Tabel 45
Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	230.136.595.923	197.726.215.662	32.410.380.261	16,39
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	214.383.366.097	218.150.451.778	(3.767.085.681)	(1,73)
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	864.500.693.073	925.698.725.815	(61.198.032.742)	(6,61)
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi Covid-19	0	10.944.000	(10.944.000)	(100,00)
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	378.005.213.743	380.924.404.858	(2.919.191.115)	(0,77)
Jumlah		1.687.025.868.836	1.722.510.742.113	(35.484.873.277)	(2,06)

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri selama TA 2023 sebesar Rp1.687.025.868.836,00, sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri selama TA 2022 sebesar Rp1.722.510.742.113,00. Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp35.484.873.277,00 atau sebesar 2,06 persen dibanding dengan periode sebelumnya yaitu TA 2022. Penurunan ini disebabkan antara lain karena adanya penurunan belanja perjalanan dinas dalam kota, adanya penurunan belanja perjalanan dinas paket *meeting* dalam kota, adanya penurunan belanja perjalanan

dinas-penanganan pandemi covid-19 dan adanya penurunan belanja perjalanan dinas paket meeting luar kota.

Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri TA 2023 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PNBPN yang masing-masing nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 46
Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524111	Belanja Perjalanan Biasa	218.805.391.291	11.331.204.632	0	241.467.800.555
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	203.175.980.487	11.207.385.610	0	225.590.751.707
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	834.214.424.765	30.286.268.308	0	894.786.961.381
524119	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	315.033.653.990	62.971.559.753	0	440.976.773.496
Jumlah		1.571.229.450.533	115.796.418.303	0	1.687.025.868.836

Belanja Perjalanan
Luar Negeri
Rp2.074.165.922,00

B.2.2.7 Belanja Perjalanan Luar Negeri

Belanja Perjalanan Luar Negeri merupakan pengeluaran pemerintah yang dimaksudkan untuk membiayai perjalanan yang dilakukan ke luar dan/atau masuk wilayah Republik Indonesia, termasuk perjalanan di luar wilayah Republik Indonesia untuk kepentingan dinas/negara. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri (5242) untuk TA 2023 adalah Rp2.074.162.922,00 atau 41,43 persen dari pagu yang senilai Rp5.005.880.000,00.

Besaran pagu dan realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri selama TA 2023 tersaji sebagai berikut.

Tabel 47
Pagu dan Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	190.585.000	167.609.965	0	167.609.965	87,94
524219	Belanja Perjalanan Lainnya – Luar Negeri	4.815.295.000	1.909.553.451	3.000.494	1.906.552.957	39,59
Jumlah		5.005.880.000	2.077.163.416	3.000.494	2.074.162.922	41,43

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri secara netto selama TA 2023 adalah Rp2.074.162.922,00. Realisasi ini berasal dari nilai bruto realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri sebesar Rp2.077.163.416,00 yang kemudian dikurangi dengan pengembalian belanja sebesar Rp3.000.494,00. Pengembalian belanja terdiri atas pengembalian belanja perjalanan lainnya – luar negeri.

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 48
Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	Realisasi TA 2023 (Rp)	Realisasi TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa - Luar Negeri	167.609.965	0	167.609.965	100,00
524219	Belanja Perjalanan Lainnya – Luar Negeri	1.906.552.957	322.788.445	1.583.764.512	490,65
Jumlah		2.074.162.922	322.788.445	1.751.374.477	542,58

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri selama TA 2023 sebesar Rp2.074.162.922,00. sedangkan realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri selama TA 2022 sebesar Rp322.788.445,00. Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp1.751.374.477,00 atau sebesar 542,58 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2022.

Realisasi Belanja Perjalanan Luar Negeri TA 2023 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) yang nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 49
Realisasi Belanja Perjalanan Dalam Negeri Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		Rupiah Murni	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
524211	Belanja Perjalanan Dinas Biasa – Luar Negeri	0	167.609.965	0	167.609.965
524219	Belanja Perjalanan Lainnya – Luar Negeri	1.906.552.957	0	0	1.906.552.957
Jumlah		1.906.552.957	167.609.965	0	2.074.162.922

Belanja Modal
Rp309.117.042.976,00

B.2.3 Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap atau Aset Lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Realisasi belanja modal selama TA 2023 adalah sebesar Rp309.117.042.976,00 atau 97,56 persen dari pagunya sebesar Rp316.855.474.000,00. Secara rinci, pagu dan realisasi belanja modal TA 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 50
Rincian Pagu dan Realisasi Belanja Modal

Kode Akun	Uraian	Pagu	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
5311	Belanja Modal Tanah	23.527.901.000	23.527.019.300	0	23.527.019.300	100,00

5321	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.790.218.000	169.667.418.292	160.091.711	169.507.326.581	98,10
5331	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	87.486.669.000	83.544.757.136	27.038.505	83.517.718.631	95,46
5361	Belanja Modal Lainnya	33.050.686.000	32.564.978.464	0	32.564.978.464	98,53
Jumlah		316.855.474.000	309.304.173.192	187.130.216	309.117.042.976	97,56

Realisasi Belanja Modal pada Badan Pusat Statistik selama TA 2023 meliputi Belanja Modal Tanah, Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Gedung dan Bangunan, dan Belanja Modal Lainnya. Realisasi Belanja Modal selama TA 2023 bersumber dana dari Rupiah Murni (RM) dan PNBPN.

Belanja Modal Tanah
Rp23.527.019.300,00

B.2.3.1 Belanja Modal Tanah

Belanja Modal Tanah adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/pembelian/pembebasan penyelesaian, balik nama dan sewa tanah, pengosongan, pengurangan, perataan, pematangan tanah, pembuatan sertifikat, dan pengeluaran lainnya sehubungan dengan perolehan hak atas tanah dan sampai tanah dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pagu dan realisasi Belanja Modal Tanah selama TA 2023 tersaji sebagai berikut.

Tabel 51
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Tanah

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
531111	Belanja Modal Tanah	23.294.181.000	23.293.870.300	0	23.293.870.300	100,00
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	1.720.000	1.720.000	0	1.720.000	100,00
531121	Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang dilakukan oleh LMAN	232.000.000	231.429.000	0	231.429.000	99,75
Jumlah		23.527.901.000	23.527.019.300	0	23.527.019.300	100,00

Realisasi Belanja Modal Tanah secara netto selama periode TA 2023 adalah Rp23.527.019.300,00 atau 100,00 persen dari nilai pagu yang sebesar Rp23.527.901.000,00. Tidak terdapat pengembalian Belanja Modal Tanah selama periode TA 2023.

Rincian realisasi Belanja Modal Tanah periode TA 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 52
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
531111	Belanja Modal Tanah	23.293.870.300	8.776.593.200	14.517.277.100	165,41
531113	Belanja Modal Pembayaran Honor Tim Tanah	0	36.600.000	(36.600.000)	(100,00)
531115	Belanja Modal Pengurukan dan Pematangan Tanah	0	560.649.814	(560.649.814)	(100,00)
531117	Belanja Modal Perjalanan Pengadaan Tanah	1.720.000	10.574.431	(8.854.431)	(83,73)
531121	Belanja Modal Tanah atas Pengadaan Tanah PSN yang dilakukan oleh LMAN	231.429.000	0	231.429.000	100,00
Jumlah		23.527.019.300	9.384.417.445	14.142.601.855	150,70

Realisasi Belanja Modal Tanah selama TA 2023 sebesar Rp23.527.019.300,00, sedangkan realisasi Belanja Modal Tanah selama TA 2022 sebesar Rp9.384.417.445,00. Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp14.142.601.855,00 atau sebesar 150,70 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2022.

Pada kelompok belanja modal tanah TA 2023 terdapat realisasi belanja modal tanah atas pengadaan tanah PSN yang dilakukan LMAN sebesar Rp231.429.000,00. Akun belanja ini tidak sesuai dengan kegiatan inti yang ada pada BPS. Realisasi belanja ini merupakan belanja untuk pengadaan tanah di BPS Kota Banda Aceh.

Realisasi Belanja Modal Tanah TA 2023 keseluruhan berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM).

*Belanja Modal Peralatan dan Mesin
Rp169.507.326.581,00*

B.2.3.2 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan peningkatan kapasitas peralatan dan mesin serta inventaris kantor yang memberikan manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan sampai peralatan dan mesin yang dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pagu dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama periode Semester I TA 2023 tersaji sebagai berikut.

Tabel 53
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	172.608.718.000	169.488.979.687	160.091.711	169.328.887.976	98,10
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	181.500.000	178.438.605	0	178.438.605	98,31

Jumlah	172.790.218.000	169.667.418.292	160.091.711	169.507.326.581	98,10
---------------	------------------------	------------------------	--------------------	------------------------	--------------

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin secara neto selama TA 2023 adalah Rp169.507.326.581,00 atau 98,10 persen dari nilai pagu yang sebesar Rp172.790.218.000,00. Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama TA 2023 tercatat sebesar Rp160.091.711,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Peralatan dan TA 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 54
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	169.328.887.976	80.735.694.991	88.593.192.985	109,73
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	178.438.605	309.961.900	(131.523.295)	(42,43)
Jumlah		169.507.326.581	81.045.656.891	88.461.669.690	109,15

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama TA 2023 sebesar Rp169.507.326.581,00, sedangkan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin selama TA 2022 sebesar Rp81.045.656.891,00. Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp88.461.669.690,00 atau sebesar 109,15 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2022.

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin TA 2023 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PNBP yang masing-masing nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 55
Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		RM	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	167.526.221.048	1.802.666.928	0	169.328.887.976
532121	Belanja Penambahan Nilai Peralatan dan Mesin	178.438.605	0	0	178.438.605
Jumlah		167.704.659.653	1.802.666.928	0	169.507.326.581

Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Rp83.517.718.631,00

B.2.3.3 Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk pengadaan/penambahan/penggantian, dan termasuk pengeluaran untuk perencanaan, pengawasan, dan pengelolaan pembangunan gedung dan bangunan yangh menambah kapasitas sampai gedung dan bangunan dimaksud dalam kondisi siap pakai. Pagu dan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama TA 2023 tersaji sebagai berikut.

Tabel 56
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	36.867.383.000	34.517.209.843	27.038.505	34.490.171.338	93,55
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	90.013.000	24.873.000	0	24.873.000	27,63
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	7.270.194.000	6.816.351.322	0	6.816.351.322	93,76
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	133.591.000	120.617.445	0	120.617.445	90,29
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	43.125.488.000	42.065.705.526	0	42.065.705.526	97,54
Jumlah		87.486.669.000	83.544.757.136	27.038.505	83.517.718.631	95,46

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan secara neto TA 2023 adalah Rp83.517.718.631,00 atau 95,46 persen dari nilai pagu yang sebesar Rp87.486.669.000,00. Realisasi pengembalian Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama TA 2023 adalah sebesar Rp27.038.505,00.

Rincian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 57
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.490.171.338	46.274.171.420	(11.784.000.082)	(25,47)
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	24.873.000	32.002.400	(7.129.400)	(22,28)
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	6.816.351.322	668.411.821	6.147.939.501	919,78
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	120.617.445	217.097.721	(96.480.276)	(44,44)
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	42.065.705.526	28.317.147.494	13.748.558.032	48,55
Jumlah		83.517.718.631	75.508.830.856	8.008.887.775	10,61

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama TA 2023 sebesar Rp83.517.718.631,00, sedangkan realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan selama TA 2022 sebesar Rp75.508.830.856,00. Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp8.008.887.775,00 atau sebesar 10,61 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2022.

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2023 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PNBP yang masing-masing nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 58
Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan
Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		RM	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	34.108.462.835	381.708.503	0	34.490.171.338
533113	Belanja Modal Upah Tenaga Kerja dan Honor Pengelola Teknis Gedung dan Bangunan	24.873.000	0	0	24.873.000
533115	Belanja Modal Perencanaan dan Pengawasan Gedung dan Bangunan	6.816.351.322	0	0	6.816.351.322
533118	Belanja Modal Perjalanan Gedung dan Bangunan	120.617.445	0	0	120.617.445
533121	Belanja Penambahan Nilai Gedung dan Bangunan	41.965.784.380	99.921.146	0	42.065.705.526
Jumlah		83.036.088.982	481.629.649	0	83.517.718.631

Belanja Modal Lainnya **B.2.3.4 Belanja Modal Lainnya**
Rp32.564.978.464,00

Belanja Modal Lainnya adalah pengeluaran/biaya yang digunakan untuk perolehan Aset Tetap Lainnya dan Aset Lainnya sampai aset tersebut dapat digunakan dan yang tidak dapat diklasifikasikan dalam belanja modal tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan. Pagu dan realisasi Belanja Modal Lainnya selama TA 2023 tersaji sebagai berikut.

Tabel 59
Pagu dan Realisasi Belanja Modal Lainnya

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
536111	Belanja Modal Lainnya	33.050.686.000	32.564.978.464	0	32.564.978.464	98,53
Jumlah		33.050.686.000	32.564.978.464	0	32.564.978.464	98,53

Realisasi Belanja Modal Lainnya secara neto TA 2023 adalah Rp32.564.978.464,00 atau 98,53 persen dari nilai pagu yang sebesar Rp33.050.686.000,00. Tidak terdapat realisasi pengembalian Belanja Modal Lainnya selama TA 2023.

Rincian realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 60
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
536111	Belanja Modal Lainnya	32.564.978.464	2.400.000.000	30.164.978.464	1.256,87
Jumlah		32.564.978.464	2.400.000.000	30.164.978.464	1.256,87

Realisasi Belanja Modal Lainnya selama TA 2023 sebesar Rp32.564.978.464,00, sedangkan realisasi Belanja Modal Lainnya selama TA 2022 sebesar Rp2.400.000.000,00. Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp30.164.978.464,00 atau sebesar 1.256,87 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2022.

Realisasi Belanja Modal Lainnya TA 2023 berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM) dan PNBP yang masing-masing nilainya disajikan dalam tabel berikut ini.

Tabel 61
Realisasi Belanja Modal Lainnya Berdasarkan Sumber Dana

Kode Akun	Uraian	Sumber Dana (Rp)			
		RM	PNBP	HLLN	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
536111	Belanja Modal Lainnya	32.520.091.464	44.887.000	0	32.564.978.464
Jumlah		32.520.091.464	44.887.000	0	32.564.978.464

*Belanja Dalam Rangka COVID-19
Rp152.359.404,00*

B.2.4 Belanja Dalam Rangka COVID-19

Berkenaan dengan penanganan dampak pandemi Covid-19, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2023 tentang Penetapan Berakhirnya Status Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di Indonesia dan surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-24/PB/PB.6/2023 tanggal 24 Agustus 2023 perihal Penggunaan Akun Khusus Covid-19, maka sejak periode Semester II TA 2023 sudah tidak ada lagi penggunaan akun belanja penanganan dampak pandemi Covid-19. Pagu dan Realisasi belanja BPS yang berkenaan dengan penanganan dampak pandemi Covid-19 pada laporan keuangan TA 2023 merupakan realisasi selama periode Semester I TA 2023. Atas hal tersebut sudah tidak dapat dilakukan perbaikan atau revisi pagu dan realisasi belanja akun covid-19 menjadi akun belanja reguler dikarenakan pertimbangan manajemen satuan kerja bahwa tidak memungkinkan dilakukan revisi oleh karena ketersediaan pagu yang tidak mencukupi jika dilakukan revisi.

Belanja yang dialokasi untuk kegiatan ini berjenis Belanja Barang. Pagu dan realisasi belanja penanganan dampak pandemi Covid-19 menggunakan akun khusus berdasarkan pada surat Dirjen Perbendaharaan Kemenkeu nomor S-369/PB/2022 tentang Pemutakhiran Akun Dalam Rangka Penanganan Pandemi Covid-19.

Realisasi belanja dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 selama TA 2023 adalah sebesar Rp152.359.404,00, atau 88,50 persen dari pagu yang nilainya

sebesar Rp172.162.000,00. Rincian belanja dalam rangka Covid-19 TA 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 62
Pagu dan Realisasi Belanja Dalam Rangka Covid-19

Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)			% Realisasi Belanja
			Bruto	Pengembalian Belanja	Neto	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	57.632.000	51.829.201	0	51.829.201	89,93
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	54.823.000	44.965.203	50.000	44.915.203	81,93
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	59.707.000	55.615.000	0	55.615.000	93,15
Jumlah		172.162.000	152.409.404	50.000	152.359.404	88,50

Realisasi belanja dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 secara netto selama TA 2023 adalah Rp152.359.404,00 atau 88,50 persen dari nilai pagu yang sebesar Rp172.162.000,00. Realisasi pengembalian belanja dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 selama TA 2023 adalah sebesar Rp50.000,00.

Rincian realisasi belanja dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 TA 2023 dan 2022 disajikan sebagai berikut.

Tabel 63
Perbandingan Realisasi Belanja Belanja Dalam Rangka Covid-19 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan)	
				(Rp)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	51.829.201	3.305.924.744	(3.254.095.543)	(98,43)
521241	Belanja Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi Covid-19	44.915.203	32.966.967.533	(32.922.052.330)	(99,86)
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi Covid-19	0	818.328.858	(818.328.858)	(100,00)
522192	Belanja Jasa - Penanganan Pandemi Covid-19	55.615.000	5.603.278.162	(5.547.663.162)	(99,01)
524115	Belanja Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	10.944.000	(10.944.000)	(100,00)
Jumlah		152.359.404	42.705.443.297	(42.553.083.893)	(99,64)

Realisasi belanja dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 selama TA 2023 sebesar Rp152.359.404,00, sedangkan realisasi belanja dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 selama TA 2022 sebesar Rp42.705.443.297,00. Realisasi belanja dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 TA 2023 mengalami penurunan sebesar Rp42.553.083.893,00 atau sebesar 99,64 persen dibandingkan dengan periode sebelumnya yaitu TA 2022. Penurunan ini disebabkan oleh masa pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir oleh Pemerintah di tahun 2023,

sehingga realisasi belanja dalam rangka penanganan dampak pandemi sudah tidak dilakukan lagi.

Realisasi belanja dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19 TA 2023 keseluruhan berasal dari sumber dana Rupiah Murni (RM).

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1 ASET

Aset Lancar

Rp69.382.076.214,00

C.1.1 Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp69.382.076.214,00 dan Rp171.876.193.389,00. Aset Lancar merupakan aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan.

Rincian Aset Lancar pada Neraca BPS per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji pada tabel 58.

Tabel 64
Rincian Aset Lancar

No.	Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kas di Bendahara Pengeluaran	0	89.371.020
2	Kas Lainnya dan Setara Kas	78.979.277	57.062.405
3	Belanja Dibayar Dimuka (<i>prepaid</i>)	27.174.456.006	58.277.265.214
4	Pendapatan yang Masih Harus Diterima	61.096.562	682.163.135
5	Piutang Bukan Pajak	1.583.944.337	1.632.771.160
6	Penyisihan Piutang Bukan Pajak	(440.851.173)	(8.163.699)
7	Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	18.101.890.494	19.199.873.303
8	Penyisihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	(17.293.092.580)	(17.578.304.708)
9	Persediaan	40.115.653.291	109.524.155.559
Jumlah		69.382.076.214	171.876.193.389

Kas di Bendahara
Pengeluaran
Rp0,00

C.1.1.1 Kas di Bendahara Pengeluaran

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan 89.371.020,00, yang merupakan saldo kas/bank yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan Tambahan Uang Persediaan (TUP) yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke Kas Negara per tanggal Neraca. Kas di Bendahara Pengeluaran mencakup seluruh saldo rekening bendahara pengeluaran, uang logam, uang kertas, dan lain-lain kas (termasuk bukti pengeluaran yang belum dipertanggungjawabkan). Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat berdasarkan nilai nominal dan disajikan dalam nilai rupiah.

Tidak terdapat saldo Kas di Bendahara Pengeluaran pada Neraca per 31 Desember 2023 karena sudah disetorkan ke Kas Negara sebelum tanggal 31 Desember 2023.

Kas Lainnya
dan Setara Kas
Rp78.979.277,00

C.1.1.2 Kas Lainnya dan Setara Kas

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp78.979.277,00 dan Rp57.062.405,00. Kas Lainnya dan Setara Kas mencakup kas

yang berada di bawah tanggung jawab Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan yang bukan berasal dari UP/TUP, baik itu saldo yang merupakan saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai serta belanja hibah yang masih dalam bentuk SPJ yang belum disahkan oleh KPPN. Kas Lainnya dan Setara Kas dicatat berdasarkan nilai nominal dan disajikan dalam nilai rupiah.

Daftar saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 65
Rincian Kas Lainnya dan Setara Kas Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	0	32.825.000	(32.825.000)
2	Polstat STIS	3.186.613	0	3.186.613
3	DKI Jakarta	7.956.217	10.200	7.946.017
4	Jawa Timur	9.330.747	170.000	9.160.747
5	Sumatera Utara	32.358.198	0	32.358.198
6	Sumatera Barat	7.819.657	0	7.819.657
7	Riau	0	15.055.860	(15.055.860)
8	Kalimantan Barat	1.735.494	1.494.100	241.394
9	Sulawesi Selatan	0	7.507.245	(7.507.245)
10	Nusa Tenggara Timur	15.154.742	0	15.154.742
11	Maluku Utara	1.320.041	0	1.320.041
12	Kepulauan Riau	117.568	0	117.568
Jumlah		78.979.277	57.062.405	21.916.872

Mutasi transaksi Kas Lainnya dan Setara Kas per wilayah/satker disajikan sebagai berikut.

Tabel 66
Rincian Mutasi Transaksi Kas Lainnya dan Setara Kas

No.	Wilayah/Satker	31-Des-22 (Rp)	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)	31-Des-23 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Settama	32.825.000	0	32.825.000	0
2	Polstat STIS	0	3.186.613	0	3.186.613
3	DKI Jakarta	10.200	7.956.217	10.200	7.956.217
4	Jawa Timur	170.000	9.330.747	170.000	9.330.747
5	Sumatera Utara	0	32.358.198	0	32.358.198
6	Sumatera Barat	0	7.819.657	0	7.819.657
7	Riau	15.055.860	0	15.055.860	0
8	Kalimantan Barat	1.494.100	1.735.494	1.494.100	1.735.494
9	Sulawesi Selatan	7.507.245	0	7.507.245	0
10	Nusa Tenggara Timur	0	15.154.742	0	15.154.742
11	Maluku Utara	0	1.320.041	0	1.320.041
12	Kepulauan Riau	0	117.568	0	117.568
Jumlah		57.062.405	78.979.277	57.062.405	78.979.277

Saldo Kas Lainnya dan Setara Kas per 31 Desember 2023 merupakan saldo kas yang berasal dari transaksi-transaksi sebagai berikut:

		Pusat	Daerah	Total
1. Penerimaan biaya pendidikan yang belum disetorkan ke Kas Negara	Rp	3.186.613	0	3.186.613
2. Kelebihan realisasi belanja pegawai yang belum disetor ke Kas Negara	Rp	0	7.956.217	7.956.217
3. Realisasi belanja barang yang belum dibayarkan ke pihak ketiga	Rp	0	17.150.404	17.150.404
4. Realisasi belanja modal yang belum dibayarkan ke pihak ketiga	Rp.	0	32.358.198	32.358.198
5. Pajak yang belum disetor ke Kas Negara	Rp	0	18.327.845	18.327.845
Jumlah Kas dan Setara Kas	Rp	3.186.613	75.792.664	78.979.277

Penjelasan transaksi untuk saldo Kas dan Setara Kas per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

1. Kas yang berupa penerimaan biaya pendidikan yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp3.186.613,00 yang terdapat pada satker Politeknik Statistika STIS.
2. Kas yang berupa kelebihan realisasi belanja pegawai yang belum disetorkan ke Kas Negara sebesar Rp7.956.217,00 yang terdapat pada wilayah DKI Jakarta.
3. Kas yang berupa realisasi belanja barang yang dibayarkan ke pihak ketiga sebesar Rp17.150.404,00 yang terdapat pada wilayah Jawa Timur sebesar Rp9.330.747,00 dan wilayah Sumatera Barat sebesar Rp7.819.657,00.
4. Kas yang berupa realisasi belanja modal yang dibayarkan ke pihak ketiga sebesar Rp32.358.198,00 yang terdapat pada wilayah Sumatera Utara.
5. Saldo kas yang berupa pajak yang belum disetor ke Kas Negara sebesar Rp18.327.845,00 terdapat pada wilayah Kalimantan Barat sebesar Rp1.735.494,00, wilayah Nusa Tenggara Timur sebesar Rp15.14.742,00, wilayah Maluku Utara sebesar Rp1.320.041,00 dan wilayah Kepulauan Riau sebesar Rp117.568,00.

Belanja Dibayar
Dimuka (prepaid)
Rp27.174.456.006,00

C.1.1.3 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)

Saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing adalah sebesar Rp27.174.456.006,00 dan Rp58.277.265.214,00. Saldo ini merupakan piutang yang timbul akibat Pemerintah telah melakukan pembayaran lebih dahulu tetapi barang/jasa dari pihak lain tersebut sampai pada akhir periode pelaporan belum

diterima/dinikmati oleh Pemerintah. Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) dicatat sebesar nilai barang/jasa dari pihak lain yang belum diterima/dinikmati oleh BPS, namun BPS telah membayar atas barang/jasa tersebut.

Daftar saldo Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 67
Rincian Belanja Dibayar Dimuka (*prepaid*) per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	14.822.897.950	11.126.694.994	3.696.202.956
2	Pusdiklat BPS	5.974.917.891	11.778.992.052	(5.804.074.161)
3	Polstat STIS	7.926.670	61.280.588	(53.353.918)
4	DKI Jakarta	0	933.488.117	(933.488.117)
5	Jawa Barat	643.941.405	9.801.766.510	(9.157.825.105)
6	Jawa Tengah	708.979.178	2.614.473.694	(1.905.494.516)
7	DI Yogyakarta	31.332.432	90.983.165	(59.650.733)
8	Jawa Timur	233.115.325	3.674.161.053	(3.441.045.728)
9	Aceh	46.237.631	151.725.510	(105.487.879)
10	Sumatera Utara	311.120.714	1.397.593.218	(1.086.472.504)
11	Sumatera Barat	131.196.481	235.570.410	(104.373.929)
12	Riau	159.273.900	276.316.664	(117.042.764)
13	Jambi	51.902.180	123.348.234	(71.446.054)
14	Sumatera Selatan	260.227.057	652.916.314	(392.689.257)
15	Lampung	177.661.482	416.404.812	(238.743.330)
16	Kalimantan Barat	262.918.500	318.178.481	(55.259.981)
17	Kalimantan Tengah	9.169.688	213.022.371	(203.852.683)
18	Kalimantan Selatan	14.429.068	131.266.470	(116.837.402)
19	Kalimantan Timur	342.632.610	177.728.804	164.903.806
20	Sulawesi Utara	9.885.267	11.122.031	(1.236.764)
21	Sulawesi Tengah	18.035.562	84.715.650	(66.680.088)
22	Sulawesi Selatan	149.277.050	272.899.129	(123.622.079)
23	Sulawesi Tenggara	1.164.785	0	1.164.785
24	Maluku	418.539.750	293.294.129	125.245.621
25	Bali	68.220.279	118.683.146	(50.462.867)
26	Nusa Tenggara Barat	227.787.729	307.095.873	(79.308.144)
27	Nusa Tenggara Timur	166.368.325	182.993.549	(16.625.224)
28	Papua	653.963.275	740.947.451	(86.984.176)
29	Bengkulu	147.179.306	122.075.696	25.103.610
30	Maluku Utara	127.287.817	184.000.760	(56.712.943)
31	Banten	278.027.134	647.636.490	(369.609.356)
32	Bangka Belitung	14.868.012	49.801.542	(34.933.530)
33	Gorontalo	633.770	1.895.860	(1.262.090)
34	Kepulauan Riau	47.245.252	380.087.755	(332.842.503)
35	Papua Barat	116.987.651	107.753.219	9.234.432
36	Sulawesi Barat	173.984.371	73.779.168	100.205.203
37	Kalimantan Utara	365.120.509	10.522.572.305	(10.157.451.796)
Jumlah		27.174.456.006	58.277.265.214	(31.102.809.208)

Pendapatan Yang
Masih harus Diterima
Rp61.096.562,00

C.1.1.4 Pendapatan yang Masih Harus Diterima

Saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp61.096.562,00 dan Rp682.163.135,00. Pendapatan yang Masih Harus Diterima merupakan pendapatan PNPB yang seharusnya sudah dibayarkan oleh wajib bayar namun belum diterima pembayarannya atau belum disetor ke Kas Negara serta belum ada dokumen penagihannya sampai dengan tanggal Neraca.

Daftar saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 68
Rincian Pendapatan yang Masih Harus Diterima per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	16.168.562	0	16.168.562
2	Polstat STIS	44.928.000	0	44.928.000
3	Jawa Timur	0	804.331	(804.331)
4	Riau	0	1.710.957	(1.710.957)
5	Sulawesi Tenggara	0	230.547	(230.547)
6	Kalimantan Utara	0	679.417.300	(679.417.300)
Jumlah		61.096.562	682.163.135	(621.066.573)

Penjelasan rincian wilayah/daerah untuk saldo Pendapatan yang Masih Harus Diterima per 31 Desember 2023 adalah sewa ruangan/bangunan oleh pihak ketiga sebesar Rp61.096.562,00 yang belum diterima dan belum disetor ke Kas Negara terdapat pada satker Settama sebesar Rp16.168.562,00 dan satker Polstat STIS sebesar Rp44.928.000,00.

Piutang Bukan Pajak
Rp1.583.944.337,00

C.1.1.5 Piutang Bukan Pajak

Saldo Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.583.944.337,00 dan Rp1.632.771.160,00. Piutang Bukan Pajak merupakan semua hak atau pengakuan/klaim pemerintah atas uang atau jasa terhadap pelayanan yang telah diberikan dan belum diselesaikan pembayaran atau serah terimanya pada akhir tahun anggaran per tanggal neraca.

Piutang Bukan Pajak dicatat sebesar nilai nominal yang ditetapkan dalam surat ketetapan/surat tagihan. Daftar saldo Piutang Bukan Pajak per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 69
Rincian Piutang Bukan Pajak per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	165.497.709	1.424.157.190	(1.258.659.481)
2	Pusdiklat BPS	649.324	0	649.324
3	Polstat STIS	1.735.422	0	1.735.422
4	DKI Jakarta	387.832	0	387.832

5	Jawa Barat	113.961.171	62.149.967	51.811.204
6	Jawa Tengah	15.516.567	18.660.432	(3.143.865)
7	Jawa Timur	12.485.144	2.821.406	9.663.738
8	Aceh	0	94.123.930	(94.123.930)
9	Sumatera Utara	1.544.041	4.248.000	(2.703.959)
10	Sumatera Barat	6.841.230	11.505.565	(4.664.335)
11	Riau	468.228	0	468.228
12	Sumatera Selatan	679.272	8.585.568	(7.906.296)
13	Lampung	145.488	0	145.488
14	Kalimantan Barat	1.493.048	0	1.493.048
15	Kalimantan Timur	5.871.767	0	5.871.767
16	Sulawesi Utara	847.176	1.534.570	(687.394)
17	Sulawesi Selatan	3.790.752	0	3.790.752
18	Sulawesi Tenggara	265.446	185.000	80.446
19	Bali	96.918	93.768	3.150
20	Nusa Tenggara Barat	0	1.638.684	(1.638.684)
21	Nusa Tenggara Timur	0	750.000	(750.000)
22	Papua	42.597.560	0	42.597.560
23	Bengkulu	245.560	0	245.560
24	Maluku Utara	0	2.317.080	(2.317.080)
25	Banten	105.799	0	105.799
26	Bangka Belitung	172.887	0	172.887
27	Kep. Riau	187.636	0	187.636
28	Papua Barat	5.282.660	0	5.282.660
29	Sulawesi Barat	6.804.381	0	6.804.381
30	Kalimantan Utara	1.196.271.319	0	1.196.271.319
Jumlah		1.583.944.337	1.632.771.160	(48.826.823)

Sedangkan mutasi Piutang Bukan Pajak pada 31 Desember 2023 dijelaskan dalam tabel berikut ini.

Tabel 70
Mutasi Piutang Bukan Pajak

No.	Wilayah/Satker	Saldo 31-Des-22 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pelunasan (Rp)	Saldo 31-Des-23 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Settama	1.424.157.190	165.497.709	1.424.157.190	165.497.709
2	Pusdiklat BPS	0	649.324	0	649.324
3	Polstat STIS	0	1.735.422	0	1.735.422
4	DKI Jakarta	0	387.832	0	387.832
5	Jawa Barat	62.149.967	113.961.171	62.149.967	113.961.171
6	Jawa Tengah	18.660.432	15.516.567	18.660.432	15.516.567
7	Jawa Timur	2.821.406	12.485.144	2.821.406	12.485.144
8	Aceh	94.123.930	0	94.123.930	0
9	Sumatera Utara	4.248.000	1.544.041	4.248.000	1.544.041
10	Sumatera Barat	11.505.565	6.841.230	11.505.565	6.841.230
11	Riau	0	468.228	0	468.228
12	Sumatera Selatan	8.585.568	679.272	8.585.568	679.272
13	Lampung	0	145.488	0	145.488
14	Kalimantan Barat	0	1.493.048	0	1.493.048
15	Kalimantan Timur	0	5.871.767	0	5.871.767
16	Sulawesi Utara	1.534.570	847.176	1.534.570	847.176
17	Sulawesi Selatan	0	3.790.752	0	3.790.752
18	Sulawesi Tenggara	185.000	265.446	185.000	265.446
19	Bali	93.768	96.918	93.768	96.918
20	Nusa Tenggara Barat	1.638.684	0	1.638.684	0
21	Nusa Tenggara Timur	750.000	0	750.000	0
22	Papua	0	42.597.560	0	42.597.560
23	Bengkulu	0	245.560	0	245.560
24	Maluku Utara	2.317.080	0	2.317.080	0

No.	Wilayah/Satker	Saldo 31-Des-22 (Rp)	Penambahan (Rp)	Pelunasan (Rp)	Saldo 31-Des-23 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
25	Banten	0	105.799	0	105.799
26	Bangka Belitung	0	172.887	0	172.887
27	Kepulauan Riau	0	187.636	0	187.636
28	Papua Barat	0	5.282.660	0	5.282.660
29	Sulawesi Barat	0	6.804.381	0	6.804.381
30	Kalimantan Utara	0	1.196.271.319	0	1.196.271.319
Jumlah		1.632.771.160	1.583.944.337	1.632.771.160	1.583.944.337

Rincian mutasi transaksi Piutang Bukan Pajak pada tanggal 31 Desember 2023, adalah sebagai berikut:

Tabel 71
Rincian Mutasi Piutang Bukan Pajak

No.	Uraian	31-Des-22 (Rp)	Penambah (Rp)	Pengurang (Rp)	31-Des-23 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Piutang sewa Gedung dan bangunan	8.692.119	71.496.864	8.692.119	71.496.864
2	Piutang atas penerimaan biaya pendidikan	0	488.387	0	488.387
3	Piutang atas denda	416.154.768	414.796.768	416.154.768	414.796.768
4	Piutang Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	3.049.550	15.407.815	3.049.550	15.407.815
5	Piutang atas pengembalian kelebihan realisasi belanja pegawai	156.966.866	136.807.297	156.966.866	136.807.297
6	Piutang atas pengembalian kelebihan realisasi belanja barang	1.047.907.857	48.145.176	1.047.907.857	48.145.176
7	Piutang atas pengembalian kelebihan realisasi belanja modal	0	338.634.081	0	338.634.081
8	Piutang atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemerintah	0	558.167.949	0	558.167.949
Jumlah		1.632.771.160	1.583.944.337	1.632.771.160	1.583.944.337

Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Piutang Bukan Pajak
Rp440.851.173,00

C.1.1.6 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp440.851.173,00 dan Rp8.163.699,00 yang merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Piutang Jangka Pendek yang ditentukan oleh kualitas masing-masing Piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari Piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas Piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 72
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Piutang Bukan Pajak Per Wilayah/Satker

No.	Uraian	Kualitas Piutang	Nilai Piutang Bukan Pajak (Rp)	Nilai Penyisihan Piutang Tdk Tertagih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	Lancar	165.497.709	(906.871)
2	Pusdiklat BPS	Lancar	649.324	(3.247)
3	Polstat STIS	Lancar	1.735.422	(8.677)
4	DKI Jakarta	Lancar	387.832	(1.939)
5	Jawa Barat	Lancar	113.961.171	(569.806)
6	Jawa Tengah	Lancar	15.516.567	(77.588)
7	Jawa Timur	Lancar	12.485.144	(62.424)
8	Sumatera Utara	Lancar	1.544.041	(7.720)
9	Sumatera Barat	Lancar	6.841.230	(34.205)
10	Riau	Lancar	468.228	(2.341)
11	Sumatera Selatan	Lancar	679.272	(3.397)
12	Lampung	Lancar	145.488	(727)
13	Kalimantan Barat	Lancar	1.493.048	(7.466)
14	Kalimantan Timur	Lancar	5.871.767	(29.359)
15	Sulawesi Utara	Lancar	847.176	(4.236)
16	Sulawesi Selatan	Lancar	3.790.752	(18.953)
17	Sulawesi Tenggara	Lancar	265.446	(1.327)
18	Bali	Lancar	96.918	(485)
19	Papua	Lancar	42.597.560	(212.988)
20	Bengkulu	Lancar	245.560	(1.228)
21	Banten	Lancar	105.799	(529)
22	Bangka Belitung	Lancar	172.887	(865)
23	Kep. Riau	Lancar	187.636	(938)
24	Papua Barat	Lancar	5.282.660	(26.414)
25	Sulawesi Barat	Lancar	6.804.381	(34.022)
26	Kalimantan Utara	Lancar	338.634.081	(1.693.170)
27	Kalimantan Utara	Ragu-Ragu	857.637.238	(437.140.251)
Jumlah			1.583.944.337	(440.851.173)

Bagian Lancar
Tagihan TP/TGR
Rp18.101.890.494,00

C.1.1.7 Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Saldo Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp18.101.890.494,00 dan Rp19.199.873.303,00. Saldo ini merupakan nilai tagihan TP/TGR yang jatuh tempo sampai dengan 31 Desember 2023 dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Buletin Teknis (Bultek) Nomor 16 Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) tentang Akuntansi Piutang Berbasis Akrua bahwa Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang dibukukan ke dalam Neraca merupakan bagian dari Aset Lancar, sedangkan sisanya dibukukan ke dalam Tagihan TP/TGR pada Piutang Jangka Panjang. Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 merupakan saldo dari debitor yang dikenakan TP/TGR melalui Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) maupun Surat Keputusan Pembebanan (SKP)

serta reklasifikasi saldo akun Aset Lain-Lain yang menjadi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yaitu debitur TP/TGR yang telah dilimpahkan penagihannya ke KPKNL.

Berdasarkan proses penetapan Piutang TP/TGR, debitur dikelompokkan menjadi beberapa kategori yaitu:

1. Debitur yang telah ditetapkan nilai kerugian negaranya berdasarkan SKTJM atau Surat Keputusan Pembebanan.
2. Debitur yang sedang dalam proses pembebanan kerugian negaranya yang didasarkan pada Surat Pemberitahuan Ganti Rugi (SPGR).
3. Debitur yang nilai piutangnya telah dilimpahkan ke KPKNL.

Saldo piutang atas kerugian negara yang masuk sebagai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang sebesar Rp18.101.890.494,00 merupakan nilai yang status debiturnya telah ditetapkan sebagai TGR.

Daftar saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 73
Rincian Bagian Lancar Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(4)
1	Settama	18.101.890.494	19.199.873.303	(1.097.982.809)
Jumlah		18.101.890.494	19.199.873.303	(1.097.982.809)

Saldo Bagian Lancar Tagihan TP/TGR dijelaskan secara terinci dalam kategori jenis kasus dalam tabel berikut ini.

Tabel 74
Rincian Transaksi Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

No.	Uraian	31-Des-23 (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Pemutusan Ikatan Dinas/Tugas Belajar	17.980.454.234
2	Kehilangan/Kecurian Kendaraan Dinas Roda 2	20.162.500
3	Kehilangan/Kecurian Barang Inventaris Kantor	10.031.258
4	TGR - Laporan Hasil Pemeriksaan	25.000.000
5	Pengunduran Diri CPNS	66.242.503
Jumlah		18.101.890.495

Pada tahun 2023, Pemerintah membuat kebijakan yang berkenaan dengan pengenaan keringanan utang bagi debitur atau disebut *crash program* (CP). Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan nomor 13/PMK.06/2023 tentang Penyelesaian Piutang Instansi Pemerintah yang Diurus/Dikelola oleh PUPN/DJKN Tahun Anggaran 2023. Kebijakan CP adalah optimalisasi penyelesaian Piutang Negara yang dilakukan secara terpadu berupa pemberian keringanan utang kepada penanggung utang. Keringanan utang dimaksud dalam CP merupakan pengurangan pembayaran pelunasan utang oleh penanggung utang dengan

diberikan pengurangan pokok, bunga, denda, ongkos/biaya lainnya. Ketentuan pemberian keringanan utang pokok adalah sebagai berikut:

1. Sebesar 35% (tiga puluh lima persen) dari sisa utang pokok, dalam hal Piutang Negara didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan.
2. Sebesar 60% (enam puluh persen) dari sisa utang pokok, dalam hal Piutang Negara tidak didukung barang jaminan berupa tanah atau tanah dan bangunan.
3. Tambahan keringanan utang pokok, jika dilakukan pelunasan dalam waktu:
 - a. sampai dengan Juni 2023, sebesar 40% (empat puluh persen) dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan;
 - b. pada Juli sampai dengan September 2023, sebesar 30% (tiga puluh persen) dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan; atau
 - c. pada Oktober sampai dengan tanggal 20 Desember 2023, sebesar 20% (dua puluh persen) dari sisa utang pokok setelah diberikan keringanan.

Atas kebijakan CP di tahun 2023, BPS juga menerapkan keringanan utang pada debitur piutang TP/TGR sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 13/PMK.06/2023 tersebut. Penerapan ini diberikan kepada 5 debitur dengan total keringanan utang sebesar Rp575.347.265,21. Rincian debitur yang mendapatkan keringanan utang TP/TGR melalui kebijakan CP di tahun 2023 disajikan sebagai berikut.

Tabel 75
Rincian Debitur Yang Mengikuti Kebijakan CP Tahun 2023

No.	Nama	Nilai TGR (Rp)	Saldo Sebelum CP (Rp)	Diskon CP (Rp)	Persetujuan CP (Rp)	Pembayaran (Rp)	Saldo (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Suci Nor Ramadani	32.247.887	7.235.916	5.788.733	1.447.183	1.447.183	0
2	Dani Kartika Ismail	454.356.040	440.314.635	334.639.123	105.675.512	105.675.512	0
3	Muhamad Tohir	195.000.000	43.231.323	32.855.806	10.375.518	10.375.518	0
4	Vergita Lewin Rizki	216.000.000	186.751.125	141.930.855	44.820.270	44.820.270	0
5	Irza Ichsanul Annasya	109.800.000	88.430.513	60.132.748	28.297.765	28.297.765	0
Jumlah		1.007.403.927	765.963.512	575.347.265	190.616.248	190.616.248	0

Rincian debitur Bagian Lancar Tagihan TP/TGR disajikan Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih – Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Rp17.293.092.580,00

C.1.1.8 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp17.293.092.580,00 dan Rp17.578.304.708,00 atas ketidaktertagihan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR yang

ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 76
Rincian Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Bagian Lancar Tagihan TP/TGR
Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	Kualitas Piutang	Nilai Bagian Lancar Tagihan TP/TGR (Rp)	Penyisihan (%)	Nilai Penyisihan Piutang Tdk Tertagih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Settama	Lancar	30.193.758	0,5	150.969
		Kurang Lancar	33.385.000	10	3.338.500
		Diragukan	1.497.417.252	50	748.708.626
		Macet	16.540.894.484	100	16.540.894.485
Jumlah			18.101.890.494		17.293.092.580

Persediaan

Rp40.115.653.291,00

C.1.1.9 Persediaan

Persediaan per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp40.115.653.291,00 dan Rp109.524.155.559,00. Persediaan merupakan jenis Aset Lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) pada tanggal neraca, yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp40.115.653.291,00 diperoleh dari hasil inventarisasi fisik persediaan yang dilengkapi dengan Berita Acara *Stock Opname*, terdiri dari:

Tabel 77
Rincian Persediaan

Kode	Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
117111	Barang Konsumsi	39.372.986.704	108.545.344.361	(69.172.357.657)
117113	Bahan Untuk Pemeliharaan	742.666.587	978.811.198	(236.144.611)
Jumlah		40.115.653.291	109.524.155.559	(69.408.502.268)

Perhitungan mutasi nilai Persediaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023 (akhir)	Rp	40.115.653.291
Saldo per 31 Desember 2022 (awal)	Rp	109.524.155.559
Mutasi Tambah/(Kurang)	(Rp)	69.408.502.268
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	101.086.422.987
Saldo Awal	Rp	80.051.630
Transfer Masuk	Rp	33.426.596.496
Reklasifikasi Masuk	Rp	3.398.749.121
Reklasifikasi Dari Aset	Rp	342.428.259

Perolehan Lainnya	Rp	1.141.594.646	
Koreksi Nilai Tambah	Rp	25.962.770.971	
Koreksi Kuantitas Tambah	Rp	1.033.170.671	
Koreksi Transfer Keluar Online	Rp	325.466.084	
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	166.797.250.865	
Mutasi Kurang			
Habis Pakai	(Rp	160.017.860.829)	
Transfer Keluar	(Rp	33.752.062.580)	
Reklasifikasi Keluar	(Rp	3.118.932.340)	
Reklasifikasi ke Aset	(Rp	1.599.058.194)	
Hibah Keluar	(Rp	61.892.575)	
Keluar Lainnya	(Rp	2.753.100)	
Koreksi Nilai Kurang	(Rp	854.251.317)	
Koreksi Kuantitas Kurang	(Rp	26.044.526.741)	
Hasil Opname Fisik	(Rp	1.399.098.840)	
Rusak	(Rp	143.600.385)	
Usang	(Rp	9.211.716.232)	
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp	236.205.753.133)	
Jumlah Rincian Mutasi			(Rp 69.408.502.268)

Rincian saldo Persediaan per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 78
Rincian Persediaan Per Wilayah/Satker

No.	Kode	Wilayah/Satker	31-Des-23 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	0199	Settama	4.830.654.048
2	0199	Pusdiklat	384.492.157
3	0199	Polstat STIS	155.741.507
4	0100	DKI Jakarta	1.081.944.344
5	0200	Jawa Barat	1.627.505.174
6	0300	Jawa Tengah	1.785.660.477
7	0400	DI Yogyakarta	485.792.066
8	0500	Jawa Timur	2.658.626.713
9	0600	Aceh	1.410.016.098
10	0700	Sumatera Utara	1.533.686.681
11	0800	Sumatera Barat	1.469.133.151
12	0900	Riau	624.398.197
13	1000	Jambi	215.613.430
14	1100	Sumatera Selatan	849.430.160
15	1200	Lampung	1.463.019.574
16	1300	Kalimantan Barat	992.382.094
17	1400	Kalimantan Tengah	1.023.506.225
18	1500	Kalimantan Selatan	1.203.714.898
19	1600	Kalimantan Timur	798.770.364
20	1700	Sulawesi Utara	755.775.617
21	1800	Sulawesi Tengah	504.336.694
22	1900	Sulawesi Selatan	1.874.311.349
23	2000	Sulawesi Tenggara	658.456.123
24	2100	Maluku	1.420.140.500
25	2200	Bali	243.464.080
26	2300	Nusa Tenggara Barat	425.632.523
27	2400	Nusa Tenggara Timur	1.093.771.439
28	2500	Papua	2.195.487.861
29	2600	Bengkulu	670.176.000

No.	Kode	Wilayah/Satker	31-Des-23 (Rp)
30	2800	Maluku Utara	342.794.827
31	2900	Banten	2.193.324.567
32	3000	Bangka Belitung	373.564.871
33	3100	Gorontalo	277.152.215
34	3200	Kepulauan Riau	532.369.609
35	3300	Papua Barat	1.344.008.050
36	3400	Sulawesi Barat	192.239.885
37	3500	Kalimantan Utara	424.559.723
Jumlah			40.115.653.291

Terdapat jenis barang yang merupakan persediaan dengan kondisi rusak dan usang. Rincian atas barang tersebut adalah sebagai berikut:

1. Barang dalam kondisi rusak sebesar Rp199.444.129,00.
2. Barang dalam kondisi usang sebesar Rp1.821.848.587,00.

Jumlah dan Jenis barang persediaan secara terinci dilampirkan pada Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan ini.

Aset Tetap

Rp5.259.776.645.128,00

C.1.2 Aset Tetap

Nilai Buku Aset Tetap per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.259.776.645.128,00 dan Rp5.182.226.391.992,00. Aset Tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun.

Rincian Aset Tetap dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 79
Rincian Aset Tetap

Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah	3.203.381.161.527	3.157.600.032.227	45.781.129.300
Peralatan & Mesin	2.183.257.236.943	2.150.345.084.810	32.912.152.133
Gedung & Bangunan	2.030.816.486.155	1.977.048.451.023	53.768.035.132
Aset Tetap Lainnya	38.217.040.150	42.782.106.086	(4.565.065.936)
KDP	33.118.386.227	28.019.577.278	5.098.808.949
Jumlah	7.488.790.311.002	7.355.795.251.424	132.995.059.578
Akumulasi Penyusutan	(2.229.013.665.874)	(2.173.568.859.432)	(55.444.806.442)
Nilai Buku Aset Tetap	5.259.776.645.128	5.182.226.391.992	77.550.253.136

Posisi Aset Tetap pada Neraca Laporan Keuangan dibandingkan dengan posisi Aset Tetap pada Laporan Barang Milik Negara (BMN) dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 80
Perbandingan Aset Tetap antara Neraca dan Laporan BMN Per 31 Desember 2023

Uraian	Neraca (Rp)	SIMAK BMN (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah	3.203.381.161.527	3.203.381.161.527	0
Peralatan & Mesin	2.183.257.236.943	2.183.257.236.943	0
Gedung & Bangunan	2.030.816.486.155	2.030.816.486.155	0
Aset Tetap Lainnya	38.217.040.150	38.217.040.150	0
KDP	33.118.386.227	33.118.386.227	0
Jumlah	7.488.790.311.002	7.488.790.311.002	0
Akumulasi Penyusutan	(2.229.013.665.874)	(2.229.013.665.874)	0
Nilai Buku Aset Tetap	5.259.776.645.128	5.259.776.645.128	0

Penjelasan atas kenaikan dan penurunan nilai masing-masing jenis Aset Tetap dikarenakan adanya mutasi serta hubungannya dengan belanja modal, disajikan dalam bentuk tabel dan uraian selanjutnya.

Tanah

Rp3.203.381.161.527,00

C.1.2.1 Tanah

Nilai perolehan Tanah per 31 Desember 2023 adalah Rp3.203.381.161.527,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2022 adalah Rp3.157.600.032.227,00. Secara ringkas perubahan saldo Tanah disajikan sebagai berikut.

Tabel 81
Perubahan Saldo Tanah Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Tanah	3.203.381.161.527	3.157.600.032.227	45.781.129.300
Jumlah	3.203.381.161.527	3.157.600.032.227	45.781.129.300

Perhitungan mutasi nilai Tanah per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023 (akhir)	Rp	3.203.381.161.527
Saldo per 31 Desember 2022 (awal)	Rp	3.157.600.032.227
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	45.781.129.300
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Saldo Awal	Rp	346.537.400
Pembelian	Rp	15.302.778.618
Hibah Masuk	Rp	8.571.862.000
Transfer Masuk	Rp	429.169.000
Reklasifikasi Masuk	Rp	5.586.842.000
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	57.275.268.000
Pengembangan Melalui KDP	Rp	427.429.000
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	9.470.773.300
Perolehan lainnya	Rp	19.170.135.000
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	116.580.794.318
Mutasi Tambah		
Transfer Keluar	(Rp	3.392.116.000)

Hibah Keluar	(Rp 268.000.000)	
Reklasifikasi Keluar	(Rp 6.854.606.808)	
Koreksi Pencatatan	(Rp 57.589.858.810)	
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp 346.543.400)	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(Rp 2.348.540.000)	
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp 70.799.665.018)	
Jumlah Rincian Mutasi		Rp 45.781.129.300

Realisasi belanja modal tanah sampai dengan 31 Desember 2023 secara netto sebesar Rp23.527.019.300,00. Realisasi belanja modal tanah yang mempengaruhi mutasi nilai Tanah, alokasi penggunaan belanja modal tanah, dan perolehan tanah yang menggunakan selain belanja modal tanah dijelaskan sebagai berikut:

Pembelian		Rp 15.302.778.618
Jumlah realisasi belanja modal tanah pada mutasi nilai Tanah		Rp 15.302.778.618
Penambahan:		
Realisasi Belanja Modal Tanah yang menghasilkan aset KDP	Rp 9.702.202.300	
Jumlah Penambahan	Rp 9.702.202.300	
Pengurangan:		
Realisasi belanja modal gedung dan bangunan yang menambah nilai tanah	(Rp 1.477.961.618)	
Jumlah Pengurangan	(Rp 1.477.961.618)	
Tambah/(Kurang)		Rp 8.224.240.682
Realisasi belanja modal tanah (neto)		Rp 23.527.019.300

Penjelasan rincian mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Penambahan dikarenakan adanya realisasi belanja modal tanah yang membentuk KDP sebelum menjadi aset definitif sebesar Rp9.702.202.300,00.
- Pengurangan dikarenakan adanya penambahan nilai pada aset tanah yang menggunakan belanja modal gedung dan bangunan sebesar Rp1.477.961.618,00.

Selain berasal dari belanja modal, penambahan dan pengurangan nilai tanah juga berasal dari transaksi antar entitas seperti tranfer dan hibah. Berikut merupakan penjelasan dari transaksi antar entitas yang dirinci per wilayah.

- Beberapa satuan kerja pada Badan Pusat Statistik mendapatkan hibah tanah dari organisasi/pemerintah daerah/perorangan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 82
Rincian Hibah Masuk Tanah per Wilayah

No.	Wilayah	Satuan Kerja	31-Des-23 (Rp)	31-Des-23 (m ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jawa Barat	BPS Kab. Bogor	496.440.000	1.260
		BPS Kota Depok	421.960.000	1.507
2	Sumatera Barat	BPS Kab. Tanah Datar	160.800.000	565
3	Kalimantan Barat	BPS Provinsi Kalimantan Barat	7.364.662.000	1.427
4	Papua Barat	BPS Kab. Sorong Selatan	128.000.000	2.000
Jumlah			8.571.862.000	6.759

- Beberapa satuan kerja pada Badan Pusat Statistik mendapatkan hibah tanah dari organisasi/pemerintah daerah/perorangan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 83
Rincian Hibah Keluar Tanah per Wilayah

No.	Wilayah	Satuan Kerja	31-Des-23 (Rp)	31-Des-23 (m ²)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sumatera Barat	BPS Kab. Tanah Datar	268.000.000	507
Jumlah			268.000.000	507

- Rincian satker yang melakukan transfer tanah antar satker atau Kementerian Negara/Lembaga secara vertikal disajikan dalam tabel dibawah:

Tabel 84
Rincian Transfer Tanah

No.	Satker Pengirim	Aset 31-Des-23		Satker Penerima
		(Rp)	(m ²)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	429.169.000	114	BPS Kota Bekasi
2	BPS Kab. Barito Timur	1.669.764.000	5.105	KPP Muara Taweh
3	BPS Kab. Pasaman	1.293.183.000	681	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
Jumlah		3.392.116.000	5.900	

Berdasarkan daftar mutasi aset tanah terdapat selisih antara transfer masuk dan transfer keluar sebesar Rp2.962.947.000,00. Hal ini disebabkan BPS Kab. Barito Timur dan BPS Kab. Pasaman mentransfer tanah ke luar satker di luar BPS, yaitu KPP Muara Taweh dan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Terdapat permasalahan pada Aset Tetap Tanah seperti tanah dalam sengketa, tanah yang tidak didukung bukti kepemilikan, tanah yang dikuasai pihak lain, tanah yang dihentikan penggunaannya, pencatatan ganda, dan status Aset Tetap Tanah pinjam pakai. Rincian penjelasan permasalahan Aset Tetap Tanah tersebut disajikan secara terinci dalam Lampiran Pendukung Laporan Keuangan I berupa Catatan Atas Laporan BMN BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 pada laporan keuangan ini.

Peralatan dan Mesin
Rp2.183.257.236.943,00

C.1.2.2 Peralatan dan Mesin

Nilai perolehan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah Rp2.183.257.236.943,00 dan per 31 Desember 2022 adalah Rp2.150.345.084.810,00. Secara ringkas perubahan saldo Peralatan dan Mesin disajikan sebagai berikut.

Tabel 85
Perubahan Saldo Peralatan dan Mesin Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Peralatan dan Mesin	2.183.257.236.943	2.150.345.084.810	32.912.152.133
Jumlah	2.183.257.236.943	2.150.345.084.810	32.912.152.133

Nilai buku Peralatan dan Mesin pada tanggal pelaporan adalah Rp336.592.587.667,00. Nilai Buku Peralatan dan Mesin diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp1.846.664.649.276,00. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Perhitungan mutasi nilai Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023 (akhir)	Rp	2.183.257.236.943
Saldo per 31 Desember 2022 (awal)	Rp	2.150.345.084.810
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	32.912.152.133
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Saldo Awal	Rp	3.850.602.393
Pembelian	Rp	176.183.821.713
Hibah Masuk	Rp	268.232.225
Transfer Masuk	Rp	37.656.800.161
Reklasifikasi Masuk	Rp	30.179.274.052
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp	493.500.000
Koreksi Manual	Rp	15.307.237
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	8.904.657.839
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	394.538.505
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	8.447.809.003
Pembatalan Penghapusan	Rp	1.084.934.790
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	11.856.750.881
Perolehan Lainnya	Rp	146.784.492
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	279.483.013.291
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	(Rp	37.656.800.161)
Reklasifikasi Keluar	(Rp	30.109.644.052)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(Rp	207.000.000)
Penghapusan	(Rp	53.178.000)
Koreksi Pencatatan	(Rp	446.055.035)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp	819.201.521)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp	177.278.982.387)
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp	246.570.861.156)
Jumlah Rincian Mutasi	Rp	32.912.152.135

Realisasi belanja modal peralatan dan mesin sampai dengan 31 Desember 2023 secara neto sebesar Rp169.507.326.581,00. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang mempengaruhi mutasi nilai peralatan dan mesin, alokasi penggunaan belanja modal peralatan

dan mesin, dan perolehan peralatan dan mesin yang menggunakan selain belanja modal peralatan dan mesin dijelaskan sebagai berikut:

Pembelian	Rp	176.183.821.713
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	394.538.505
Jumlah realisasi belanja modal peralatan dan mesin pada mutasi nilai Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	176.578.360.218
Penambahan:		
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk perolehan barang ekstrakompatibel	Rp	341.236.275
Realisasi belanja peralatan mesin hasil ralat dari akun belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	Rp	5.000.000
Realisasi belanja peralatan mesin menghasilkan persediaan	Rp	286.500.000
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk perolehan Aset Tetap Tak Berwujud	Rp	6.069.000
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin untuk perolehan aset KDP	Rp	8.475.039.003
Jumlah Penambahan	Rp	9.113.844.278
Pengurangan:		
Realisasi Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel untuk perolehan Peralatan dan Mesin	(Rp)	11.748.000
Realisasi belanja modal peralatan mesin yang diralat menjadi akun belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	(Rp)	167.815.940
Realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk perolehan Peralatan dan Mesin	(Rp)	485.050.800
Pencatatan belanja PM yang tidak dapat dimasukkan sebagai PM	(Rp)	235.300.000
Pengembalian Belanja Modal Peralatan dan Mesin	(Rp)	10.591.711
Realisasi belanja Modal Lainnya untuk perolehan Peralatan dan Mesin	(Rp)	15.274.371.464
Jumlah Pengurangan	(Rp)	16.184.877.915
Lebih/(Kurang)	(Rp)	7.071.033.637
Realisasi belanja modal peralatan dan mesin (neto)	Rp	169.507.326.581

Penjelasan rincian mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Penambahan dikarenakan adanya belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk perolehan peralatan mesin ekstrakomptible sebesar Rp341.236.275,00.
- Penambahan dikarenakan adanya ralat dari belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel menjadi belanja modal peralatan mesin sebesar Rp5.000.000,00.
- Penambahan dikarenakan adanya belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk perolehan barang persediaan sebesar Rp286.500.000,00.
- Penambahan dikarenakan adanya belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk Aset Tetap Tak Berwujud sebesar Rp6.069.000,00.
- Penambahan dikarenakan adanya realisasi belanja modal peralatan dan mesin yang membentuk KDP sebelum menjadi aset definitif sebesar Rp8.475.039.003,00.
- Pengurangan dikarenakan adanya penambahan nilai pada aset peralatan dan mesin yang menggunakan Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel sebesar Rp11.748.000,00.
- Pengurangan dikarenakan adanya ralat dari belanja modal peralatan mesin menjadi

belanja Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptable sebesar Rp167.815.940,00.

- Pengurangan dikarenakan realisasi belanja Modal Gedung dan Bangunan untuk perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp485.050.800,00.
- Pengurangan karena adanya pencatatan pembelian peralatan mesin yang lebih besar dari realisasi belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp235.300.000,00.
- Pengurangan karena adanya pengembalian belanja modal peralatan dan mesin sebesar Rp10.591.711,00.
- Pengurangan dikarenakan realisasi belanja Modal Lainnya untuk perolehan Peralatan dan Mesin sebesar Rp15.274.371.464,00.

Selain berasal dari belanja modal, penambahan dan pengurangan nilai peralatan dan mesin juga berasal dari transaksi antar entitas seperti transfer dan hibah. Berikut merupakan penjelasan dari transaksi antar entitas yang dirinci per wilayah.

- Beberapa satuan kerja pada Badan Pusat Statistik mendapatkan hibah peralatan dan mesin dari organisasi/pemerintah daerah/perorangan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 86
Rincian Hibah Masuk Peralatan dan Mesin per Wilayah

No.	Wilayah	Satuan Kerja	31-Des-23 (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Lampung	BPS Kab. Lampung Barat	8.044.725	Satu buah televisi
			32.187.500	Lima buah AC Split
2	Nusa Tenggara Barat	BPS Kab. Lombok Timur	228.000.000	Satu buah kendaraan <i>station wagon</i>
Jumlah			268.232.225	

- Transfer masuk dan transfer keluar peralatan dan mesin masing-masing sebesar Rp37.656.800.161,00 dilakukan antar satuan kerja vertikal BPS, sehingga tidak ada selisih antara transfer masuk dan transfer keluar.

Selain nilai Peralatan dan Mesin tersebut di atas, terdapat Peralatan dan Mesin yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp23.263.427.460,00. Rincian Peralatan dan Mesin yang masuk pada aset ekstrakomptabel terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Rincian kondisi barang untuk Aset Tetap Peralatan dan Mesin tersaji dalam Laporan Kondisi Barang yang merupakan lampiran pada laporan keuangan ini.

Gedung dan Bangunan
Rp2.030.816.486.155,00

C.1.2.3 Gedung dan Bangunan

Nilai perolehan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah Rp2.030.816.486.155,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2022 adalah

Rp1.977.048.451.023,00. Secara ringkas perubahan saldo Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut.

Tabel 87
Perubahan Saldo Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Gedung dan Bangunan	2.030.816.486.155	1.977.048.451.023	53.768.035.132
Jumlah	2.030.816.486.155	1.977.048.451.023	53.768.035.132

Nilai buku Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah Rp1.648.711.071.267,00. Nilai Buku Gedung dan Bangunan diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp382.105.414.888,00.

Perhitungan mutasi nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023 (akhir)	Rp 2.030.816.486.155
Saldo per 31 Desember 2022 (awal)	Rp 1.977.048.451.023
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp 53.768.035.132

Rincian Mutasi

Mutasi Tambah

Saldo Awal	Rp 607.292.800
Pembelian	Rp 3.081.790.826
Hibah Masuk	Rp 48.000.000
Transfer Masuk	Rp 79.847.000
Reklasifikasi Masuk	Rp 23.573.673.048
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp 224.027.000
Pengembangan Melalui KDP	Rp 45.076.789.128
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp 22.558.175.735
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp 1.254.578.597
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp 1.979.924.497
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp 2.065.060.000
Koreksi Susulan	Rp 269.447.112
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 3.126.754.350
Perolehan Lainnya	Rp 79.847.000

Jumlah Mutasi Tambah

Rp 104.025.207.093

Mutasi Kurang

Transfer Keluar	(Rp 574.204.000)
Hibah Keluar	(Rp 1.373.260.000)
Reklasifikasi Keluar	(Rp 22.305.908.240)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(Rp 224.027.000)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp 9.697.827.400)
Koreksi Pencatatan	(Rp 2.347.909.853)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp 13.734.035.468)

Jumlah Mutasi Kurang

(Rp 50.257.171.961)

Jumlah Rincian Mutasi

Rp 53.768.035.132

Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan sampai dengan 31 Desember 2023 secara netto sebesar Rp83.517.718.631,00. Realisasi belanja modal Gedung dan bangunan yang mempengaruhi mutasi nilai gedung dan bangunan, alokasi penggunaan belanja modal gedung dan bangunan, dan perolehan gedung dan bangunan yang menggunakan selain belanja modal gedung dan bangunan dijelaskan sebagai berikut:

Pembelian	Rp	3.081.790.826
Penyelesaian Pembangunan Langsung	Rp	1.254.578.597
Pengembangan Nilai Aset (Langsung)	Rp	1.979.924.497
Jumlah realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan pada mutasi nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	6.316.293.920
Penambahan:		
Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan untuk perolehan aset tanah	Rp	1.477.961.618
Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan untuk perolehan aset peralatan mesin	Rp	485.050.800
Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan untuk perolehan aset jalan dan irigasi	Rp	3.885.000
Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan untuk perolehan barang ekstrakomptabel	Rp	82.381.166
Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan untuk perolehan aset KDP	Rp	62.640.141.513
Realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan dalam RPATA	Rp	12.539.043.119
Jumlah Penambahan	Rp	77.228.463.216
Pengurangan:		
Pengembalian belanja modal Gedung dan Bangunan	(Rp	27.038.505)
Jumlah Pengurangan	(Rp	27.038.505)
Lebih/(Kurang)	Rp	77.201.424.711
Realisasi belanja modal gedung dan bangunan (neto)	Rp	83.517.718.631

Penjelasan rincian mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Penambahan dikarenakan adanya belanja modal Gedung dan bangunan yang digunakan untuk perolehan tanah sebesar Rp1.477.961.618,00.
- Penambahan dikarenakan adanya belanja modal Gedung dan bangunan yang digunakan untuk perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp485.050.800,00.
- Penambahan dikarenakan adanya belanja modal Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk perolehan jalan dan irigasi sebesar Rp3.885.000,00.
- Penambahan dikarenakan adanya belanja modal Gedung dan Bangunan yang digunakan untuk perolehan barang ekstrakomptabel sebesar Rp82.381.166,00.
- Penambahan dikarenakan adanya realisasi belanja modal Gedung dan Bangunan yang membentuk KDP sebelum menjadi aset definitif sebesar Rp62.640.141.513,00.
- Penambahan dikarenakan adanya realiasi belanja modal Gedung dan Bangunan yang belum selesai sampai akhir periode namun sudah ditampung dalam RPATA sebesar Rp12.539.043.119,00.
- Pengurangan karena adanya pengembalian belanja modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp27.038.505,00.

Transaksi penambahan dan pengurangan mutasi Gedung dan Bangunan yang berasal dari transaksi antar entitas seperti transfer dan hibah beserta kategori aset Gedung dan Bangunan diuraikan sebagai berikut:

- Beberapa satuan kerja pada Badan Pusat Statistik mendapatkan hibah Gedung dan Bangunan dari organisasi/pemerintah daerah/perorangan yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 88
Rincian Hibah Masuk Gedung dan Bangunan per Wilayah

No.	Wilayah	Satuan Kerja	31-Des-23 (Rp)	Jenis Aset Gedung dan Bangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sumatera Barat	BPS Kab. Tanah Datar	48.000.000	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
Jumlah			48.000.000	

- Terdapat satker pada Badan Pusat Statistik yang memberikan hibah berupa Gedung dan Bangunan kepada organisasi/pemerintah daerah/perorangan dengan rincian:

Tabel 89
Rincian Hibah Keluar Gedung dan Bangunan per Wilayah

No.	Wilayah	Satuan Kerja	31-Des-23 (Rp)	Jenis Aset Gedung dan Bangunan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sumatera Barat	BPS Kab. Tanah Datar	527.121.000	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen
2	Jawa Barat	BPS Kab. Tasikmalaya	712.102.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen
3	Kalimantan Selatan	BPS Kab. Hulu Sungai Utara	134.037.000	Rumah Negara Golongan I Tipe C Semi Permanen
Jumlah			1.373.260.000	

- Rincian satker yang melakukan transfer Gedung dan Bangunan antar satker atau Kementerian Negara/Lembaga secara vertikal disajikan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 90
Rincian Transfer Gedung dan Bangunan

No.	Satker Pengirim	Aset		Satker Penerima
		31-Des-23 (Rp)	Jenis Aset GB	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	79.847.000	Rumah Negara Golongan I Tipe A Permanen	BPS Kota Bekasi
2	BPS Kab. Barito Timur	141.396.000	Pagar Permanen	Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping
3	BPS Kab. Pasaman	352.961.000	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kantor Pelayanan Pajak Pratama Muara Teweh
Jumlah		574.204.000		

Secara keseluruhan nilai transfer masuk dan transfer keluar pada Badan Pusat Statistik terdapat selisih sebesar Rp494.357.000,00. Hal ini disebabkan BPS Kab. Barito Timur dan BPS Kab. Pasaman mentransfer gedung dan bangunan ke luar satker di luar BPS yaitu KPP Muara Taweh dan Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping.

Transaksi pembelian pada mutasi Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 sebesar Rp3.081.790.826,00. Rincian pembelian pada mutasi Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut.

Tabel 91
Rincian Pembelian Aset Pada Gedung dan Bangunan Per Wilayah

No.	Wilayah/Satker	Nama Aset	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pusdiklat BPS	Bangunan Gedung Tempat Olah Raga Lainnya	194.537.490
		Bangunan Gedung Untuk Pos Jaga Lainnya	98.421.326
		Bangunan Gudang Lainnya	64.581.487
2	Jawa Tengah	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	256.550.000
3	Jawa Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	188.700.000
4	Aceh	Bangunan Lainnya	74.550.000
5	Sumatera Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	169.028.615
6	Riau	Pagar Permanen	56.965.000
7	Jambi	Bangunan Gedung Kantor Permanen	69.900.000
8	Sumatera Selatan	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	126.006.000
9	Kalimantan Tengah	Pagar Permanen	44.800.000
10	Kalimantan Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	373.722.040
11	Maluku	Bangunan Gedung Kantor Permanen	39.160.000
12	Bali	Bangunan Gedung Kantor Permanen	133.931.200
13	Nusa Tenggara Barat	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	44.470.463
14	Papua	Bangunan Gedung Kantor Permanen	620.755.800
		Pagar Permanen	374.620.705
15	Banten	Taman Permanen	86.790.700
16	Bangka Belitung	Bangunan Gedung Kantor Permanen	64.300.000
Jumlah			3.081.790.826

Transaksi pengembangan melalui KDP pada mutasi Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 sebesar Rp45.076.789.128,00. Rincian pengembangan melalui KDP pada mutasi Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut.

Tabel 92
Rincian Pengembangan Melalui KDP Aset Pada Gedung dan Bangunan Per Wilayah

No.	Wilayah/Satker	Nama Aset	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Settama	Bangunan Gedung Kantor Permanen	28.360.055.047
2	Jawa Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	647.113.850
3	Jawa Tengah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.524.458.054
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	105.749.000
4	DI Yogyakarta	Bangunan Gedung Kantor Permanen	185.306.607
5	Jawa Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	386.000.800
6	Sumatera Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	369.805.000
7	Riau	Bangunan Gedung Kantor Permanen	342.726.200
8	Sumatera Selatan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	1.048.328.842
9	Kalimantan Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	58.495.478
		Pagar Permanen	178.955.690

10	Kalimantan Timur	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.989.600.088
11	Sulawesi Tengah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	390.752.100
12	Bali	Pagar Permanen	235.248.438
13	Nusa Tenggara Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	212.115.956
		Pagar Permanen	332.005.396
14	Nusa Tenggara Timur	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	232.000.000
15	Papua	Bangunan Gedung Kantor Permanen	454.085.650
		Pagar Permanen	81.807.000
16	Gorontalo	Bangunan Gedung Kantor Permanen	243.745.221
17	Papua Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.978.406.980
		Pagar Permanen	294.333.080
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	425.694.651
Jumlah			45.076.789.128

Transaksi penyelesaian pembangunan dengan KDP pada mutasi Gedung dan Bangunan selama tahun 2023 sebesar Rp22.558.175.735,00. Rincian penyelesaian pembangunan dengan KDP pada mutasi Gedung dan Bangunan disajikan sebagai berikut.

Tabel 93
Rincian Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP Aset
Pada Gedung dan Bangunan Per Wilayah

No.	Wilayah/Satker	Nama Aset	Nilai (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Jawa Barat	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	193.900.000
2	Jawa Tengah	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.631.812.525
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	286.523.045
3	DI Yogyakarta	Bangunan Rumah Genset	66.711.000
4	Jawa Timur	Pagar Permanen	512.002.708
5	Aceh	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.811.414.171
		Bangunan Parkir Terbuka Permanen	120.000.000
6	Sumatera Utara	Bangunan Gedung Kantor Permanen	2.573.085.992
7	Sumatera Barat	Bangunan Gedung Kantor Permanen	3.195.127.473
8	Jambi	Rumah Negara Golongan II Tipe B Permanen	228.487.601
9	Sumatera Selatan	Bangunan Gedung Kantor Permanen	5.111.528.580
		Bangunan Tempat Parkir	198.942.000
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	420.020.000
10	Lampung	Pagar Permanen	597.633.933
11	Kalimantan Barat	Pagar Permanen	258.264.291
		Taman Lainnya	105.574.085
12	Kalimantan Tengah	Pagar Permanen	289.702.000
13	Sulawesi Selatan	Pagar Permanen	130.870.000
14	Sulawesi Tenggara	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	510.500.000
15	Maluku	Bangunan Gedung Kantor Permanen	287.117.000
16	Nusa Tenggara Barat	Gedung Pos Jaga Permanen	78.048.923
		Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	456.079.200
		Taman Permanen	989.736.008
17	Banten	Pagar Permanen	199.330.000
18	Papua Barat	Pagar Permanen	305.765.200
Jumlah			22.558.175.735

Selain nilai Gedung dan Bangunan tersebut di atas, terdapat Gedung dan Bangunan yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp1.043.048.660,00. Rincian Gedung dan Bangunan

yang masuk pada aset ekstrakomptabel terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Rincian kondisi barang untuk Aset Tetap Gedung dan Bangunan tersaji dalam Laporan Kondisi Barang yang merupakan lampiran pada laporan keuangan ini.

Aset Tetap Lainnya
Rp38.217.040.150,00

C.1.2.4 Aset Tetap Lainnya

Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp38.217.040.150,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2022 adalah Rp42.782.106.086,00. Adapun aset pada BPS yang masuk pada kelompok Aset Tetap Lainnya adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 94
Rincian Aset Tetap Lainnya

No.	Keterangan	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aset Tetap Dalam Renovasi	837.000.000	837.000.000	0
2	Aset Tetap Lainnya:			
	a. Bahan perpustakaan	37.135.938.440	41.701.004.376	(4.565.065.936)
	b. Barang bercorak kesenian/kebudayaan/olah raga	244.101.710	244.101.710	0
Jumlah		38.217.040.150	42.782.106.086	(4.565.065.936)

Aset Tetap Dalam Renovasi menurut Buletin Teknis Nomor 09 mengenai Akuntansi Aset Tetap merupakan biaya renovasi atas aset tetap yang bukan miliknya, dan biaya partisi suatu ruangan kantor yang bukan miliknya. Aset Tetap Dalam Renovasi yang dimiliki oleh BPS berupa Aset Tetap Tanah Dalam Renovasi pada BPS Kab. Sarmi sebesar Rp837.000.000.

Nilai buku Aset Tetap Lainnya pada tanggal pelaporan adalah Rp37.973.438.440,00. Nilai Buku Aset Tetap Lainnya diperoleh dengan mengurangi antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya sebesar Rp243.601.710,00. Perhitungan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini. Mutasi perubahan nilai Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2023 (akhir)	Rp	38.217.040.150
Saldo per 31 Desember 2022 (awal)	Rp	42.782.106.086
Mutasi Tambah/(Kurang)	(Rp)	4.565.065.936)
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Saldo Awal	Rp	2.299.631
Pembelian	Rp	57.211.000
Transfer Masuk	Rp	7.229.300
Reklasifikasi Masuk	Rp	14.230.000
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp	1.096.247.994
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	Rp	1.765.660.220

penggunaan aktif	
Pembatalan Penghapusan	Rp 19.150.889
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp 7.658.020
Perolehan Lainnya	Rp 8.782.684
Jumlah Mutasi Tambah	Rp 2.978.469.738
Mutasi Kurang	
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp 7.204.032.824)
Transfer Keluar	(Rp 7.229.300)
Koreksi Susulan	(Rp 178.000.000)
Reklasifikasi Keluar	(Rp 14.230.000)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(Rp 127.345.109)
Koreksi Manual	(Rp 1.573.000)
Koreksi Pencatatan	(Rp 11.125.441)
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp 7.543.535.674)
Jumlah Rincian Mutasi	(Rp 4.565.065.936)

Realisasi belanja modal lainnya sampai dengan 31 Desember 2023 secara netto sebesar Rp32.564.978.464,00. Realisasi belanja modal lainnya yang mempengaruhi mutasi nilai aset tetap lainnya, alokasi penggunaan belanja modal lainnya, dan perolehan aset tetap lainnya yang menggunakan selain belanja modal lainnya dijelaskan sebagai berikut:

Pembelian	Rp 57.211.000
Jumlah realisasi belanja modal lainnya pada mutasi nilai Aset Tetap Aset Tetap Lainnya	Rp 57.211.000
Penambahan:	
Realisasi belanja Modal Lainnya untuk perolehan Aset Tak Berwujud	Rp 17.245.720.000
Realisasi belanja Modal Lainnya untuk perolehan Peralatan dan Mesin	Rp 15.274.371.464
Jumlah Penambahan	Rp 32.520.091.464
Pengurangan:	
Realisasi Belanja Persediaan untuk perolehan Aset Tetap Lainnya	(Rp 12.324.000)
Jumlah Pengurangan	(Rp 12.324.000)
Lebih/(Kurang)	Rp 32.507.767.464
Realisasi belanja modal lainnya (neto)	Rp 32.564.978.464

Penjelasan rincian mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Penambahan dikarenakan adanya belanja modal lainnya yang digunakan untuk perolehan aset tak berwujud sebesar Rp17.245.720.000,00.
- Penambahan dikarenakan adanya belanja modal lainnya yang digunakan untuk perolehan peralatan dan mesin sebesar Rp15.274.371.464,00.
- Pengurangan karena adanya belanja persediaan yang digunakan untuk perolehat aset tetap lainnya sebesar Rp12.324.000,00.

Selain nilai Aset Tetap Lainnya tersebut di atas, terdapat Aset Tetap Lainnya yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp16.543.000,00. Rincian Aset Tetap Lainnya yang masuk pada aset ekstrakomptabel terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Konstruksi Dalam
Pengerjaan
Rp33.118.386.227,00

C.1.2.5 Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)

Nilai Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 adalah Rp33.118.386.227,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2022 adalah Rp28.019.577.278,00. Nilai KDP per 31 Desember 2023 per wilayah/satker adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 95
Rincian KDP Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	228.396.800	13.931.816.778	(13.703.419.978)
2	Jawa Barat	942.003.062	0	942.003.062
3	Jawa Tengah	0	2.631.812.525	(2.631.812.525)
4	Jawa Timur	1.965.141.618	0	1.965.141.618
5	Sumatera Utara	3.102.586.812	2.032.226.511	1.070.360.301
6	Sumatera Barat	1.467.154.928	0	1.467.154.928
7	Sumatera Selatan	1.897.347.784	1.815.261.416	82.086.368
8	Lampung	1.139.298.250	0	1.139.298.250
9	Kalimantan Tengah	2.278.630.029	0	2.278.630.029
10	Kalimantan Timur	3.201.024.288	0	3.201.024.288
11	Sulawesi Utara	2.492.833.732	227.500.000	2.265.333.732
12	Sulawesi Tengah	1.442.450.161	0	1.442.450.161
13	Sulawesi Selatan	233.880.675	0	233.880.675
14	Papua	371.995.152	0	371.995.152
15	Bengkulu	0	65.900.000	(65.900.000)
16	Kep. Bangka Belitung	2.210.081.068	0	2.210.081.068
17	Papua Barat	0	222.657.962	(222.657.962)
18	Kalimantan Utara	10.145.561.868	7.092.402.086	3.053.159.782
Jumlah		33.118.386.227	28.019.577.278	5.098.808.949

Kondisi Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 96
Kondisi KDP Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	Dilanjutkan (Rp)	Dihentikan sementara (Rp)	Dihentikan Permanen (Rp)	Total (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Settama	228.396.800	0	0	228.396.800
2	Jawa Barat	942.003.062	0	0	942.003.062
3	Jawa Timur	1.965.141.618	0	0	1.965.141.618
4	Sumatera Utara	3.102.586.812	0	0	3.102.586.812
5	Sumatera Barat	1.467.154.928	0	0	1.467.154.928
6	Sumatera Selatan	1.897.347.784	0	0	1.897.347.784
7	Lampung	1.124.453.033	14.845.217	0	1.139.298.250
8	Kalimantan Tengah	2.278.630.029	0	0	2.278.630.029
9	Kalimantan Timur	3.201.024.288	0	0	3.201.024.288
10	Sulawesi Utara	2.461.333.732	0	31.500.000	2.492.833.732
11	Sulawesi Tengah	1.442.450.161	0	0	1.442.450.161
12	Sulawesi Selatan	0	233.880.675	0	233.880.675
13	Papua	371.995.152	0	0	371.995.152
14	Kepulauan Bangka Belitung	2.210.081.068	0	0	2.210.081.068
15	Kalimantan Utara	10.145.561.868	0	0	10.145.561.868
Jumlah		32.838.160.335	248.725.892	31.500.000	33.118.386.227

Mutasi perubahan nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023 (akhir)	Rp	33.118.386.227
Saldo per 31 Desember 2022 (awal)	Rp	28.019.577.278
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	5.098.808.949
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Saldo Awal KDP	Rp	196.000.000
Reklasifikasi Masuk KDP	Rp	238.365.900
Pengembangan KDP	Rp	74.931.962.156
Koreksi Nilai KDP Bertambah	Rp	6.205.402.616
Perolehan Lainnya KDP	Rp	7.452.914.047
Perolehan/Penambahan KDP	Rp	16.209.116.550
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	105.233.761.269
Mutasi Kurang		
Reklasifikasi Keluar KDP	(Rp	238.365.900)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	(Rp	6.885.409.756)
Koreksi Pencatatan KDP	(Rp	6.919.060.154)
Penghapusan/Penghentian KDP	(Rp	74.408.702)
Pengembangan Melalui KDP	(Rp	45.504.218.128)
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	(Rp	40.513.489.680)
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp	100.134.952.320)
Jumlah Rincian Mutasi	Rp	5.098.808.949

Penjelasan terinci terkait dengan KDP lebih lanjut tersaji dalam Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan **C.1.2.6 Akumulasi Penyusutan**

Rp2.229.013.665.874,00

Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 adalah Rp2.229.013.665.874,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2022 adalah Rp2.173.568.859.432,00. Secara ringkas perubahan saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan sebagai berikut.

Tabel 97
Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Peralatan dan Mesin	1.846.664.649.276	1.848.768.918.546	(2.104.269.270)
Gedung dan Bangunan	382.105.414.888	324.556.339.176	57.549.075.712
Aset Tetap Lainnya	243.601.710	243.601.710	0
Jumlah	2.229.013.665.874	2.173.568.859.432	55.444.806.442

Rincian Nilai Buku Aset Tetap yang berasal dari nilai perolehan Aset Tetap setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2023 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 98
Rincian Nilai Buku Aset Tetap

No.	Aset Tetap	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan (Rp)	Nilai Buku (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Peralatan dan Mesin	2.183.257.236.943	1.846.668.632.440	336.588.604.503
2	Gedung dan Bangunan	2.030.816.486.155	382.340.491.313	1.648.475.994.842
3	Aset Tetap Lainnya	38.217.040.150	243.601.710	37.973.438.440
Jumlah		4.252.290.763.248	2.229.252.725.463	2.023.038.037.785

Perhitungan mutasi nilai Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023 (akhir)	Rp	2.229.013.665.874
Saldo per 31 Desember 2022 (awal)	Rp	2.173.568.859.432
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	55.444.806.442
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Saldo Awal	Rp	3.278.050.294
Pembelian	Rp	9.921.124
Transfer Masuk	Rp	20.992.436.197
Reklasifikasi Masuk	Rp	6.920.049.661
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Rp	95.323.370
Penyusutan Aset Tetap	Rp	210.469.858.960
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	12.240.375.520
Pengembangan Melalui KDP	Rp	11.099.931
Penyelesaian Pembangunan Dengan KDP	Rp	31.951.275
Koreksi Manual	Rp	4.859.237
Pembatalan Penghapusan	Rp	1.084.934.790
Perolehan Lainnya	Rp	2.452.915
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Rp	8.213.790.825
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	263.355.104.099
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	(Rp)	21.075.166.225)
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	6.203.039.628)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	(Rp)	49.528.940)
Hibah Keluar	(Rp)	299.141.710)
Penghapusan	(Rp)	53.178.000)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	(Rp)	1.293.914.819)
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp)	178.818.322.258)
Koreksi Pencatatan	(Rp)	118.006.077)
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp)	207.910.297.657)
Jumlah Rincian Mutasi	Rp	55.444.806.442

Nilai Akumulasi Penyusutan pada Neraca Laporan Keuangan dibandingkan dengan Laporan Barang Milik Negara dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 99
Perbandingan Akumulasi Penyusutan antara Neraca dan Laporan BMN
Per 31 Desember 2023

Uraian	Neraca (Rp)	SIMAK BMN (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Peralatan dan Mesin	1.846.664.649.276	1.846.664.649.276	0
Gedung dan Bangunan	382.105.414.888	382.105.414.888	0
Aset Tetap Lainnya	243.601.710	243.601.710	0
Jumlah	2.229.013.665.874	2.229.013.665.874	0

Tidak terdapat perbedaan nilai Akumulasi Penyusutan antara Laporan Barang Milik Negara dengan Laporan Keuangan per 31 Desember 2023.

Piutang Jangka Panjang

Rp6.276.274,00

Tagihan Tuntutan Perbendaharaan / Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Rp6.307.813,00

C.1.3 Piutang Jangka Panjang

C.1.3.1 Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Nilai Piutang Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) per 31 Desember 2023 adalah Rp6.307.813,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2022 adalah Rp189.728.799,00. Piutang Tuntutan Perbendaharaan adalah tagihan kepada bendahara akibat kelalaiannya atau tindakannya yang melanggar hukum yang mengakibatkan kerugian negara. Sedangkan Piutang Tuntutan Ganti Rugi adalah tagihan kepada pegawai bukan bendahara untuk penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara karena kelalaiannya. Saldo ini merupakan Piutang Tagihan TP/TGR yang belum dilimpahkan ke KPKNL dan pelunasannya di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya setelah tanggal pelaporan.

Sebagaimana pada akun Piutang Bukan Pajak dan Bagian Lancar Tagihan TP/TGR maka penerapan penyisihan piutang tidak tertagih juga terjadi pada akun Tagihan TP/TGR. Hal ini disebabkan Piutang Tagihan TP/TGR merupakan akun Piutang yang bersifat jangka panjang.

Penetapan kerugian negara terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara di lingkungan BPS dilakukan berdasarkan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak (SKTJM) atau Surat Keputusan Pembebanan sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI Nomor 38 Tahun 2016 tentang Tata Cara Tuntutan Ganti Kerugian Negara/Daerah Terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara Atau Pejabat Lain.

Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.307.813,00 merupakan nilai Piutang Tagihan TP/TGR dari debitur yang sudah melalui proses telah ditetapkan oleh tim TPKN BPS. Nilai Piutang Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 tidak ada yang dilimpahkan ke KPKNL. Daftar saldo Piutang Tagihan TP/TGR per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 100
Rincian Piutang Tagihan TP/TGR Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Settama	6.307.813	189.728.799
Jumlah		6.307.813	189.728.799

Saldo Piutang Tagihan TP/TGR dijelaskan secara terinci dalam kategori jenis kasus dalam tabel berikut ini.

Tabel 101
Rincian Transaksi Piutang Tagihan TP/TGR

No.	Uraian	31-Des-23 (Rp)
(1)	(2)	(3)
1	Kehilangan/Kecurian Kendaraan Dinas Roda 2	3.925.000
2	Kehilangan Inventaris Kantor	2.382.813
Jumlah		6.307.813

Rincian debitur Piutang Tagihan TP/TGR disajikan Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

*Penyisihan Piutang
Tidak Tertagih -
Tagihan Tuntutan
Perbendaharaan /
Tuntutan Ganti Rugi
Rp31.539,00*

C.1.3.2 Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/ Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp31.539,00 dan Rp18.687.880,00. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR merupakan estimasi atas ketidaktertagihan Tagihan TP/TGR yang ditentukan oleh kualitas masing-masing piutang. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih diterapkan untuk mengetahui nilai realisasi bersih dari Piutang. Pembentukan Penyisihan Piutang Tidak Tertagih ini berdasarkan kualitas Piutang pada setiap tanggal pelaporan.

Rincian saldo Penyisihan Piutang Tidak Tertagih-Tagihan TP/TGR merupakan nilai penyisihan dari satker Settama yaitu sebesar Rp31.539,00 dengan kualitas piutang lancar.

*Aset Lainnya
Rp99.404.789.554,00*

C.1.4 Aset Lainnya

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp99.404.789.554,00 dan Rp68.425.088.905,00. Rincian nilai Aset Lainnya pada tanggal pelaporan tersaji seperti dalam tabel berikut ini.

Tabel 102
Rincian Aset Lainnya

No.	Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Aset Tak berwujud	409.256.575.075	390.531.435.503	18.725.139.572
2	Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	54.066.534.264	0	54.066.534.264
3	Aset Lain-lain	140.593.954.423	286.977.715.708	(146.383.761.285)
Jumlah		603.917.063.762	677.509.151.211	(73.592.087.449)
1	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya	(504.512.274.208)	(609.084.062.306)	104.571.788.098
Nilai Buku Aset Lainnya		99.404.789.554	68.425.088.905	30.979.700.649

Penjelasan mengenai rincian mutasi perubahan Aset Lainnya yang terdiri dari Aset Tak Berwujud dan Aset Lain-lain akan dijelaskan dalam penjelasan per akun.

Aset Tak Berwujud
Rp409.256.575.075,00

C.1.4.1 Aset Tak Berwujud

Nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah Rp409.256.575.075,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2022 adalah Rp390.531.435.503,00. Rincian perubahan saldo Aset Tak Berwujud disajikan sebagai berikut.

Tabel 103
Perubahan Saldo Aset Tak Berwujud Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Software	312.169.757.032	293.345.529.460	18.824.227.572
Lisensi	97.086.818.043	97.185.906.043	(99.088.000)
Jumlah	409.256.575.075	390.531.435.503	18.725.139.572

Nilai buku Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah Rp20.401.860.461,00. Nilai Buku Aset Tak Berwujud diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan akumulasi amortisasinya yang sebesar Rp388.854.714.614,00.

Mutasi perubahan nilai Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023 (akhir)	Rp	409.256.575.075
Saldo per 31 Desember 2022 (awal)	Rp	390.531.435.503
Mutasi Tambah/(Kurang)	Rp	18.725.139.572
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Pembelian	Rp	17.251.789.000
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	1.915.453.500
Transfer Masuk	Rp	89.950.000
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	19.257.192.500
Mutasi Kurang		
Transfer Keluar	(Rp)	89.950.000)

Reklasifikasi Keluar	(Rp 69.630.000)		
Penghentian Aset dari Penggunaan	(Rp 372.472.928)		
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp 532.052.928)		
Jumlah Rincian Mutasi		Rp	18.725.139.572

Berdasarkan rincian mutasi di atas, penambahan aset tetap tak berwujud salah satunya berasal dari pembelian sebesar Rp17.251.789.000,00. Pembelian ini menggunakan belanja modal peralatan mesin dan belanja modal lainnya dengan penjelasan sebagai berikut:

Pembelian		Rp	17.251.789.000
Jumlah realisasi belanja modal lainnya pada mutasi nilai Aset Tak Berwujud		Rp	17.251.789.000
Penambahan:			
Jumlah Penambahan	Rp		0
Pengurangan:			
Realisasi belanja Modal Lainnya untuk perolehan Aset Tak Berwujud	(Rp 17.245.720.000)		
Realisasi belanja Modal Peralatan dan Mesin untuk perolehan Aset Tak Berwujud	(Rp 6.069.000)		
Jumlah Pengurangan	(Rp 17.251.789.000)		
Lebih/(Kurang)		(Rp)	17.251.789.000)
Realisasi belanja modal aset tetap tak berwujud (neto)		Rp	0

Penjelasan rincian mutasi penambahan dan pengurangan adalah sebagai berikut:

- Pengurangan dikarenakan adanya belanja modal lainnya yang digunakan untuk perolehan aset tak berwujud sebesar Rp17.245.720.000,00.
- Pengurangan dikarenakan adanya belanja modal peralatan dan mesin yang digunakan untuk perolehan aset tak berwujud sebesar Rp6.069.000,00.

Dana Yang Dibatasi
Penggunaannya
Rp54.066.534.264,00

C.1.4.2 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp54.066.534.264,00 dan Rp0,00. Dana Yang Dibatasi Penggunaannya merupakan dana atas hak pemerintah, namun dibatasi penggunaannya atau yang terikat penggunaannya untuk membiayai kegiatan tertentu dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan sebagai akibat ketetapan/keputusan pemerintah. Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 merupakan dana pada RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) yang digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahkan pada akhir tahun 2023.

Rincian saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2023 per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 104
Rincian Dana Yang Dibatasi Penggunaannya Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	32.146.691.779	0	32.146.691.779

2	Polstat STIS	1.988.403.071	0	1.988.403.071
3	Jawa Tengah	930.068.442	0	930.068.442
4	Jawa Timur	1.698.833.970	0	1.698.833.970
5	Aceh	1.060.685.264	0	1.060.685.264
6	Sumatera Utara	2.622.353.642	0	2.622.353.642
7	Sumatera Barat	2.479.299.358	0	2.479.299.358
8	Sumatera Selatan	2.129.511.951	0	2.129.511.951
9	Lampung	1.631.927.627	0	1.631.927.627
10	Kalimantan Tengah	1.767.426.034	0	1.767.426.034
11	Kalimantan Timur	1.439.604.400	0	1.439.604.400
12	Sulawesi Utara	1.092.107.047	0	1.092.107.047
13	Sulawesi Tengah	1.105.246.840	0	1.105.246.840
14	Sulawesi Selatan	219.600.000	0	219.600.000
15	Sulawesi Tenggara	18.140.020	0	18.140.020
16	Papua	135.568.000	0	135.568.000
17	Banten	66.661.000	0	66.661.000
18	Bangka Belitung	816.640.756	0	816.640.756
19	Kalimantan Utara	717.765.063	0	717.765.063
Jumlah		54.066.534.264	0	54.066.534.264

Berkenaan dengan BAST atas realisasi RPATA TA 2023 terlampir pada lampiran pendukung I pada laporan keuangan ini.

Aset Lain-Lain

Rp140.593.954.423,00

C.1.4.3 Aset Lain-lain

Nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 adalah Rp140.593.954.423,00, sedangkan untuk per 31 Desember 2022 adalah Rp286.977.715.708,00. Pos Aset Lain-lain ini digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud. Nilai Aset Lain-lain tersebut diperoleh dari Aset Tetap yang rusak dan tidak dipergunakan kembali untuk operasional tetapi belum dilakukan penghapusan dan masih tercatat sebagai aset. Rincian perubahan saldo Aset Lain-Lain disajikan sebagai berikut.

Tabel 105
Perubahan Saldo Aset Lain-Lain Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	136.694.904.198	280.785.777.826	(144.090.873.628)
ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	3.899.050.225	6.191.937.882	(2.292.887.657)
Jumlah	140.593.954.423	286.977.715.708	(146.383.761.285)

Nilai buku Aset Lain-Lain pada tanggal pelaporan adalah Rp24.936.394.829,00. Nilai Buku Aset Lain-lain diperoleh dengan mengurangkan antara nilai perolehan dengan akumulasi penyusutannya yang sebesar Rp115.657.559.594,00. Perhitungan akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Perhitungan mutasi nilai Aset Lain-Lain per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut.

Saldo per 31 Desember 2023 (akhir)	Rp	140.593.954.423
Saldo per 31 Desember 2022 (awal)	Rp	286.977.715.708
Mutasi Tambah/(Kurang)	(Rp)	146.383.761.285)
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan	Rp	2.958.262.069
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	196.901.855.539
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	199.860.117.608
Mutasi Kurang		
Penghapusan	(Rp	13.674.205.516)
Transfer Keluar (BMN Yang Dihentikan)	(Rp	59.431.000)
Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan	(Rp	314.907.317.776)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(Rp	17.602.924.601)
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp)	346.243.878.893)
Jumlah Rincian Mutasi	(Rp)	146.383.761.285)

Selain nilai Aset Lain-lain tersebut di atas, terdapat Aset Lain-lain yang tidak tercatat di Neraca, namun dicatat secara ekstrakomptabel karena nilainya tidak memenuhi syarat kapitalisasi sebesar Rp136.694.904.198,00. Rincian Aset Lain-lain yang masuk pada aset ekstrakomptabel terdapat pada Lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan ini.

Akumulasi Penyusutan /
Amortisasi Aset Lainnya
Rp504.512.274.208,00

C.1.4.4 Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya

Nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 adalah Rp504.512.274.208,00 dan Rp609.084.062.306,00. Rincian perubahan saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya disajikan sebagai berikut.

Tabel 106
Perubahan Saldo Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya
Per 31 Desember 2023 dan 2022

Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
Akumulasi Amortisasi Software	292.537.516.664	264.137.950.125	28.399.566.539
Akumulasi Amortisasi Lisensi	96.317.197.950	95.863.893.187	453.304.763
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	111.777.999.169	243.020.846.862	(131.242.847.693)
Akumulasi Amortisasi ATB yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	3.879.560.425	6.061.372.132	(2.181.811.707)
Jumlah	504.512.274.208	609.084.062.306	(104.571.788.098)

Nilai Buku Aset Lainnya yang berasal dari nilai perolehan Aset Lainnya setelah dikurangi dengan Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 107
Rincian Nilai Buku Aset Lainnya

No.	Nama Akun	Nilai Perolehan (Rp)	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi (Rp)	Nilai Buku (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A.	Aset Tak Berwujud			
1.	Software	312.169.757.032	292.537.516.664	19.632.240.368
2.	Lisensi	97.086.818.043	96.317.197.950	769.620.093
Jumlah		409.256.575.075	388.854.714.614	20.401.860.461
B.	Aset Lain-Lain			
1.	Aset Tetap Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	136.694.904.198	111.777.999.169	24.916.905.029
2.	ATB Yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	3.899.050.225	3.879.560.425	19.489.800
Jumlah		140.593.954.423	115.657.559.594	24.936.394.829
Total		549.850.529.498	504.512.274.208	45.338.255.290

Amortisasi Aset Tak Berwujud yang disajikan dalam laporan keuangan ini menggunakan metode amortisasi garis lurus tanpa memperhitungkan nilai residu/sisa. Hal ini untuk menyajikan Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat terbatas. Untuk Aset Tak Berwujud dengan masa manfaat tak terbatas tidak dilakukan amortisasi. Dasar perhitungan amortisasi Aset Tak Berwujud adalah menggunakan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 620/KMK.06/2016 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat.

Perhitungan mutasi nilai Akumulasi Penyusutan/Amortisasi Aset Lainnya per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Saldo per 31 Desember 2023 (akhir)	Rp	504.512.274.208
Saldo per 31 Desember 2022 (awal)	Rp	609.084.062.306
Mutasi Tambah/(Kurang)	(Rp)	104.571.788.098)
Rincian Mutasi		
Mutasi Tambah		
Transfer Masuk	Rp	78.706.250
Penyusutan Aset Tetap	Rp	28.397.710.088
Penghentian Aset dari Penggunaan	Rp	178.818.322.258
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Rp	1.909.028.500
Pencatatan Pembatalan Barang yang Mau Dihapuskan	Rp	2.891.793.237
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	212.095.560.333
Mutasi Kurang		
Penghapusan	(Rp)	10.967.041.665)
Transfer Keluar	(Rp)	78.706.250)
Reklasifikasi Keluar	(Rp)	69.630.000)
Pencatatan Barang yang mau Dihapuskan	(Rp)	291.402.566.496)

Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	(Rp 14.149.404.020)
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp 316.667.348.431)
Jumlah Rincian Mutasi	(Rp 104.571.788.098)

C.2 KEWAJIBAN

Kewajiban Jangka Pendek

Rp131.279.754.724,00

C.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Nilai Kewajiban Jangka Pendek per 31 Desember 2023 dan 2022 tersaji sebesar Rp131.279.754.724,00 dan Rp91.537.986.794,00. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran sumber daya ekonomi pemerintah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak yang terjadi di masa lalu. Kewajiban diklasifikasikan menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Adapun Kewajiban yang tersaji pada Laporan Keuangan BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 hanya terklasifikasi sebagai Kewajiban Jangka Pendek.

Kewajiban Jangka Pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup utang yang berasal dari pinjaman (bagian lancar utang jangka panjang dan utang pada pihak ketiga), utang bunga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), serta utang jangka pendek lainnya.

Rincian Kewajiban Jangka Pendek tersaji pada tabel berikut ini.

Tabel 108
Rincian Kewajiban Jangka Pendek

No.	Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Utang Kepada Pihak Ketiga	130.892.802.867	90.985.070.100	39.907.732.767
2	Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan	963.849	573.343	390.506
3	Pendapatan Diterima Dimuka	367.660.163	447.546.691	(79.886.528)
4	Uang Muka dari KPPN	0	89.371.020	(89.371.020)
5	Utang Jangka Pendek Lainnya	18.327.845	15.425.640	2.902.205
Jumlah		131.279.754.724	91.537.986.794	39.741.767.930

Utang Kepada Pihak Ketiga

Rp130.892.802.867,00

C.2.1.1 Utang Kepada Pihak Ketiga

Saldo Utang Kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp130.892.802.867,00 dan Rp90.985.070.100,00. Saldo Utang kepada Pihak Ketiga ini mengungkapkan kewajiban pemerintah yang masih harus diakui karena telah diterimanya

hak dari pihak ketiga yang terjadi pada saat tanggal neraca. Rincian saldo utang pihak ketiga tersaji pada tabel berikut:

Tabel 109
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga

No.	Uraian	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	88.918.777.011	86.276.216.106
2	Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	6.226.577.232	4.518.576.329
3	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	181.276.320
4	Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya	35.747.448.624	9.001.345
Jumlah		130.892.802.867	90.985.070.100

Saldo Utang pada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 pada Neraca berasal dari Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pengeluaran Transito Yang Masih Harus Dibayar, dan Utang Kepada Pihak Ketiga Lainnya. Saldo Utang Pihak Ketiga pada Neraca per 31 Desember 2023 berupa Belanja yang Masih Harus Dibayar merupakan kewajiban entitas yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima entitas, namun sampai pada akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan atas hal tersebut kepada pegawai (belanja pegawai berupa tunjangan kinerja bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024) dan/atau pihak ketiga selaku penyedia barang/jasa (belanja barang dan belanja modal). Daftar Saldo Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2023 per wilayah/satker adalah terinci dalam tabel di bawah ini.

Tabel 110
Rincian Utang Kepada Pihak Ketiga Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	Utang Pihak Ketiga (Rp)		
		Belanja Pegawai YMHD	Belanja Barang YMHD	Utang Pihak Ketiga Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	9.504.740.009	2.859.016.882	25.345.823.215
2	Pusdiklat BPS	487.139.091	45.916.917	0
3	Polstat STIS	834.644.495	118.027.217	1.988.403.071
4	DKI Jakarta	1.254.377.899	88.069.654	965.200
5	Jawa Barat	4.852.015.090	186.700.466	0
6	Jawa Tengah	6.916.011.416	289.673.413	930.068.442
7	DI Yogyakarta	1.636.774.700	63.600.184	0
8	Jawa Timur	5.951.855.888	362.821.558	85.256.457
9	Aceh	2.929.466.155	26.924.010	1.060.685.264
10	Sumatera Utara	4.427.072.626	197.452.210	301.948.198
11	Sumatera Barat	2.629.886.937	140.632.772	1.367.139.015
12	Riau	2.047.069.865	95.897.672	0
13	Jambi	1.650.220.670	84.835.820	0
14	Sumatera Selatan	2.723.226.980	143.097.669	1.107.924.430
15	Lampung	2.438.846.554	98.758.302	238.107.471
16	Kalimantan Barat	2.156.953.208	93.648.835	0
17	Kalimantan Tengah	1.839.738.882	95.263.899	746.032.019
18	Kalimantan Selatan	2.084.931.022	150.338.406	0
19	Kalimantan Timur	1.646.908.975	69.936.512	1.116.830.040

No.	Wilayah/Satker	Utang Pihak Ketiga (Rp)		
		Belanja Pegawai YMHD	Belanja Barang YMHD	Utang Pihak Ketiga Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
20	Sulawesi Utara	1.814.724.522	56.113.387	566.107.200
21	Sulawesi Tengah	1.772.634.909	78.305.029	0
22	Sulawesi Selatan	3.556.589.538	175.762.746	219.600.000
23	Sulawesi Tenggara	2.211.142.058	109.325.804	18.140.020
24	Maluku	1.652.409.846	1.215.300	0
25	Bali	1.541.566.245	45.716.011	0
26	NTB	1.468.923.957	21.183.502	0
27	NTT	2.813.530.663	62.928.489	0
28	Papua	2.619.628.355	67.724.915	135.568.000
29	Bengkulu	1.685.494.204	13.445.440	0
30	Maluku Utara	1.436.180.472	63.536.244	0
31	Banten	1.570.381.567	74.525.305	66.661.000
32	Kep. Babel	1.278.433.717	61.351.426	0
33	Gorontalo	954.273.718	3.346.900	0
34	Kep. Riau	1.246.906.495	66.306.440	0
35	Papua Barat	1.462.816.192	40.321.526	0
36	Sulawesi Barat	1.055.616.749	38.145.248	0
37	Kalimantan Utara	765.643.342	36.711.122	452.189.582
Jumlah		88.918.777.011	6.226.577.232	35.747.448.624

Utang Kelebihan
Pembayaran
Pendapatan Non
Pajak
Rp963.849,00

C.2.1.2 Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak

Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp963.849,00 dan Rp573.343,00. Saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak ini merupakan hasil pencatatan utang atas kelebihan pendapatan non pajak lainnya. Saldo pada akun ini berasal dari kelebihan penyeteroran pendapatan sewa atas rumah dinas, sehingga kelebihan setoran tersebut akan dikembalikan kepada pihak ketiga.

Rincian saldo Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak per 31 Desember 2023 adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 111
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Jawa Tengah	316.389	0	316.389
2	Jawa Timur	0	573.343	(573.343)
3	Papua Barat	647.460	0	647.460
Jumlah		963.849	573.343	390.506

Pendapatan Yang
Diterima Dimuka
Rp367.660.163,00

C.2.1.3 Pendapatan Yang Diterima Dimuka

Saldo Pendapatan yang Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp367.660.163,00 dan Rp447.546.691,00. Pendapatan yang Diterima

Dimuka merupakan pendapatan yang diterima oleh pemerintah dan sudah disetor ke Kas Negara, namun wajib setor belum menikmati barang/jasa/fasilitas dari pemerintah.

Rincian saldo Pendapatan yang Diterima Dimuka per 31 Desember 2023 adalah tersaji dalam tabel berikut ini.

Tabel 112
Rincian Pendapatan Diterima Dimuka Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Settama	253.887.275	141.025.599	112.861.676
2	Polstat STIS	21.305.664	33.991.746	(12.686.082)
3	Jawa Tengah	2.867.245	7.363.139	(4.495.894)
4	DI Yogyakarta	4.253.500	1.199.343	3.054.157
5	Jawa Timur	529.401	334.950	194.451
6	Aceh	1.511.956	4.549.946	(3.037.990)
7	Sumatera Utara	404.424	0	404.424
8	Sumatera Barat	17.279.632	0	17.279.632
9	Sumatera Selatan	8.785.000	2.793.771	5.991.229
10	Lampung	51.950.996	255.844.689	(203.893.693)
11	Kalimantan Selatan	2.768.978	367.883	2.401.095
12	Sulawesi Tenggara	1.347.114	75.625	1.271.489
13	Nusa Tenggara Timur	768.978	0	768.978
Jumlah		367.660.163	447.546.691	(79.886.528)

Saldo Pendapatan yang diterima dimuka per 31 Desember 2023 terdapat pada:

1. Settama. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp253.887.275,00. Saldo tersebut terdiri dari penerimaan sewa tempat untuk Kantor Kas BRI dan ATM Bank BRI dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan 31 Mei 2026 dengan nilai sewa yang belum dijalani sebesar Rp235.634.026,00, penerimaan sewa tempat untuk ATM Bank Mandiri dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan 31 Juli 2024 dengan nilai sewa yang belum dijalani sebesar Rp11.426.789,00, penerimaan sewa tempat untuk kantin dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 1 Maret 2023 sampai dengan 29 Februari 2024 dengan nilai sewa yang belum dijalani sebesar Rp5.698.361,00, dan penerimaan sewa tempat untuk kantin dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 1 November 2023 sampai dengan 29 Februari 2024 dengan nilai sewa yang belum dijalani sebesar Rp1.128.009,00.
2. Polstat STIS. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp21.305.664,00. Saldo tersebut terdiri dari penerimaan sewa tempat untuk ATM Bank BRI dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 4 September 2024.
3. Jawa Tengah. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp2.867.245,00. Saldo tersebut terdiri dari penerimaan sewa tempat untuk kantin dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 11 Agustus 2021 sampai dengan 10

Agustus 2024, dengan nilai sewa yang belum dijalani sebesar Rp1.526.004,00 dan penerimaan sewa tempat untuk koperasi dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 2 September 2021 sampai dengan 1 September 2024, dengan nilai sewa yang belum dijalani sebesar Rp1.341.241,00.

4. DI Yogyakarta. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp4.253.500,00 pada BPS Provinsi DI Yogyakarta. Saldo tersebut merupakan penerimaan sewa tempat untuk koperasi dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026.
5. Jawa Timur. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp529.401,00 pada BPS Provinsi Jawa Timur. Saldo tersebut merupakan penerimaan sewa tempat untuk koperasi dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 3 Februari 2023 sampai dengan 2 Februari 2024.
6. Aceh. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga yang nilainya sebesar Rp1.511.956,00 pada BPS Provinsi Aceh. Saldo ini merupakan penerimaan sewa ruangan untuk kantor koperasi dengan periode sewa 1 Juli 2021 sampai dengan 30 Juni 2024.
7. Sumatera Utara. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp404.424,00 pada BPS Kota Tanjung Balai. Saldo tersebut merupakan penerimaan sewa tanah dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2023 sampai dengan 30 September 2024.
8. Sumatera Barat. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp17.279.632,00 pada BPS Provinsi Sumatera Barat. Saldo tersebut merupakan penerimaan sewa tempat untuk koperasi dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 21 Mei 2022 sampai dengan 20 Mei 2027.
9. Sumatera Selatan. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp8.785.000,00 pada BPS Provinsi Sumatera Selatan. Saldo tersebut merupakan penerimaan sewa tempat untuk koperasi dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2026.
10. Lampung. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp51.950.996,00 pada BPS Kota Metro. Saldo tersebut merupakan penerimaan sewa kantor dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 3 April 2022 sampai dengan 2 April 2024.
11. Kalimantan Selatan. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp2.768.978,00 pada BPS Provinsi Kalimantan Selatan. Saldo tersebut merupakan penerimaan sewa tempat untuk koperasi dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 23 April 2023 sampai dengan 22 April 2026.
12. Sulawesi Tenggara. Saldo merupakan sisa sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga dengan nilai sebesar Rp1.347.114,00 pada BPS Provinsi Sulawesi Tenggara. Saldo tersebut merupakan penerimaan sewa tempat untuk koperasi dengan periode sewa terhitung mulai tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2025.

13. Nusa Tenggara Timur. Saldo merupakan nilai sewa yang belum dijalani oleh pihak ketiga yang nilainya sebesar Rp1.938.333,00 pada BPS Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saldo ini merupakan penerimaan sewa ruangan untuk kantin dengan masa sewa berlaku dari tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 April 2024.

Uang Muka Dari
KPPN
Rp0,00

C.2.1.4 Uang Muka dari KPPN

Saldo Uang Muka dari KPPN per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp89.371.020,00. Uang Muka dari KUN merupakan UP/TUP yang diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan sebagai Kas di Bendahara Pengeluaran.

Utang Jangka Pendek
lainnya
Rp18.327.845,00

C.2.1.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp18.327.845,00 dan Rp15.425.640,00. Utang Jangka Pendek Lainnya digunakan untuk mencatat potongan pajak yang dipotong oleh Bendahara Pengeluaran dan belum disetor ke Kas Negara sampai tanggal pelaporan.

Rincian saldo Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2023 adalah tersaji dalam tabel di bawah ini.

Tabel 113
Rincian Utang Jangka Pendek Lainnya Per Wilayah/Satker

No.	Wilayah/Satker	31-Des-23 (Rp)	31-Des-22 (Rp)	Kenaikan/(Penurunan) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	DKI Jakarta	0	10.200	(10.200)
2	Jawa Tengah	0	359.580	(359.580)
3	Riau	0	15.055.860	(15.055.860)
4	Kalimantan Barat	1.735.494	0	1.735.494
5	Nusa Tenggara Timur	15.154.742	0	15.154.742
6	Maluku Utara	1.320.041	0	1.320.041
7	Kepulauan Riau	117.568	0	117.568
Jumlah		18.327.845	15.425.640	2.902.205

C.3 EKUITAS

Ekuitas
Rp5.297.290.032.446,00

C.3.1 Ekuitas

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp5.297.290.032.446,00 dan Rp5.331.160.728.411,00. Ekuitas merupakan kekayaan bersih

entitas yang berasal dari selisih antara Aset dan Kewajiban. Saldo Ekuitas per 31 Desember 2023 berasal dari saldo akhir Ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL**D.1 PENDAPATAN OPERASIONAL****D.1.1 PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK**

Pendapatan Negara Bukan Pajak merupakan hak pemerintah yang tidak berasal dari perpajakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 berasal dari Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya sebesar Rp351.788.792.656,00.

Pendapatan Negara
Bukan Pajak Lainnya
Rp351.788.792.656,00

D.1.1.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya

Saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp351.788.792.656,00 dan Rp21.366.306.307,00. Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 114
Rincian PNBP Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.853.612.755	2.436.872.287
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	6.364.500.000	5.481.000.000
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	74.200.000	0
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	4.023.500.000	1.577.560.000
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	331.509.133.000	2.724.476.151
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	5.983.169.133	6.668.764.765
425764	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	0	56.387
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	903.364.362	2.159.680.588
425839	Pendapatan Denda Lainnya	41.143.278	111.127.049
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	36.170.128	206.769.080
Jumlah		351.788.792.656	21.366.306.307

Perbandingan saldo Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 115
Perbandingan PNBP Lainnya LO dan LRA Per 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	2.853.612.755	2.648.101.717	205.511.038
425411	Pendapatan Ujian/Seleksi Masuk Pendidikan	6.364.500.000	6.364.500.000	0
425412	Pendapatan Biaya Pendidikan	74.200.000	70.525.000	3.675.000
425421	Pendapatan Layanan Pendidikan dan/atau Pelatihan	4.023.500.000	4.023.500.000	0

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
425432	Pendapatan Layanan Survey dan Pemetaan	331.509.133.000	331.509.133.000	0
425435	Pendapatan Hasil Survey dan Pemetaan	5.983.169.133	5.983.169.133	0
425811	Pendapatan Denda Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	903.364.362	1.032.935.345	(129.570.983)
425839	Pendapatan Denda Lainnya	41.143.278	42.501.278	(1.358.000)
425991	Pendapatan Kembali Persekot/Uang Muka Gaji	0	2.686.492	(2.686.492)
425999	Pendapatan Anggaran Lain-lain	36.170.128	36.026.100	144.028
Jumlah		351.788.792.656	351.713.078.065	75.714.591

Rincian penjelasan perbedaan nilai PNBP Lainnya pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut.

PNBP Lainnya - LO	Rp	351.788.792.656
PNBP Lainnya - LRA	Rp	351.713.078.065
Selisih	Rp	75.714.591
Rincian Selisih		
Mutasi Tambah		
Pendapatan Sewa Diterima Dimuka	Rp	79.886.528
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	Rp	58.350.727
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	Rp	182.873.409
Dana Pihak Ketiga	Rp	3.186.613
Jumlah Mutasi Tambah	Rp	324.297.277
Mutasi Kurang		
Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak	(Rp	248.192.180)
Utang Kelebihan Pembayaran Pendapatan Non Pajak	(Rp	390.506)
Jumlah Mutasi Kurang	(Rp	248.582.686)
Rincian Selisih	Rp	75.714.591

D.2 BEBAN OPERASIONAL

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Saldo Beban Operasional untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 berasal dari Beban Pegawai, Beban Persediaan, Beban Barang dan Jasa, Beban Pemeliharaan, Beban Perjalanan Dinas, Beban Penyusutan dan Amortisasi, serta Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih.

Beban Pegawai
Rp2.322.159.157.238,00

D.2.1 Beban Pegawai

Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi dalam bentuk uang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah dan belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal. Saldo Beban Pegawai pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.322.159.157.238,00 dan Rp2.287.085.450.501,00. Rincian Beban Pegawai untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 116
Rincian Beban Pegawai Per 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	805.950.317.284	781.246.016.363
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.171.927	12.020.883
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	50.268.457.042	49.765.245.952
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	15.383.960.573	15.332.413.460
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	15.609.010.553	17.956.831.985
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	112.025.001.643	130.401.837.264
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	2.978.651.725	4.965.159.528
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	43.467.694.590	43.158.886.074
511129	Beban Uang Makan PNS	111.225.143.866	117.670.688.700
511135	Beban Tunj. Daerah Terpencil/Sangat Terpencil PNS	439.325.000	409.775.000
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	4.104.470.000	3.868.150.000
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	12.464.008.022	15.057.175.437
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	2.144.874.951	1.954.153.391
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	415.042.600	0
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	9.060	0
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	17.817.560	0
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3.476.782	0
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	68.640.000	0
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	19.263.720	0
511628	Beban Uang Makan PPPK	89.188.450	0
512211	Beban Uang Lembur	34.997.352.950	23.732.810.300
512212	Beban Uang Lembur PPPK	1.694.000	0
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.109.905.538.122	1.081.554.286.164
512414	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	567.046.818	0
Jumlah		2.322.159.157.238	2.287.085.450.501

Perbandingan saldo Beban Pegawai pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut.

Tabel 117
Perbandingan Beban Pegawai LO dan LRA Per 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
511111	Beban Gaji Pokok PNS	805.950.317.284	805.855.822.916	94.494.368
511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	13.171.927	13.159.369	12.558
511121	Beban Tunjangan Suami/Istri PNS	50.268.457.042	50.285.320.655	(16.863.613)
511122	Beban Tunjangan Anak PNS	15.383.960.573	15.383.039.911	920.662
511123	Beban Tunjangan Struktural PNS	15.609.010.553	15.610.066.665	(1.056.112)
511124	Beban Tunjangan Fungsional PNS	112.025.001.643	112.433.176.559	(408.174.916)
511125	Beban Tunjangan PPh PNS	2.978.651.725	2.982.831.400	(4.179.675)
511126	Beban Tunjangan Beras PNS	43.467.694.590	43.463.204.550	4.490.040
511129	Beban Uang Makan PNS	111.225.143.866	112.284.002.036	(1.058.858.170)
511135	Beban Tunj. Daerah	439.325.000	439.325.000	0

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
	Terpencil/Sangat Terpencil PNS			
511138	Beban Tunjangan Khusus Papua PNS	4.104.470.000	4.104.520.000	(50.000)
511151	Beban Tunjangan Umum PNS	12.464.008.022	12.467.127.322	(3.119.300)
511153	Beban Tunjangan Profesi Dosen	2.144.874.951	2.130.711.416	14.163.535
511611	Beban Gaji Pokok PPPK	415.042.600	415.042.600	0
511619	Beban Pembulatan Gaji PPPK	9.060	9.060	0
511621	Beban Tunjangan Suami/Istri PPPK	17.817.560	17.817.560	0
511622	Beban Tunjangan Anak PPPK	3.476.782	3.476.782	0
511624	Beban Tunjangan Fungsional PPPK	68.640.000	67.560.000	1.080.000
511625	Beban Tunjangan Beras PPPK	19.263.720	19.263.720	0
511628	Beban Uang Makan PPPK	89.188.450	86.390.450	2.798.000
512211	Beban Uang Lembur	34.997.352.950	35.165.242.817	(167.889.867)
512212	Beban Uang Lembur PPPK	1.694.000	1.694.000	0
512411	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja)	1.109.905.538.122	1.106.001.658.438	3.903.879.684
512414	Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) PPPK	567.046.818	457.205.987	109.840.831
Jumlah		2.322.159.157.238	2.319.687.669.213	2.471.488.025

Beban Persediaan
Rp160.189.367.274,00

D.2.2 Beban Persediaan

Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi/pemakaian atas barang-barang persediaan yang habis pakai. Saldo Beban Persediaan pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp160.189.367.274,00 dan Rp115.075.308.785,00. Rincian Beban Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 118
Rincian Beban Persediaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
593111	Beban Persediaan Konsumsi	160.189.367.274	115.075.308.785
Jumlah		160.189.367.274	115.075.308.785

Beban Barang dan Jasa
Rp2.964.274.912.755,00

D.2.3 Beban Barang dan Jasa

Beban Barang dan Jasa adalah konsumsi atas barang dan jasa termasuk aset ekstrakomptabel yang dimanfaatkan dalam penyelenggaraan kegiatan operasional entitas pelaporan. Saldo Beban Barang dan Jasa pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp2.964.274.912.755,00 dan Rp3.823.244.186.829,00. Rincian Beban Barang dan Jasa untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 119
Rincian Beban Barang dan Jasa Per 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
521111	Beban Keperluan Perkantoran	148.051.380.464	183.171.211.491
521112	Beban Pengadaan Bahan Makanan	0	504.000
521113	Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	8.510.600	22.136.702
521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	675.047.300	3.145.413.423
521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	57.850.220.850	53.790.102.452
521119	Beban Barang Operasional Lainnya	1.605.897.968	691.274.068
521131	Beban Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	77.329.949	3.547.446.956
521211	Beban Bahan	187.892.336.236	331.955.519.195
521213	Beban Honor Output Kegiatan	2.251.746.283.309	3.001.173.701.259
521219	Beban Barang Non Operasional Lainnya	62.056.609.696	66.139.399.763
521231	Beban Barang Pemberian Penghargaan Dalam Bentuk Uang	7.000.000	0
521241	Beban Barang Non Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19	52.880.883	32.902.241.945
521252	Beban Peralatan dan Mesin – Ekstrakomptabel	3.993.977.842	2.910.042.111
521253	Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	258.066.804	381.088.981
522111	Beban Langganan Listrik	49.496.476.745	42.250.551.661
522112	Beban Langganan Telepon	1.244.102.617	1.400.341.111
522113	Beban Langganan Air	1.757.829.296	1.588.141.601
522119	Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	856.629.912	679.725.373
522121	Beban Jasa Pos dan Giro	0	7.000.000
522131	Beban Jasa Konsultan	1.373.615.923	588.911.176
522141	Beban Sewa	56.838.659.963	17.429.122.290
522151	Beban Jasa Profesi	38.837.460.650	9.507.393.500
522191	Beban Jasa Lainnya	99.224.544.473	64.183.304.069
522192	Beban Jasa - Penanganan Pandemi COVID-19	55.615.000	5.603.306.022
595112	Beban Aset Ekstrakomptabel Peralatan dan Mesin	314.436.275	176.307.680
Jumlah		2.964.274.912.755	3.823.244.186.829

Beban Pemeliharaan
Rp133.184.458.787,00

D.2.4 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan kondisi aset tetap atau aset lainnya yang dimiliki oleh entitas pelaporan agar tetap berada dalam kondisi normal. Saldo Beban Pemeliharaan pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp133.184.458.787,00 dan Rp145.085.049.642,00.

Rincian Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 120
Rincian Beban Pemeliharaan Per 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	33.482.176.088	34.607.105.252

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
523113	Beban Asuransi Gedung dan Bangunan	2.510.238.623	2.211.577.288
523119	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya	581.821.073	737.633.696
523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	94.366.020.455	105.481.263.674
523133	Beban Pemeliharaan Jaringan	0	575.000
523199	Beban Pemeliharaan Lainnya	351.965.847	0
593113	Beban Persediaan Bahan untuk Pemeliharaan	1.773.123.892	1.866.023.053
595113	Beban Aset Ekstrakomtabel Gedung dan Bangunan	119.112.809	180.871.679
Jumlah		133.184.458.787	145.085.049.642

Beban Perjalanan Dinas
Rp1.689.124.734.641,00

D.2.5 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas merupakan beban untuk mencatat penyelenggaraan perjalanan dinas dalam rangka melaksanakan tugas, fungsi, dan jabatan. Saldo Beban Perjalanan Dinas pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp1.689.124.734.641,00 dan Rp1.722.961.732.017,00. Rincian Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 121
Rincian Beban Perjalanan Dinas Per 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
524111	Beban Perjalanan Biasa	230.069.579.068	197.684.344.635
524113	Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	214.501.092.097	218.172.034.778
524114	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	864.462.390.131	925.759.258.064
524115	Beban Perjalanan Dinas - Penanganan Pandemi COVID-19	0	10.944.000
524119	Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	378.017.510.423	381.012.362.095
524211	Beban Perjalanan Dinas Biasa-Luar Negeri	167.609.965	0
524219	Beban Perjalanan Lainnya - Luar Negeri	1.906.552.957	322.788.445
Jumlah		1.689.124.734.641	1.722.961.732.017

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp241.544.873.432,00

D.2.6 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis nilai Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable asset*) selama masa manfaat aset bersangkutan. Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi Aset Tak Berwujud. Saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp241.544.873.432,00 dan Rp290.672.529.437,00. Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 122
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Per 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	154.013.575.895	170.006.278.836

591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	59.105.167.992	59.109.023.325
591411	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya	0	29.267.713
592115	Beban Amortisasi Software	26.830.340.467	50.069.856.318
592116	Beban Amortisasi Lisensi	532.575.163	10.253.631.118
592118	Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintahan	121.512.250	151.650.025
592222	Beban Penyusutan Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah	941.701.665	1.052.822.102
Jumlah		241.544.873.432	290.672.529.437

Beban Penyisihan
Piutang Tak Tertagih
Rp125.381.951,00

D.2.7 Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang jangka pendek maupun piutang jangka panjang dalam suatu periode pelaporan. Saldo Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp125.381.951,00 dan minus Rp6.730.737.761,00. Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 123
Rincian Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih Per 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
594211	Beban Penyisihan Piutang PNB	430.915.567	(11.561.787)
594212	Beban Penyisihan Piutang Lainnya	(1.665.147)	(2.308.878)
594411	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih - Bagian Lancar Tagihan TP/TGR	272.053.645	(1.145.787.892)
594931	Beban Penyisihan Piutang Tidak Tertagih Jangka Panjang - TP/TGR	(575.922.114)	(5.571.079.204)
Jumlah		125.381.951	(6.730.737.761)

D.3 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL

Pendapatan Pelepasan
Aset Non Lancar
Rp10.286.368.971,00

D.3.1 Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar

Saldo Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing Rp10.286.368.971,00 dan Rp5.281.817.748,00. Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar berasal dari hasil pelepasan aset non lancar berupa Barang Milik Negara (BMN) melalui proses pemindahtanganan aset. Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 124
Rincian Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	22.104.888	7.600.029
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	797.269.873	452.612.400
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	9.466.994.210	4.821.605.319

Jumlah	10.286.368.971	5.281.817.748
--------	----------------	---------------

Perbandingan saldo Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran.

Tabel 125
Perbandingan Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar LO dan LRA
Per 31 Desember 2023

Kode Akun	Uraian	LO (Rp)	LRA (Rp)	Selisih (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
425121	Pendapatan dari Penjualan Tanah, Gedung, dan Bangunan	22.104.888	22.104.888	0
425122	Pendapatan dari Penjualan Peralatan dan Mesin	797.269.873	797.269.873	0
425129	Pendapatan dari Pemindahtanganan BMN Lainnya	9.466.994.210	9.466.994.210	0
Jumlah		10.286.368.971	10.286.368.971	0

Beban Pelepasan Aset Non Lancar
Rp26.704.284.420,00

D.3.2 Beban Pelepasan Aset Non Lancar

Saldo Beban Pelepasan Aset Non Lancar pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp26.704.284.420,00 dan Rp15.147.990.559,00. Beban tersebut berasal dari nilai Beban Kerugian Pelepasan Aset yang memperhitungkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan, dan nilai buku ketika terjadi proses pelepasan aset.

Tabel 126
Rincian Beban Pelepasan Aset Non Lancar Per 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
596111	Beban Kerugian Pelepasan Aset	26.704.284.420	15.147.990.559
Jumlah		26.704.284.420	15.147.990.559

D.4 PENDAPATAN DAN BEBAN NON OPERASIONAL LAINNYA

Pendapatan Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya
Rp431.395.300.328,00

D.4.1 Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Saldo Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp431.395.300.328,00 dan Rp100.705.233.635,00. Pendapatan ini berasal dari transaksi pendapatan yang tidak secara langsung berkaitan dengan tugas dan fungsi utama dari BPS. Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 127
Rincian Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425173	Pendapatan dari Penerimaan Klaim Asuransi BMN	173.751.672	0

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
425791	Pendapatan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara	2.278.889.386	1.038.018.622
425911	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Tahun Anggaran Yang Lalu	764.503.993	19.165.306.194
425912	Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu	494.695.248	324.838.389
425913	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	547.494.924	8.353.640
425931	Pendapatan Setoran dari Sisa Utang Non TP/TGR Pensiunan PNS	75.064.956	115.417.987
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	26.156.323.785	1.943.610.664
491511	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	400.904.576.364	78.109.688.139
Jumlah		431.395.300.328	100.705.233.635

Beban Dari Kegiatan
Non Operasional
Lainnya
Rp409.124.850.638,00

D.4.2 Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya

Saldo Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya pada Laporan Operasional BPS untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp409.124.850.638,00 dan Rp79.666.069.054,00. Beban ini merupakan beban yang muncul karena adanya penyesuaian atas nilai dan kondisi barang persediaan. Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut.

Tabel 128
Rincian Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya Per 31 Desember 2023 dan 2022

Kode Akun	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
593311	Beban Penyesuaian Nilai Persediaan	400.104.748.471	78.896.832.377
596121	Kerugian Persediaan Rusak/Usang	9.020.102.167	769.236.677
Jumlah		409.124.850.638	79.666.069.054

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp5.331.160.728.411,00

E.1 EKUITAS AWAL

Saldo Ekuitas Awal tanggal 1 Januari 2023 dan 2022 adalah masing-masing sebesar Rp5.331.160.728.411,00 dan Rp5.348.258.131.794,00.

Defisit LO
Rp7.152.961.559.181,00

E.2 SURPLUS (DEFISIT) LO

Saldo Defisit LO untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp7.152.961.559.181,00 dan Rp8.344.854.221.373,00. Defisit LO merupakan penjumlahan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional dan surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa pada Laporan Operasional. Rincian Surplus/Defisit LO untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 disajikan pada Laporan Operasional.

E.3 KOREKSI YANG MENAMBAH /MENGURANGI EKUITAS

Jumlah Koreksi yang mengurangi Ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp16.621.529.943,00 dan Rp55.026.417.799,00. Rincian saldo koreksi yang menambah/mengurangi ekuitas adalah sebagai berikut.

Tabel 129
Rincian Koreksi Yang Menambah/Mengurangi Ekuitas

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Koreksi Nilai Persediaan	(589.410.908)	782.455.926
2	Koreksi atas Reklasifikasi	(35.559.360)	643.917.275
3	Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi	(15.480.967.959)	60.168.227.681
4	Lain-lain	(515.591.716)	(6.568.183.083)
Jumlah		(16.621.529.943)	55.026.417.799

*Koreksi Nilai
Persediaan*
(Rp589.410.908,00)

E.3.1 Koreksi Nilai Persediaan

Saldo Koreksi Nilai Persediaan untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar minus Rp589.410.908,00 dan Rp782.455.926,00. Saldo Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan nilai koreksi atas persediaan berupa persediaan yang perolehannya pada tahun anggaran yang lalu dan dibukukan pada tahun anggaran yang berjalan. Perolehan persediaan ini melalui pembelian, transfer masuk, hibah langsung, rampasan, perolehan lainnya, maupun reklasifikasi masuk. Saldo Koreksi Nilai Persediaan yang tercatat di Laporan Perubahan Ekuitas merupakan nilai koreksi persediaan barang konsumsi yang perolehannya tahun anggaran yang lalu dan dibukukan pada tahun anggaran berjalan.

Rincian mutasi transaksi yang membentuk nilai Koreksi Nilai Persediaan diuraikan sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Koreksi Kuantitas Tambah	Barang Konsumsi	Rp	77.792.259
Koreksi Nilai Tambah	Barang Konsumsi	Rp	1.286.303
Saldo Awal	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	Rp	4.953.750
Tanpa uraian	Barang Konsumsi	Rp	80.051.630
	Belanja barang yang masih harus dibayar	Rp	390.500
	Belanja Persediaan konsumsi	Rp	22.223.827
	Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	Rp	1.590.400
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	188.288.669
Mutasi Kurang:			
Koreksi Kuantitas Kurang	Bahan untuk Pemeliharaan	(Rp	130.000)
	Barang Konsumsi	(Rp	618.691)
Koreksi Nilai Kurang	Barang Konsumsi	(Rp	773.916.766)
Koreksi Nilai Tambah	Barang Konsumsi	(Rp	2.643.620)
Tanpa uraian	Belanja barang yang masih harus dibayar	(Rp	390.500)
Jumlah Mutasi Kurang		(Rp	777.699.577)
Rincian Mutasi			(Rp 589.410.908)

Koreksi Atas Reklasifikasi
(Rp35.559.360,00)

E.3.2 Koreksi atas Reklasifikasi

Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar minus Rp35.559.360,00 dan Rp643.917.275,00. Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi pada Laporan Perubahan Ekuitas mencerminkan nilai atas reklasifikasi yang terjadi pada Persediaan/Aset Tetap/Aset Lainnya SIMAK-BMN periode tahun berjalan. Sesuai dengan PMK Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN), salah satu transaksi yang mungkin terjadi atas suatu BMN adalah reklasifikasi. Reklasifikasi masuk merupakan transaksi pencatatan BMN yang sebelumnya dicatat dengan klasifikasi BMN lain. Sedangkan reklasifikasi keluar merupakan transaksi yang digunakan untuk menghapus suatu BMN, sebelum dicatat kembali ke dalam klasifikasi BMN yang baru. Saldo Koreksi Atas Reklasifikasi per 31 Desember 2023 terdapat pada tabel berikut.

Penjelasan perhitungan mutasi transaksi saldo Koreksi Atas Reklasifikasi diuraikan sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Reklasifikasi Dari Aset	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp	224.600
	Barang Konsumsi	Rp	342.203.659
	Persediaan Lainnya	Rp	224.027.000
	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat Dalam Proses	Rp	1.200.000

Reklasifikasi Keluar	Akumulasi Amortisasi Software	Rp	69.630.000
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	4.359.339.172
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	726.646.571
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	36.591.440
Reklasifikasi Masuk	Aset Tetap Lainnya	Rp	14.230.000
	Bahan untuk Pemeliharaan	Rp	29.978.590
	Barang Konsumsi	Rp	3.368.475.531
	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	Rp	95.000
	Gedung dan Bangunan	Rp	23.573.673.048
	Peralatan dan Mesin	Rp	30.100.674.052
	Suku Cadang	Rp	200.000
	Tanah	Rp	5.586.842.000
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Aset Tetap Lainnya	Rp	1.096.247.994
	Gedung dan Bangunan	Rp	224.027.000
	Peralatan dan Mesin	Rp	493.500.000
Reklasifikasi Masuk KDP	Konstruksi Dalam pengerjaan	Rp	238.365.900
Tanpa Uraian	Belanja Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	Rp	12.691.000
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	70.498.862.557
Mutasi Kurang:			
Reklasifikasi ke Aset	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	(Rp	12.461.250)
	Bahan untuk Pemeliharaan	(Rp	5.005.000)
	Barang Konsumsi	(Rp	1.593.066.194)
	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	(Rp	787.000)
	Persediaan Lainnya	(Rp	224.027.000)
	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	(Rp	2.400.000)
	Suku Cadang	(Rp	200.000)
Reklasifikasi Keluar	Aset Lain-Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat	(Rp	8.523.400)
	Aset Tetap Lainnya	(Rp	14.230.000)
	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	(Rp	199.740.675)
	Bahan Baku	(Rp	36.207.035)
	Bahan untuk Pemeliharaan	(Rp	215.223.682)
	Barang Konsumsi	(Rp	2.803.377.123)
	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	(Rp	44.167.000)
	Gedung dan Bangunan	(Rp	22.305.908.240)
	Peralatan dan Mesin	(Rp	30.031.044.052)

	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial	(Rp	26.569.000)
	Persediaan Lainnya	(Rp	41.424.694)
	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses	(Rp	1.809.012)
	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-jaga	(Rp	1.750.000)
	Pita Cukai, Materai dan Leges	(Rp	3.790.000)
	Software	(Rp	69.630.000)
	Suku Cadang	(Rp	16.167.500)
	Tanah	(Rp	6.854.606.808)
Reklasifikasi Keluar KDP	Konstruksi Dalam pengerjaan	(Rp	238.365.900)
Reklasifikasi Keluar ke Persediaan	Aset Tetap Lainnya	(Rp	127.345.109)
	Gedung dan Bangunan	(Rp	224.027.000)
	Peralatan dan Mesin	(Rp	207.000.000)
Reklasifikasi Masuk	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	4.359.339.172)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	796.276.571)
Reklasifikasi Masuk dari Persediaan	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	67.208.100)
Tanpa Uraian	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	(Rp	2.745.400)
Jumlah Mutasi Kurang		(Rp	70.534.421.917)
Rincian Mutasi			(Rp 35.559.360)

Koreksi Nilai Aset
Non Revaluasi
(Rp15.480.967.959,00)

E.3.3 Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar minus Rp15.480.967.959,00 dan Rp60.168.227.681,00. Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi merupakan koreksi atas catatan dan koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang dilakukan selain karena revaluasi nilai.

Saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi pada Laporan Perubahan Ekuitas mencerminkan nilai atas reklasifikasi dan pengurangan nilai aset yang terjadi pada nilai SIMAK-BMN periode tahun berjalan. Rincian saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi terdiri dari:

- Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi sebesar minus Rp15.487.392.959,00.
- Koreksi Nilai Aset Lainnya Non Revaluasi sebesar Rp6.425.000,00.

Penjelasan perhitungan mutasi transaksi saldo Koreksi Nilai Aset Non Revaluasi diuraikan sebagai berikut:

Mutasi Tambah:

Koreksi Manual	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	2.019.732
	Peralatan dan Mesin	Rp	24.878.969
Koreksi Nilai KDP Bertambah	Konstruksi Dalam pengerjaan	Rp	6.205.402.616
Koreksi Pencatatan	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	105.550.035

Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	358.396.156
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	385.691.845
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Aset Tetap Lainnya	Rp	7.658.020
	Gedung dan Bangunan	Rp	3.126.754.350
	Peralatan dan Mesin	Rp	8.904.657.839
	Tanah	Rp	57.275.268.000
	Gedung dan Bangunan	Rp	269.447.112
Koreksi Susulan Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp	382.548.765
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp	3.911.925.599
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp	57.825.000
	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Rp	2.900.437.069
	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp	1.909.028.500
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan penggunaan aktif	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Rp	12.240.375.520
	Aset Tetap Lainnya	Rp	1.765.660.220
	Gedung dan Bangunan	Rp	2.065.060.000
	Peralatan dan Mesin	Rp	11.856.750.881
	Software	Rp	1.915.453.500
	Akumulasi Amortisasi Lisensi	Rp	79.270.400
	Akumulasi Amortisasi Software	Rp	270.172.428
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	Rp	1.954.404.024
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	Rp	176.835.498.777
	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	Rp	372.472.928
	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	Rp	196.529.382.611
	Aset Tetap Lainnya	Rp	2.299.631
	Gedung dan Bangunan	Rp	607.292.800
Saldo Awal	Peralatan dan Mesin	Rp	3.850.602.393
	Tanah	Rp	346.537.400
	Konstruksi Dalam pengerjaan	Rp	196.000.000
	Aset Tetap yang Belum Diregister	Rp	250.363.538
Saldo Awal KDP Tanpa Uraian	Belanja Langganan Telepon	Rp	111.782

	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp	27.038.505
	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp	10.591.711
	Belanja modal yang masih harus dibayar	Rp	213.262.170
	Hibah Langsung yang Belum Disahkan	Rp	104.400.000
	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	Rp	1.656.041.468
	Penerimaan Kembali Belanja Modal Tahun Anggaran Yang Lalu	Rp	446.313.884
	Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	Rp	322.774.360
Jumlah Mutasi Tambah		Rp	499.745.620.538
Mutasi Kurang:			
Koreksi Manual	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	6.878.969)
	Aset Tetap Lainnya	(Rp	1.573.000)
	Peralatan dan Mesin	(Rp	9.571.732)
Koreksi Nilai KDP Berkurang	Konstruksi Dalam pengerjaan	(Rp	6.885.409.756)
Koreksi Pencatatan	Aset Tetap Lainnya	(Rp	11.125.441)
	Gedung dan Bangunan	(Rp	2.347.909.853)
	Irigasi	(Rp	3.885.000)
	Peralatan dan Mesin	(Rp	446.055.035)
	Tanah	(Rp	57.589.858.810)
Koreksi Pencatatan KDP	Konstruksi Dalam pengerjaan	(Rp	6.919.060.154)
Koreksi Pencatatan Nilai Berkurang	Gedung dan Bangunan	(Rp	13.734.035.468)
	Peralatan dan Mesin	(Rp	819.201.523)
	Tanah	(Rp	346.543.400)
Koreksi Pencatatan Nilai Bertambah	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	239.399.733)
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	6.146.302.169)
Koreksi Susulan Pencatatan Barang Yang Mau Dihapuskan	Aset Tetap Lainnya	(Rp	178.000.000)
	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(Rp	382.548.765)
	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(Rp	4.740.076.713)
Pencatatan Pembatalan Barang Yang Mau Dihapuskan	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(Rp	57.825.000)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(Rp	2.833.968.237)
Penggunaan kembali BMN yang sudah dihentikan	Akumulasi Amortisasi Software	(Rp	1.909.028.500)
	Akumulasi Penyusutan Gedung	(Rp	558.719.970)

penggunaan aktif	dan Bangunan		
	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	11.681.655.550)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(Rp	1.915.453.500)
	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	(Rp	15.687.471.101)
Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud yang tidak digunakan dalam Operasional Pemerintahan	(Rp	349.442.828)
	Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasi Pemerintahan	(Rp	178.789.902.801)
Reklasifikasi Masuk	Aset Tetap Lainnya	(Rp	7.204.032.824)
	Gedung dan Bangunan	(Rp	9.697.827.400)
Saldo Awal	Lisensi	(Rp	99.088.000)
	Peralatan dan Mesin	(Rp	177.278.982.387)
Tanpa Uraian	Software	(Rp	273.384.928)
	Tanah	(Rp	2.348.540.000)
Reklasifikasi Masuk	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	10.430.781)
	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	(Rp	309.843.275)
Saldo Awal	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(Rp	2.264.260.965)
	Belanja Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	(Rp	8.132.492)
Tanpa Uraian	Belanja Langganan Telepon	(Rp	111.782)
	Belanja Modal Dibayar di Muka (prepaid)	(Rp	191.362.805)
Saldo Awal	Belanja modal yang masih harus dibayar	(Rp	31.985.850)
	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	(Rp	917.702.000)
Jumlah Mutasi Kurang		(Rp	515.226.588.497)
Rincian Mutasi		(Rp	15.480.967.959)

Koreksi Lain-Lain
(Rp515.591.716,00)

E.3.4 Koreksi Lain-Lain

Saldo Koreksi Lain-Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah minus Rp515.591.716,00 dan minus Rp6.568.183.083,00. Saldo Koreksi Lain-Lain merupakan akun yang digunakan untuk mengoreksi kesalahan pencatatan atas transaksi kas, piutang, dan utang pada periode berjalan. Saldo Koreksi Lain-Lain terbentuk akibat jurnal penyesuaian yang dicatat pada periode tahun berjalan.

Transaksi Antar Entitas
Rp7.135.712.393.159,00

E.4 TRANSAKSI ANTAR ENTITAS

Saldo Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp7.135.712.393.159,00 dan Rp8.272.730.400.191,00.

Transaksi Antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih Entitas yang berbeda baik internal satker BPS, antara BPS dengan Kementerian Negara/Lembaga lain, maupun antara BPS dengan BUN. Rincian Transaksi Antar Entitas adalah sebagai berikut.

Tabel 130
Rincian Saldo Transaksi Antar Entitas

No.	Uraian	TA 2023 (Rp)	TA 2022 (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Ditagihkan ke Entitas Lain	7.502.163.392.302	8.308.425.095.200
2	Diterima dari Entitas Lain	(378.622.297.063)	(51.171.714.629)
3	Transfer Keluar	(54.053.786.732)	(145.531.924.514)
4	Transfer Masuk	51.128.797.760	143.086.639.894
5	Pengesahan Hibah Langsung	14.683.746.095	17.892.817.936
6	Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung	(9.419.203)	(74.970.451)
7	Pengesahan Hibah Langsung TAYL	421.960.000	104.456.755,
Jumlah		7.135.712.393.159	8.272.730.400.191

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Saldo Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023, adalah masing-masing sebesar Rp7.502.163.392.302,00 dan Rp378.622.297.063,00. Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan Transaksi Antar Entitas atas pendapatan dan belanja pada BPS yang melibatkan Kas Negara (BUN). Saldo Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 131
Rincian Diterima dari Entitas Lain dan Ditagihkan ke Entitas Lain

No.	Uraian	Diterima dari Entitas Lain (DDEL) (Rp)	Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL) (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pendapatan Negara Bukan Pajak - LRA	378.472.797.063	0
2	Pengembalian Belanja Pengadaan Genset	149.500.000	0
Jumlah		378.622.297.063	0
3	Belanja - LRA		
	- Belanja Pegawai	0	2.319.687.669.213
	- Belanja Barang	0	4.875.800.083.713
	- Belanja Modal	0	309.117.042.976
4	Pengembalian Belanja Pengadaan Genset	0	149.500.000
5	Hibah Langsung Luar Negeri	0	(2.590.903.600)
Jumlah		0	7.502.163.392.302

E.4.2 Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Saldo Transfer Masuk dan Transfer Keluar untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023, adalah masing-masing sebesar Rp50.938.621.790,00 dan Rp54.053.786.732,00. Transfer Masuk dan Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu Entitas ke Entitas lain pada internal satker BPS, antara BPS dengan Kementerian Negara/Lembaga, dan antara BPS dengan BUN.

Tabel 132
Rincian Saldo Transfer Masuk dan Transfer Keluar

Kode Akun	Uraian	Transfer Masuk (Rp)	Transfer Keluar (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
117111	Barang Konsumsi	33.415.018.526	(33.415.594.496)
117113	Bahan untuk Pemeliharaan	10.215.000	(10.215.000)
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat	1.332.250	(1.332.250)
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat	787.000	(787.000)
131111	Tanah	429.169.000	(3.392.116.000)
132111	Peralatan dan Mesin	37.239.947.321	(37.656.800.161)
133111	Gedung dan Bangunan	79.847.000	(574.204.000)
135121	Aset Tetap Lainnya	7.229.300	(7.229.300)
137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	(20.765.183.357)	20.992.436.197
137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan		82.730.028
162151	Software	89.950.000	(89.950.000)
166112	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	(59.431.000)
169315	Akumulasi Amortisasi Software	(78.706.250)	78.706.250
491429	Pendapatan Perolehan Aset Lainnya	509.016.000	0
Jumlah		50.938.621.790	(54.053.786.732)

E.4.3 Pengesahan Hibah Langsung

Saldo Pengesahan Hibah Langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp14.683.746.095,00. Pengesahan Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung pada BPS tahun berjalan dalam bentuk uang/kas, barang, maupun jasa. Sedangkan pendapatan hibah dilakukan oleh BA-BUN. Saldo Pengesahan Hibah terdapat pada tabel berikut.

Tabel 133
Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung

No.	Kode Wil.	Nama Wilayah	Nama Satker	Pemberi Hibah	Nomor Pengesahan	Jenis Hibah	Nilai Hibah Langsung (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	0199	Settama	Settama	UNFPA	2NZ4UCWA	Uang	1.185.728.394
				UNICEF	2PG3K7NA	Uang	1.414.594.409
				UNFPA	2NZ4UCWA	Jasa	308.477.685
				PROSPERA	23TSV7CA	Jasa	3.413.211.381
2	0200	Jawa Barat	Kab.Bogor	Pemda Kab. Bogor	2BKLAB6A	Tanah	496.440.000
3	0800	Sumatera Barat	Kab Tanah Datar	Pemda Kab.Tanah Datar	22D5BL9A	Tanah	104.400.000
4	1200	Lampung	Kab Lampung Barat	Pemda Kab. Lampung Barat	2SKQ6SHA	Peralatan dan Mesin	40.232.225
5	1300	Kalimantan Barat	Prop Kalimantan Barat	Pemprov Kalimantan Barat	2TSRJT2A	Tanah dan Bangunan	7.364.662.001

No.	Kode Wil.	Nama Wilayah	Nama Satker	Pemberi Hibah	Nomor Pengesahan	Jenis Hibah	Nilai Hibah Langsung (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	2300	Nusa Tenggara Barat	Kab Lombok Timur	Pemda Kab. Lombok Timur	2X7F8BLA	Mobil Kendaraan Dinas	228.000.000
7	3300	Papua Barat	Kab Sorong Selatan	Pemda Kab. Sorong Selatan	2SDN5HUA	Tanah	128.000.000
Jumlah							14.683.746.095

E.4.4 Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung

Saldo Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp9.419.203,00. Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung merupakan transaksi atas pencatatan pengembalian hibah langsung yang telah dilakukan pengesahan. Saldo Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung per 31 Desember 2023 berasal dari satker Settama yang merupakan pengembalian dana hibah ke donor. Saldo Pengesahan Pengembalian Hibah Langsung berasal dari satker Settama BPS, dengan rincian asal hibah adalah sebagai berikut:

1. UNFPA, sebesar Rp7.468.306,00.
2. UNICEF, sebesar Rp1.950.897,00.

E.4.5 Pengesahan Hibah Langsung Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL)

Saldo Pengesahan Hibah Langsung TAYL untuk periode yang berakhir 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp421.960.000,00. Pengesahan Hibah Langsung TAYL merupakan transaksi atas pencatatan hibah langsung pada BPS dalam bentuk kas, barang, maupun jasa atas hibah yang diterima pada tahun 2022 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, namun belum dilakukan pengajuan nomor register dan/atau pengesahan hibah di tahun 2023. Rincian saldo Pengesahan Hibah Langsung TAYL terdapat pada tabel berikut.

Tabel 134
Rincian Saldo Pengesahan Hibah Langsung TAYL

No.	Kode Wil.	Nama Wilayah	Nama Satker	Pemberi Hibah	Nomor Pengesahan	Objek Hibah	Nilai Hibah Langsung TAYL (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	0200	Jawa Barat	BPS Kota Depok	Pemda Kota Depok	024/2846/BKD/2021	Tanah	421.960.000
Jumlah							421.960.000

Ekuitas Akhir
Rp5.297.290.032.446,00

E.5 EKUITAS AKHIR

Saldo Ekuitas Akhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebesar Rp5.297.290.032.446,00 dan Rp5.331.160.728.411,00.

F. PENGUNGKAPAN PENTING LAINNYA

F.1 TEMUAN DAN TINDAK LANJUT TEMUAN BPK

Menindaklanjuti berdasarkan surat nomor B-207/01000/KU.933/5/2023 tanggal 17 Mei 2023 tentang Monitoring penyelesaian tindak lanjut BPS terhadap temuan BPK atas pemeriksaan laporan keuangan TA 2022. Temuan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Penetapan Denda Tidak Sesuai Dengan Perjanjian Kerja dan Kekurangan Penerimaan atas Pendapatan Denda Lainnya,
2. Pengendalian atas Pengakuan Pendapatan Denda Pekerjaan Koneksi Internet VSAT BPS Kabupaten/Kota pada Sekretariat Utama BPS Belum Memadai,
3. Pengelolaan Belanja Pegawai Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan,
4. Pelaksanaan dan Pemanfaatan Kegiatan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) Tahun 2022 Belum Memiliki Payung Hukum,
5. Sisa Realisasi Belanja Terlambat Disetorkan ke Kas Negara dengan Nilai Penyetoran Tidak Sesuai Kertas Kerja Perhitungan Belanja, Pertanggungjawaban Belanja Belum Sepenuhnya Sesuai Ketentuan, serta Pengawasan BPS atas Kegiatan Belanja Jasa Lainnya Kajian Kualitatif *Long Form* SP2020 Tidak Optimal,
6. Pelaksanaan Paket Pekerjaan *Outsourcing* Tenaga Pengamanan pada Sekretariat Utama BPS Tidak Sesuai Kontrak,
7. Realisasi Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri Tidak Didukung dengan Pertanggungjawaban yang Lengkap,
8. Kekurangan Penerimaan dari Pencairan Jaminan Pelaksanaan yang Belum Diserahkan Penyedia Sebesar Rp687,74 Juta dan Denda Keterlambatan atas Pembangunan Gedung Kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 Sebesar Rp169,90 Juta,
9. Kekurangan Volume Pekerjaan Sebesar Rp448,40 Juta dan Pekerjaan Yang Tidak Sesuai Spesifikasi sebesar Rp163,40 Juta atas Pekerjaan Konstruksi Renovasi Gedung 3 Sekretariat Utama BPS,
10. Kekurangan Volume Pekerjaan atas Pekerjaan Revitalisasi Mekanikal dan Elektrikal (ME) Tahap II Gedung 1 Sekretariat Utama BPS Sebesar Rp466,87 Juta,
11. Pelaksanaan Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan Fisik Gedung Kantor BPS Provinsi Kalimantan Utara Tidak Sesuai Ketentuan Sebesar Rp338,63 Juta,
12. Kekurangan Volume Pekerjaan pada Belanja Modal Gedung dan Bangunan di BPS Kabupaten Barito Kuala, BPS Kota Prabumulih, BPS Provinsi Kalimantan Utara,

dan Sekretariat Utama BPS Sebesar Rp76,36 Juta,

13. Penatausahaan dan Pengelolaan Persediaan pada Badan Pusat Statistik Belum Sepenuhnya Tertib,
14. Pencatatan Nilai Barang Milik Negara Gedung dan Bangunan pada Beberapa Satuan Kerja di BPS Belum Sesuai dengan Ketentuan,
15. Hasil Sensus BMN Tahun 2021 pada Sekretariat Utama BPS belum Sepenuhnya Selesai Ditindaklanjuti,
16. Pengelolaan Barang Milik Negara Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah pada Sekretariat Utama BPS Belum Memadai.

Daftar rencana tindak lanjut dan progress tindak lanjut terdapat dalam Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan.

F.2 REVISI DIPA

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023, BPS melakukan perubahan pagu sebanyak 10 (sepuluh) kali melalui Direktorat Jenderal Anggaran. Nilai pagu dalam DIPA awal sebesar Rp8.018.904.552.000,00 dan setelah dilakukan revisi menjadi sebesar Rp7.737.055.033.000,00 dengan uraian sebagai berikut:

1. Revisi DIPA Pertama terdapat pada 517 satuan kerja yang ditetapkan pada tanggal 28 Desember 2022 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-1075/02000/PR.440/12/2021 tanggal 21 Desember 2021. Nilai pagu awal Rp8.018.904.552.000,00 menjadi Rp8.018.904.552.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:

Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yaitu:

1. *Automatic Adjustment* sebesar Rp599.256.387.000,00 dengan rincian:
 - a. Program Dukman (054.01.WA) berupa pemblokiran belanja pegawai: Rp174.345.228.000,00.
 - b. Program PPIS (054.01.GG) berupa pemblokiran kegiatan Prioritas Nasional: Rp424.911.159.000,00.
2. Revisi DIPA Kedua terdapat pada 517 satuan kerja yang ditetapkan pada tanggal 27 Februari 2023 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-145/02000/PR.440/02/2022 tanggal 17 Februari 2023. Nilai pagu sebelum dan sesudah revisi sebesar Rp8.018.904.552.000,00 menjadi Rp8.018.904.552.000,00. Revisi DIPA dilakukan karena:
 - a. Revisi anggaran dalam hal pagu tetap
 1. Program Dukman (054.01.WA)

- a. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan TA 2022;
 - b. Revisi dalam rangka pagu anggaran tetap lainnya yaitu revisi antar KRO dan RO.
2. Program PPIS (054.01.GG)
 - a. Revisi RO Prioritas Nasional yaitu pergeseran anggaran antar-RO Prioritas Nasional;
 - b. Revisi dalam rangka penyesuaian blokir *Automatic Adjustment* (AA);
 - c. Pergeseran anggaran dalam rangka realokasi antar belanja barang dan belanja modal;
 - d. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan TA 2022;
 - e. Revisi dalam rangka pagu anggaran tetap lainnya yaitu revisi antar KRO dan RO.
- b. Revisi administrasi
 1. Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Hal III DIPA Satker;
 2. Perubahan Catatan Halaman IV.A DIPA yaitu penyesuaian blokir AA;
 3. Perubahan Catatan Halaman IV.B DIPA yaitu penyelesaian tunggakan TA 2022.
3. Revisi DIPA ketiga terdapat pada 517 satuan kerja yang ditetapkan pada tanggal 6 April 2023 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-280/02000/PR.440/03/2023 tanggal 29 Maret 2023. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp8.018.904.552.000,00 menjadi Rp8.018.904.552.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:
 - a. Revisi anggaran dalam hal pagu tetap
 1. Program Dukman (054.01.WA)
 - a. Pergeseran anggaran dalam rangka penyelesaian tunggakan TA 2022;
 - b. Revisi dalam rangka pagu anggaran tetap lainnya yaitu revisi antar KRO dan RO.
 2. Program PPIS (054.01.GG)
 - a. Revisi dalam rangka pergeseran anggaran antar KRO dan RO Prioritas Nasional;
 - b. Pergeseran anggaran dalam rangka realokasi antar belanja barang (52) ke belanja modal (53) senilai Rp16.104.895.000,00 pada RO 2907.RAN.010 Perangkat Pengolahan Data dan Komunikasi Regsosek;
 - c. Revisi Informasi Kinerja.
 - b. Revisi Administrasi.
 1. Penyesuaian Rencana Penarikan Dana (RPD) Hal III DIPA Satker;

2. Perubahan Catatan Halaman IV.A DIPA yaitu penyesuaian blokir berupa tambahan blokir pada Program PPIS di kegiatan 2907 senilai Rp6.844.096.000,00 akibat belum tersedia *clearance* terkait pengadaan IT serta pada Program Dukman berupa pembukaan blokir terkait kekurangan dokumen RKBMN;
4. Revisi DIPA keempat terdapat pada 516 satuan kerja yang ditetapkan pada tanggal 11 Juli 2023 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-806/02000/PR.440/07/2023 tanggal 3 Juli 2023. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp8.018.904.552.000,00 menjadi Rp8.020.985.680,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:

Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan berubah yaitu:

1. 105 PNBP - Menambah/Mengurangi Pagu (penambahan pagu PNBP Rp2.117.721.000,00 dengan rincian STIS Rp1.594.972.000,00 dan BPS Kab. Badung Rp522.749.000,00).
 2. 122 Revisi Dalam Rangka Pagu Anggaran Berubah Lainnya.
 3. 211 Pemenuhan Belanja Operasional.
 4. 226 Penurunan Volume RO Secara Total.
 5. 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap Lainnya.
 6. 306 Pencantuman/Penghapusan Catatan Halaman IV.A (Blokir).
 7. 315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA.
5. Revisi DIPA kelima terdapat pada 517 satuan kerja yang ditetapkan pada tanggal 17 Juli 2023 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-858/02000/PR.440/07/2023 tanggal 13 Juli 2023. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp8.020.985.680,00 menjadi Rp7.861.761.832.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:

Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan berubah yaitu:

1. 102 Pergeseran Anggaran Antar Bagian Anggaran dan/atau Antar-Kementerian Negara/Lembaga (pemotongan AA belanja pegawai senilai Rp159.223.848.000,00).
 2. 122 Revisi Dalam Rangka Pagu Anggaran Berubah Lainnya.
 3. 306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir).
 4. 315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA.
6. Revisi DIPA keenam terdapat pada 103 satuan kerja yang ditetapkan pada tanggal 22 Agustus 2023 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-976/02000/PR.440/08/2023 tanggal 14 Agustus 2023. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp7.861.761.832,00 menjadi Rp8.159.568.801,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:

Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan berubah yaitu:

1. 105 PNB - Menambah/Mengurangi Pagu (penambahan pagu PNB PPIS bertambah sebesar Rp215.922.441.000,00 dan pagu Dukman sebesar Rp81.884.528.000,00 dengan rincian PL-KUMKM senilai Rp330.986.384.000,00, BPS Pusat berupa klaim asuransi sebesar Rp173.751.000,00, Pusdiklat, STIS).
2. 106 PNB - Penggunaan Realisasi PNB di Atas Targetnya.
3. 211 Pemenuhan Belanja Operasional.
4. 221 Pergeseran Anggaran Antar jenis Belanja.
5. 223 Penambahan/pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional.
6. 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap Lainnya.
7. 306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (blokir).
8. 315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA.
7. Revisi DIPA ketujuh terdapat pada 517 satuan kerja yang ditetapkan pada tanggal 6 Oktober 2023 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-1132/02000/PR.440/09/2023 tanggal 29 September 2023. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp8.159.568.801.000,00 menjadi Rp8.159.568.801.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:

Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan berubah yaitu:

1. 211 Pemenuhan Belanja Operasional (senilai Rp18.977.734.000,00 dari belanja 52 program PPIS).
2. 221 Pergeseran Anggaran Antar jenis Belanja (52 ke 53 senilai Rp122.238.600.000,00).
3. 223 Penambahan/Pengurangan Alokasi dan/atau Target RO Prioritas Nasional.
4. 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap Lainnya.
5. 306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir).
6. 315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA.
8. Revisi DIPA kedelapan terdapat pada 516 satuan kerja yang ditetapkan pada tanggal 21 Oktober 2023 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-1879/02100/PR.440/10/2023 tanggal 13 Oktober 2023. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp8.159.568.801.000,00 menjadi Rp7.734.453.935.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:

Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan berubah yaitu:

1. 102 Pergeseran Anggaran Antar-Bagian Anggaran dan/atau Antar-Kementerian Negara/Lembaga (pengembalian anggaran AA senilai Rp425.114.866.000,00 ke BA BUN dengan rincian PPIS

Rp424.911.159.000,00 dan Dukman Rp203.707.000,00).

2. 122 Revisi Dalam Rangka Pagu Anggaran Berubah Lainnya.
3. 306 Pencantuman/Penghapusan/Perubahan Catatan Halaman IV.A (Blokir).
4. 315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA.
9. Revisi DIPA kesembilan terdapat pada satuan kerja Revisi Dit. PA yang ditetapkan pada tanggal 20 November 2023 berdasarkan surat Sekretaris Utama BPS nomor B-1314/02000/PR.440/11/2023 tanggal 16 November 2023. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp7.734.453.935.000,00 menjadi Rp7.734.453.935.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:

Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap yaitu:

1. 211 Pemenuhan Belanja Operasional.
2. 236 Pergeseran Anggaran Antar-KRO dan/atau Antar-Kegiatan.
3. 238 Pergeseran Anggaran Antar-Satker.
4. 239 Revisi dalam rangka Pagu Anggaran Tetap Lainnya.
10. Revisi DIPA kesepuluh terdapat pada BPS Pusat Revisi Kanwil yang ditetapkan pada tanggal 11 Desember 2023 berdasarkan Kuasa Pengguna Anggaran Sekretaris Utama BPS nomor B-2270/02100/PR.440/12/2023 tanggal 4 Desember 2023. Nilai pagu yang sebelumnya sebesar Rp7.734.453.935.000,00 menjadi Rp7.737.050.832.000,00. Perubahan nilai pagu disebabkan oleh:

Revisi anggaran dalam hal pagu anggaran tetap dan berubah yaitu:

1. 112 Hibah - Menambah/Mengurangi Pagu (Hibah UNICEF dan UNFPA senilai Rp2.601.098.000,00).
2. 315 Pencantuman/Perubahan Rencana Penarikan Dana atau Perkiraan Penerimaan dalam Halaman III DIPA.
3. 325 Pemuktahiran Data Hasil Revisi POK.
4. Terdapat penurunan pagu senilai Rp4.201.000,00 karena adanya kesalahan sistem SAKTI revisi pemutakhiran KPA di BPS Kab. Waropen yang tidak dapat dikembalikan.

F.3 REKENING BPS

Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan nomor 57/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga bahwa setiap satuan kerja wajib melaporkan pengelolaan rekening

setiap semesteran.

Berdasarkan hasil Rekonsiliasi Rekening Milik Satuan Kerja/Lingkup Kementerian Negara/Lembaga antara Direktorat Pengelolaan Kas Negara, Kementerian Keuangan dengan Badan Pusat Statistik dengan Berita Acara Rekonsiliasi Nomor: BAR-158/PB.3.5/2024 tanggal 16 Februari 2024, jumlah rekening giro milik BPS sebanyak 538 rekening yang dirinci sebagai berikut:

- a. Rekening Bendahara Pengeluaran sebanyak 531 buah.
- b. Rekening Bendahara Penerimaan sebanyak 5 buah.
- c. Rekening Lainnya sebanyak 2 buah.

Daftar rekening aktif terdapat dalam Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan.

F.4 KERJASAMA SWAKELOLA TIPE I

Pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, Badan Pusat Statistik melakukan kerjasama Swakelola Tipe I sebanyak 27 kegiatan dengan Kementerian Negara/Lembaga dan Pemerintah Daerah/Dinas terkait dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 135
Rekapitulasi Kerjasama Swakelola Tipe I

No.	Nama Satker	Jumlah Kegiatan	Mitra Kerja Sama
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Sestama	17	BPOM, BNN, Kemendagri, Kemenkes, Bapanas, Kemenag, Pemda Banyuwangi, Kemenpan RB, Kemenparekraf, OJK, BRIN, KPPA, BPDP Kelapa Sawit Kemenkeu, Kemenkop UMKM, BI, Kemenkomarves
2	Pusdiklat BPS	5	Kementerian Pertahanan, Kementerian PUPR, Pemprov Jawa Tengah, Pemprov Kalimantan Selatan, Badan Kepegawaian Negara
3	Kabupaten Tanah Bumbu	2	Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Kabupaten Tanah Bumbu dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak
4	Kabupaten Badung	1	Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Badung
5	Kabupaten Bengkalis	2	Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis dan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Kabupaten Bengkalis
Jumlah		27	

F.5 KERJASAMA SWAKELOLA TIPE II DENGAN MEKANISME PNBP

Pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, Badan Pusat Statistik melakukan kerjasama Swakelola Tipe II dengan mekanisme PNBP sebanyak 47 kegiatan. Nilai kerjasama berdasarkan PKS yang telah disepakati kedua belah pihak sebesar Rp336.038.437.000,00.

Tabel 136
Rekapitulasi Kerjasama Swakelola Tipe II-PNBP Berdasarkan Nilai PKS

Uraian	Jumlah Kerjasama	Non APBN BPS (Rp)	APBN BPS (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Settama	4	34.834.329.000	609.496.000	35.443.825.000
Pusdiklat BPS	9	3.537.500.000	0	3.537.500.000
Polstat STIS	1	1.138.500.000	0	1.138.500.000
BPS Provinsi	33	295.918.612.000	0	295.918.612.000
JUMLAH	47	335.428.491.000	609.496.000	336.038.437.000

Anggaran kerjasama yang berasal dari Non APBN BPS sebesar Rp311.809.102.000,00 dan total realisasi BPS sebesar Rp297.743.616.897,00 atau 95 persen. Anggaran kerjasama yang berasal dari APBN BPS sebesar Rp609.496.000,00 dengan realisasi sebesar Rp581.004.433,00 atau sebesar 95 persen. Sumber dana kerjasama dengan mekanisme PNBP terdiri dari Non APBN BPS dan APBN BPS. Rincian jenis dan jumlah kerjasama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 137
Rekapitulasi Kerjasama Swakelola Tipe II-RPL Berdasarkan Anggaran dan Realisasi

Uraian	Jumlah Kerja Sama	Non APBN BPS (Rp)	APBN BPS (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sestama	3			
Anggaran		32.395.941.000	609.496.000	33.005.437.000
Realisasi		19.434.423.503	581.004.433	20.015.427.936
Saldo	3	12.961.517.497	28.491.567	12.990.009.064
Persentase realisasi		60%	95%	61%
PUSDIKLAT BPS	9			
Anggaran		3.057.860.000	0	3.057.860.000
Realisasi		3.038.768.161	0	3.038.768.161
Saldo	9	19.091.839	0	19.091.839
Persentase realisasi		99%	0	99%
Polstat STIS	1			
Anggaran		74.200.000	0	74.200.000
Realisasi		73.711.613	0	73.711.613
Saldo	1	488.387	0	488.387

Uraian	Jumlah Kerja Sama	Non APBN BPS (Rp)	APBN BPS (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase realisasi		99%	0	99%
Total Pusat	13			
Anggaran		35.528.001.000	609.496.000	36.137.497.000
Realisasi		22.546.903.277	581.004.433	23.127.907.710
Saldo		12.981.097.723	28.491.567	13.009.589.290
Persentase realisasi		63%	95%	64%
BPS Daerah	33			
Anggaran		276.281.101.000	0	276.281.101.000
Realisasi		275.196.713.620	0	275.196.713.620
Saldo		1.466.559.380	0	1.466.559.380
Persentase realisasi		99,6%	0	99,6%
Total Pusat & Daerah	46			
Anggaran		311.809.102.000	609.496.000	312.418.598.000
Realisasi		297.743.616.897	581.004.433	298.324.621.330
Saldo		14.447.657.103	28.491.567	14.476.148.670
Persentase realisasi		95%	95%	95%

A. Kerjasama RPL-Non APBN BPS

Kerjasama mekanisme PNBP yang dibiayai dari Non APBN BPS adalah kerjasama dimana sumber pembiayaan kegiatannya berasal dari mitra kerjasama. Anggaran PNBP yang sudah tercatat dalam DIPA BPS sebesar Rp312.191.274.000,00 dan realisasi tercatat sebesar Rp297.749.794.258,00 atau 95,37 persen. Saldo sebesar Rp14.441.479.742,00 terdapat pada BUN. Rincian jenis dan nilai kerjasama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 138
Rekapitulasi Kerjasama RPL-APBN BPS

Satker/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)
SESTAMA	32.395.941.000	19.434.423.503	12.961.517.497
6100 Direktorat Statistik Distribusi			
1 Kerja Sama Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Menengah 2023	32.395.941.000	19.434.423.503	12.961.517.497
Pusdiklat	3.057.860.000	3.038.768.161	19.091.839
Politeknik Statistika STIS	74.200.000	73.711.613	488.387
1 Pelaksanaan Program Sarjana Terapan Bidang Statistika Dan Sarjana Terapan Bidang Komputasi Statistik Di Politeknik Statistika STIS Mulai Tahun Akademik 2023/2024	74.200.000	73.711.613	488.387
BPS Provinsi	276.281.101.000	275.196.713.620	1.466.559.380
1100 Provinsi Aceh			
1 Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	12.692.728.000	12.596.016.326	96.711.674
1200 Provinsi Sumatera Utara			

Satker/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	19.498.714.000	19.218.715.682	279.998.318
1300	Provinsi Sumatera Barat			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	6.763.129.000	6.697.893.288	65.235.712
1400	Provinsi Riau			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	3.958.398.000	3.926.907.434	31.490.566
1500	Provinsi Jambi			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	8.585.176.000	8.547.665.538	37.510.462
1600	Provinsi Sumatera Selatan			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	12.026.543.000	11.958.616.831	67.926.169
1700	Provinsi Bengkulu			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	6.425.393.000	6.425.393.000	0
1800	Provinsi Lampung			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	11.206.923.000	11.202.084.244	4.838.756
1900	Provinsi Kep Bangka Belitung			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	5.467.217.000	5.461.068.507	6.148.493
2000	Provinsi Kepulauan Riau			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	1.411.615.000	1.408.435.977	3.179.023
3100	Provinsi DKI Jakarta			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	382.172.000	379.651.200	2.520.800
3200	Provinsi Jawa Barat			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	7.797.588.000	7.658.996.882	138.591.118
3300	Provinsi Jawa Tengah			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	3.945.089.000	3.924.557.988	20.531.012
3500	Provinsi Jawa Timur			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	18.947.448.000	18.935.174.215	12.273.785
3600	Provinsi Banten			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	12.327.066.000	12.324.842.364	2.223.636
5103	Kabupaten Badung			
1	Survei Pengukuran Tingkat Kebahagiaan di Kabupaten Badung Tahun 2023	486.156.000	463.583.734	22.572.266
5200	Provinsi Nusa Tenggara Barat			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	2.495.541.000	2.495.539.187	1.813
5300	Provinsi Nusa Tenggara Timur			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	18.266.438.000	18.113.808.420	152.629.580
6100	Provinsi Kalimantan Barat			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	12.966.890.000	12.958.368.816	8.521.184
6200	Provinsi Kalimantan Tengah			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	8.576.981.000	8.499.399.727	77.581.273
6300	Provinsi Kalimantan Selatan			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	11.957.743.000	11.856.247.812	101.495.188
6400	Provinsi Kalimantan Timur			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	2.946.970.000	2.946.970.000	0

Satker/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
6500	Provinsi Kalimantan Utara			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	2.485.225.000	2.484.620.354	604.646
7100	Provinsi Sulawesi Utara			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	8.501.132.000	8.497.705.045	3.426.955
7200	Provinsi Sulawesi Tengah			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	10.796.010.000	10.796.010.000	0
7300	Provinsi Sulawesi Selatan			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	25.738.349.000	25.594.793.345	143.555.655
7400	Provinsi Sulawesi Tenggara			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	10.247.788.000	10.233.264.196	14.523.804
7500	Provinsi Gorontalo			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	3.261.258.000	3.245.481.895	15.776.105
7600	Provinsi Sulawesi Barat			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	5.183.834.000	5.183.509.500	324.500
8100	Provinsi Maluku			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	6.088.152.000	6.088.152.000	0
8200	Provinsi Maluku Utara			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	3.451.908.000	3.451.906.255	1.745
9100	Provinsi Papua Barat			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	4.465.545.000	4.422.718.681	42.826.319
9200	Provinsi Papua			
1	Pendataan Lengkap Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah 2023	7.312.154.000	7.204.792.538	107.361.462
Jumlah		312.191.274.000	297.749.794.258	14.441.479.742

A. Kerjasama PNBP- APBN BPS

Kerjasama mekanisme PNBP yang dibiayai dari APBN BPS adalah kerjasama antara BPS dengan mitra kerjasama dengan anggaran sebesar Rp609.496.000,00 dan realisasi sebesar Rp581.004.433,00 atau 95 persen. Rincian jenis dan nilai kerjasama dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 139
Rekapitulasi Kerjasama PNBP-APBN BPS

Satker/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
BPS Pusat (Settama)				
2300	Biro Sumber Daya Manusia			
1	Medical Check Up Pejabat Tinggi Pratama Dan Fungsional Utama Di Lingkungan Badan Pusat Statistik	285.496.000	257.004.433	28.491.567

Satker/Kegiatan		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Saldo (Rp)
(1)		(2)	(3)	(4)
2400	Biro Humas Dan Hukum			
1	Pengadaan Penayangan Iklan Layanan Masyarakat (ILM) Sensus Pertanian di TVRI	324.000.000	324.000.000	0
Jumlah		609.496.000	581.004.433	28.491.567

F.6 KERJASAMA SWAKELOLA TIPE II DENGAN MEKANISME RPL

Pada periode tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023, Badan Pusat Statistik melakukan 1 kerjasama Swakelola Tipe II dengan mekanisme RPL. Kerjasama swakelola tipe II ini menggunakan APBN BPS dan masuk ke Rekening RPL mitra kerjasama.

Tabel 140
Rekapitulasi Kerjasama Swakelola Tipe II-RPL
Berdasarkan Nilai PKS

Uraian	Jumlah Kerjasama	Non APBN BPS (Rp)	APBN BPS (Rp)	Jumlah (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Settama				
5200	Direktorat Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura Dan Perkebunan			
1	Penyempurnaan Frame Kerangka Sampel Area Jagung	0	300.000.000	300.000.000
Pusdiklat BPS		0	0	0
Polstat STIS		0	0	0
BPS Provinsi		0	0	0
Jumlah		0	300.000.000	300.000.000

F.7 HIBAH LANGSUNG LUAR NEGERI

Pada periode TA 2023 Satker Settama BPS melakukan kerjasama dalam bentuk hibah uang dan jasa. Kerjasama dalam bentuk hibah luar negeri dalam bentuk uang dan jasa tersaji pada tabel sebagai berikut:

Tabel 141
Rincian Hibah Langsung Luar Negeri Dalam Bentuk Uang dan Jasa
Tahun Anggaran 2023

No.	Donor	No. Register	Dana Dalam DIPA (Rp)	Saldo Awal Hibah (Rp)	Pendapatan Hibah s.d. 31 Des. 2023 (Rp)	SP2HL/MPHL-BJS (Rp)	SP4HL (Rp)	Saldo Sisa Dana Hibah (Rp)	Penanggung Jawab Kegiatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	UNFPA	2NZ4UCWA	1.185.728.000	0	1.185.728.394	1.178.260.088	7.468.306	0	Direktorat Statistik Kependudukan dan Tenaga Kerja
2	UNICEF	2PG3K7NA	1.415.370.000	0	1.414.594.409	1.412.643.512	1.950.897	0	Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat
Jumlah Hibah Uang			2.601.098.000	0	2.600.322.803	2.590.903.600	9.419.203	0	
3	UNFPA	2NZ4UCWA	0	0	308.477.685	308.477.685	0	0	Direktorat Statistik Kependudukan dan Tenaga Kerja
4	PROSPE RA	23TSV7CA	0	0	3.413.211.381	3.413.211.381	0	0	Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum
Jumlah Hibah Jasa			0	0	3.721.689.066	3.721.689.066	0	0	

Sedangkan untuk rincian dokumen pengesahan dan pengembalian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 142
Rincian SP2HL/SP4HL-BJS Berdasarkan Nomor Dokumen
Tahun Anggaran 2023

No	Donor	No. Register	Daftar Rincian						Keterangan
			SP2HL			SP4HL/MPHL-BJS			
			Nomor	Tanggal	Nilai	Nomor	Tanggal	Nilai	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	UNFPA	2NZ4UCW A	04464T	29-12-2023	1.178.260.088	04478T	31-12-2023	7.468.306	Hibah Uang
2.	UNI CEF	2PG3K7NA	04360A	27-12-2023	1.412.643.512	04454A	28-12-2023	1.950.897	Hibah Uang
						Jumlah SP4HL		9.419.203	
3.	UNFPA	2NZ4UCW A	-	-	-	04479T	31-12-2023	308.477.685	Hibah Jasa
4.	PROSPERA	23TSV7CA	-	-	-	04480T	31-12-2023	3.413.211.381	Hibah Jasa
Jumlah SP2HL			2.590.903.600			Jumlah SP4HL dan MPHLBJS		3.731.108.269	

Rincian Hibah Langsung Luar Negeri (HLLN) adalah sebagai berikut:

1. *United Nations Population Fund* (UNFPA) per 31 Desember 2023.

- Nama Hibah: UNFPA siklus ke-10 (Tahun 2021-2025).
- Nomor Naskah Perjanjian Hibah (NPH): Perjanjian Mitra Pelaksana antara BPS dan UNFPA tanggal 21 Januari 2021.
- Nomor register: 2NZ4UCWA sesuai surat Direktur Evaluasi, Akuntansi, dan Setelmen nomor S-188/PR.8/2021 tanggal 15 Februari 2021.
- Tanggal Penandatanganan NPH: 21 Januari 2021.

- Tanggal Efektif NPH: 1 Januari 2021.
 - Tanggal Penutupan NPH: 31 Desember 2025.
 - Nomor rekening RPL 140 PDHL BPS untuk 2NZ4UCWA.
 - Nilai Hibah sebesar Rp1.217.072.000,00.
 - Saldo awal sebesar Rp0,00.
 - Pendapatan sebesar Rp1.185.728.394,00 sudah dilakukan Revisi DIPA sesuai Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2023 pada Revisi ke 13 tanggal 11 Desember 2023 dan sudah dilakukan pengesahan pendapatan sesuai Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 04464T/018576/2023 tanggal 29 Desember 2023 sebesar Rp1.178.260.088,00.
 - Belanja sebesar Rp1.178.260.088,00 sudah dilakukan pengesahan belanja sesuai Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 04464A tanggal 29 Desember 2023.
 - Refund sebesar Rp7.468.306,00 dan sudah dilakukan pengesahan *Refund* sesuai Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) nomor 04478T tanggal 31 Desember 2023.
 - Saldo sisa dana hibah per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00.
 - Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.
 - Digunakan untuk kegiatan pelaksanaan rencana kerja dan program kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan UNFPA 2021-2025, sesuai surat perjanjian hibah tanggal 21 Januari 2021 dan sesuai *Annual Workplan* tahun 2023 IDN10PDA tanggal 31 Januari 2023, yaitu untuk kegiatan yang difokuskan pada Program-Program Dinamika Kependudukan dan Analisis Data yang bertujuan untuk meningkatkan ketersediaan data kependudukan yang berkualitas dan analisis keterkaitannya dengan kebijakan dan program nasional.
 - Dukungan terhadap proyeksi penduduk tingkat kabupaten dan perkotaan berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2020. Koordinasi dan Pengembangan SDMI dengan Kementerian Negara/Lembaga terpilih. Analisis Fertilitas untuk Indikator SDG's Terpilih dari Hasil Sensus Penduduk 2020 *Long Form*. Dokumentasi Komprehensif Sensus Penduduk 2020 termasuk Aspek Geospasial. Estimasi IMR, e0, dan parameter demografi tertentu pada Kabupaten/Kota untuk mendukung proyeksi penduduk.
2. *United Nations International Children's Emergency Fund* (UNICEF) per 31 Desember 2023.
- Nama Hibah: *Country Program Action's Fund* 2021-2025
 - Nomor register 2PG3K7NA (sesuai surat DJPPR nomor S-469/PR.8/2021).
 - Tanggal penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah (NPH): 5 Maret 2021.
 - Tanggal Efektif NPH: 5 Maret 2021.
 - Tanggal Penutupan NPH: 31 Desember 2025.
 - Nilai hibah sebesar USD400.000.
 - Nomor rekening RPL 140 PDHL SETAMA BPS untuk 2PG3K7NA.
 - Saldo awal sebesar Rp0,00.
 - Pendapatan sebesar Rp1.414.594.409,00 sudah dilakukan Revisi DIPA sesuai Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2023 pada Revisi ke-13 tanggal 11

Desember 2023 dan sudah dilakukan pengesahan pendapatan sesuai Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 04360A tanggal 27 Desember 2023.

- Belanja sebesar Rp1.412.643.512,00 sudah dilakukan pengesahan belanja sesuai Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) nomor 04360A tanggal 27 Desember 2023.
- *Refund* sebesar Rp1.950.897,00 kepada UNICEF dan sudah dilakukan pengesahan *Refund* sesuai Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL) nomor 04454A tanggal 28 Desember 2023.
- Saldo sisa dana hibah per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00
- Penanggung jawab kegiatan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Kegiatan dilaksanakan melibatkan direktorat lain yaitu Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat, Politeknik Statistik STIS, serta Direktorat Pengembangan dan Analisis Statistik.
- Digunakan untuk kegiatan pelaksanaan rencana kerja dan program kerjasama Pemerintah Republik Indonesia dan UNICEF 2021-2025, sesuai *Country Programme Action Plan* (CPAP) 2021-2025 tanggal 23 Desember 2020 dan sesuai *Programme Document* (ProDoc) 2021-2025 tanggal 5 Maret 2021, yaitu untuk kegiatan Peningkatan penggunaan data statistik oleh pemangku kebijakan terutama untuk perencanaan dan monitoring kebijakan yang terkait tentang anak dengan menggunakan hasil survei rumah tangga, sensus, dan *big data*.
- *Output* Tahun 2023 meliputi Laporan Hasil Uji Coba Disabilitas Anak, Publikasi Kesejahteraan Anak Indonesia: Analisis Kemiskinan Moneter 2022, Publikasi Kesejahteraan Anak Indonesia: Analisis Multidimensi 2022, Laporan hasil penelitian kondisi anak di rumah tangga miskin ekstrem, Buku pedoman dan instrumen *Groundcheck* penelitian kondisi anak di rumah tangga miskin ekstrem, *Multiple Indicator Cluster Surveys Programme MICS7 Survey Design Workshop* di Bangkok, Thailand, *Modeling Statistik untuk Estimation Projections ECDI Nasional 2024-2030*, Analisis Data Praktik Pemberian ASI dan MPASI Hasil Susenas Maret 2023, Pembangunan *Web Story* Diseminasi Kemiskinan Anak di Pulau Jawa Tahun 2020.

Selain itu Satker Sekretariat Utama menerima hibah dalam bentuk Jasa dari:

1. *United Nations Population Fund* (UNFPA), yaitu:
 - Nama Hibah: UNFPA Siklus ke-10 (Tahun 2021-2025)
 - Nomor Naskah Perjanjian Hibah (NPH): Perjanjian Mitra Pelaksana antara BPS dan UNFPA tanggal 21 Januari 2021.
 - Nomor register: 2NZ4UCWA, sesuai surat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Nomor: S-188/PR.8/2021 tanggal 15 Februari 2021.
 - Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung tanpa melalui KPPN (SPTMHL) nomor B-753/02200/KU.300/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.
 - Penanggung jawab kegiatan adalah Direktorat Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan.

- Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah berupa jasa pelaksanaan program UNFPA Siklus ke-10 nomor 536/PDA/12-2023 tanggal 28 Desember 2023.
 - Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Jasa sesuai nomor B-760/02200/KU.300/12/2023 tanggal 29 Desember 2023.
 - Berupa Hibah Langsung dalam bentuk jasa sebesar USD20,234.72 atau IDR Rp308.477.685,00 dan telah disahkan sesuai Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Jasa nomor 04479T tanggal 31 Desember 2023.
 - Digunakan untuk membiayai kegiatan Penjaminan Kualitas Pelaksanaan Program Tahun 2023.
 - *Output* berupa pendampingan: Partisipasi UNFPA dan BPS dalam Forum International Statistik Migrasi ke-3, Santiago, Chile, Forum Internasional Statistik Migrasi ke-3, Hangzhou, Tiongkok, Lokakarya Regional tentang Proyeksi Penduduk, diselenggarakan bersama oleh UNFPA APRO, UN DESA, Biro Sensus AS di Bangkok, Pendampingan Kegiatan Verifikasi Kematian Ibu di Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bandung Barat, dan Kabupaten Bandung, *Workshop* Persiapan dan Evaluasi Kajian Tematik Kematian Ibu, Kematian Neonatal, Kematian bayi dan Lanjut Usia di Bandung, *Workshop* Penghitungan Kematian Ibu Tingkat Provinsi di Bogor, *Workshop* Penghitungan AKB, e0, dan Parameter Demografi Tertentu Provinsi Baru di Papua, di Bogor, *Workshop* Pengembangan SDMI bersama Kementerian Negara/Lembaga terpilih di Bogor, *Workshop* Perhitungan Vertilitas Remaja di Bogor, *Regional Workshop on Strengthening the National Civil and Vital Statistics (CRVS) System* di Bali.
2. Hibah dalam bentuk Jasa dari Kedutaan Australia, *Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT)* yaitu:
- Nama Hibah: *Australia Indonesia Partnership for Economic Development (PROSPERA)*.
 - Nomor Naskah Perjanjian Hibah (NPH): SA.04.12.2017 tanggal 4 Desember 2017.
 - Nomor register: 23TSV7CA, sesuai surat Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Nomor: S-594/PR.8/2018 tanggal 30 Juli 2018.
 - Surat Pernyataan Telah Menerima Hibah Langsung tanpa melalui KPPN (SPTMHL) nomor B-762/02200/KU.700/2023 tanggal 29 Desember 2023.
 - Penanggung jawab kegiatan adalah Biro Hubungan Masyarakat dan Hukum.
 - Berita Acara Serah Terima (BAST) hibah berupa jasa pelaksanaan program PROSPERA nomor B-2260/02100/KU.700/12/2023 dan B-2261/02100/KU.700/12/2023 tanggal 1 Desember 2023.
 - Surat Perintah Pengesahan Pendapatan Hibah Langsung dalam bentuk Jasa sesuai nomor B-763/02200/KU.700/2023 tanggal 29 Desember 2023.
 - Berupa Hibah Langsung dalam bentuk jasa sebesar AUD329,234.71 atau Rp3.413.211.381,00 dan telah disahkan sesuai Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Jasa nomor 04480A tanggal 31 Desember 2023.
 - Digunakan untuk membiayai kegiatan *Advisory (Centre of Excellence)* dan *Australian Public Service*.
 - *Output* kegiatan adalah memperkuat sistem penyediaan data dan

kemampuan statistik, integrasi proses statistik, perbaikan penggunaan data administrasi, meningkatkan kualitas data dan tata kelola proses penyajian data, meningkatkan kolaborasi internal dan eksternal, berbagi ilmu dan wawasan dan membina kerjasama yang efektif.

F.8 HIBAH LANGSUNG DALAM NEGERI

Badan Pusat Statistik menjalin kerjasama dengan pihak lain melalui mekanisme Hibah Langsung Dalam Negeri baik sebagai penerima Hibah dari mitra kerjasama dan pemberi Hibah dengan nilai sebesar Rp9.578.815.226,00 dalam bentuk barang.

1. BPS sebagai pihak yang menerima hibah barang dari Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar Rp8.783.694.226,00 berupa tanah, bangunan, pagar, kendaraan dinas, dan barang lainnya. Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 143
Rincian Hibah dari Pemerintah Daerah ke BPS

No	Uraian	Mitra	Penanggung Jawab	Nilai (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dan Bangunan Rumah Dinas Jalan Siti Hajir No. 3 Jorong Kubu Rajo Nagari Limo Kaum Kecamatan Lima Kaum Kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Tanah Datar	Pemkab Tanah Datar, Sumatera Barat	Plt. Kepala BPS	104.400.000	
2	Hibah Barang Milik Daerah Berupa Sebidang Tanah Kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Sorong Selatan	Pemkab Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat	Plt. Kepala BPS	128.000.000	
3	Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Kepada Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor	Pemkab Bogor, Jawa Barat	Kepala BPS	496.440.000	
4	Hibah Daerah Antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Barat Dengan Badan Pusat Statistik Lampung Barat	Pemkab Lampung Barat, Lampung		40.232.225	
5	Hibah Barang Milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Berupa Tanah Dan Bangunan Di Jalan Sutan Syahrir Pontianak Kepada Badan Pusat Statistik Republik Indonesia	Pemprov Kalimantan Barat	Sestama BPS	7.364.662.001	
6	Hibah Langsung Barang Berupa Kendaraan Dinas Dari Pemda Kabupaten Lombok Timur Untuk Bps Kabupaten Lombok Timur	Pemkab Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat	Kepala BPS	228.000.000	

No	Uraian	Mitra	Penanggung Jawab	Nilai (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7	Hibah Barang Milik Daerah Berupa Tanah Bangunan Kantor Pemerintah Dan Bangunan Gedung Kantor Permanen Kepada Badan Pusat Statistik Kota Depok	Pemkot Depok, Jawa Barat		421.960.000	
Jumlah				8.783.694.226	

2. BPS sebagai pihak yang menghibahkan barang kepada Pemerintah Daerah dengan nilai sebesar Rp795.121.000,00 berupa gudang kantor permanen dan tempat kerja permanen. Rincian dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 144
Rincian Hibah dari BPS ke Pemerintah Daerah

No	Uraian	Mitra	Penanggung Jawab	Nilai (Rp)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	HIBAH BARANG Milik Negara Berupa Bangunan tempat Kerja Lainnya Permanen Kepada Pemerintah Kabupaten Tanah Datar	Pemkab Tanah Datar, Sumatera Barat	Plt. Kepala BPS	795.121.000	
Jumlah				795.121.000	

F.9 PENGUNGKAPAN PROGRAM PRIORITAS NASIONAL DAN CAPAIAN OUTPUT

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 yang ditetapkan melalui Perpres nomor 134 Tahun 2022 Tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2023, pada Badan pusat Statistik terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional I dan Prioritas Nasional III dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran, dan Target serta Realisasi Pencapaian Output dari masing-masing PN sebagai berikut:

- Prioritas Nasional I – Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.
Pelaksanaannya Prioritas Nasional I diantaranya melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik pada empat kegiatan prioritas yang terdiri dari Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi, Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata, serta Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan. Kegiatan prioritas tersebut tersebar di 517 Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp2.681.305.752.0000,00 dan realisasi sebesar Rp2.602.335.981.271,00 (97,05 persen) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 145
Rincian Output Prioritas Nasional I

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran (Rp)	Realisasi Anggaran (Rp)	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	GG.2898.QMA.008	Publikasi/Laporan Penyusunan Disagregasi PMTB	24.363.155.000	21.271.242.436	87,31	515	515	layanan	100
2	GG.2899.QMA.009	Publikasi/ Laporan Neraca Satelit Pariwisata Nasional (TSA)	852.016.000	772.978.900	90,72	1	1	layanan	100
3	GG.2908.QMA.006	Publikasi/ Laporan Statistik Wisatawan Nusantara	21.676.935.000	21.301.045.091	98,27	35	35	layanan	100
4	GG.2908.QMA.007	Publikasi/ Laporan Statistik Wisatawan Mancanegara	6.159.396.000	5.257.351.431	85,35	36	36	layanan	100
5	GG.2908.QMA.009	Publikasi/ Laporan Statistik E-Commerce	11.162.962.000	10.672.560.277	95,61	332	332	layanan	100
6	GG.2910.QMA.006	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	2.384.810.377.000	2.325.114.628.977	97,50	515	515	layanan	100
7	GG.2910.QMA.007	Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan	35.463.976.000	29.968.161.468	84,50	515	515	layanan	100
8	GG.2910.QMA.010	Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area	74.578.335.000	69.158.865.565	92,73	506	506	layanan	100
9	GG.2910.RAN.004	Perangkat Pengolah Data Dan Komunikasi	122.238.600.000	118.819.147.126	97,20	7.572	7.572	Unit	100
Jumlah			2.681.305.752.000	2.602.335.981.271	97,05	10.027	10.027		100

2. Prioritas Nasional III- Meningkatkan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing.

Pelaksanaan Prioritas Nasional III diantaranya melalui Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik pada kegiatan Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial yang tersebar di 517 Satuan Kerja dengan pagu mencapai Rp793.915.329.000,00 dan realisasi sebesar Rp768.455.808.600,00 (96,79 persen) dengan rincian sebagai berikut.

Tabel 146
Rincian Output Prioritas Nasional III

No	Kode RO	Uraian RO	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	%	Target Volume RO	Realisasi Volume RO	Satuan	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	GG.2907.QMA.009	Publikasi/Laporan Pendataan Awal Registrasi Sosial Ekonomi	777.810.434.000	752.675.808.600	96,77	515	515	layanan	100
2	GG.2907.RAN.010	Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	16.104.895.000	15.780.000.000	97,98	1	1	Unit	100
Jumlah			793.915.329.000	768.455.808.600	96,79	516	516		100

Pencapaian nilai IKPA periode Desember 2023 yang sudah dicapai Badan Pusat Statistik sebesar 94,42 dengan kriteria penilaian sebagai berikut Kualitas Perencanaan Anggaran sebesar 88,69 , Kualitas Pelaksanaan Anggaran sebesar 94,02 dan Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran sebesar 99,78. Capaian output merupakan salah satu indikator penilaian IKPA. Namun, atas capaian tersebut terdapat anomali rincian output di 6 satker BPS. Permasalahan tersebut disebabkan kesalahan input RVRO oleh satker yang nilainya lebih tinggi dibanding TVRO. Selain itu, progres capaian RO pada 2 satker belum mencapai 100 persen.

Tabel 147
Indikator Pelaksanaan Anggaran

Keterangan		Nilai	Bobot	Nilai Akhir	Nilai Aspek
Kualitas Perencanaan Anggaran	Revisi DIPA	100.00	10	10.00	88.69
	Deviasi Halaman III DIPA	77.37	10	7.74	
Kualitas Pelaksanaan Anggaran	Penyerapan Anggaran	92.25	20	18.45	94.02
	Belanja Kontraktual	91.41	10	9.14	
	Penyelesaian Tagihan	99.10	10	9.91	
	Pengelolaan UP dan TUP	97.35	10	9.74	
	Dispensasi SPM	90.00	5	4.50	
Kualitas Hasil Pelaksanaan Anggaran	Capaian Output	99.78	25	24.94	99.78
Nilai Total		94.42			
Konversi Bobot		100%			
Nilai Akhir (Nilai Total/Konversi Bobot)		94.42			

Tabel 148
Anomali Capaian Output

No	Satker	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
1	BPS KOTA BOGOR	WA Program Dukungan Manajemen	2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	EBC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	954 Layanan Manajemen SDM (Orang)	1	3	100	Januari: - Februari: Tahap persiapan Maret: Pembayaran honor Lulusan STIS, sudah dibayarkan April: Pembiayaan Lulusan STIS magang selama 1 Bulan, sudah selesai dan sudah dibayarkan Mei: Kegiatan udah seleaai Juni: Pewmbayaran honor magang lulusan STIS, sudah selesai Juli: selesai Agustus: sudah selesai September: Sudah dilaksanakan Oktober: sudah selesai November: selesai Desember: Selesai, ada kesalahan dalam pengisian rvro, seharusnya 1
2	BPS KAB. WAJO	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2902 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	004 PUBLIKA SI/LAPO RAN STATISTIK DISTRIB USI (layanan)	1	3	100	Januari: - Februari: - Maret: - April: - Mei: - Juni: - Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
3	BPS KAB. WAJO	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2907 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	009 Publikasi/ Laporan Pendataa n Awal Registrasi Sosial Ekonomi (layanan)	1	3	100	Januari: - Februari: - Maret: - April: Kegiatan Sedang Berlangsung Mei: - Juni: - Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -
4	BPS KAB. WAJO	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	006 PUBLIKA SI/LAPO RAN SENSUS PERTANI AN (layanan)	1	3	100	Januari: - Februari: - Maret: - April: - Mei: - Juni: - Juli: - Agustus: - September: - Oktober: - November: - Desember: -

No	Satker	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
5	BPS KAB. TIMOR TENGAH UTARA	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2898 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	007 PUBLIKA SI/LAPO RAN STATISTI K NERACA PENGEL UARAN (layanan)	1	10	99,65	Januari: Realisasi Berdasarkan Progres Kegiatan Februari: Realisasi Sudah dihitung secara proporsional Maret: Realisasi sudah dihitung secara proporsional April: Realisasi sudah dihitung secara proporsional Mei: Realisasi sudah dihitung proporsional Juni: Realisasi sudah dihitung secara proporsional Juli: Realisasi sudah dihitung secara proporsional Agustus: Realisasi Sudah Dihitung Proporsional September: Realisasi sudah dihitung proporsional Oktober: Realisasi sudah dihitung proporsional November: Realisasi sudah dihitung proporsional Desember: Realisasi Sudah Dihitung Proporsional
6	BPS KAB. ACEH SINGKIL	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2903 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	009 PUBLIKA SI/LAPO RAN STATISTI K HARGA (layanan)	1	6	100	Januari: (1) Pencacahan ,Pengawasan/ Pemeriksaan dan Pengolahan Survei Harga Perdesaan (HD), (2) Pencacahan, Pengawasan/ Pemeriksaan dan Pengolahan Survei Harga Perdagangan Besar (SHPB) (3) Pencacahan dan Pengawasan/ Pemeriksaa dan Pengolahan Survei Harga Kemahalan Kontruksi (SHKK) Triwulan 1 Februari: (1) Pencacahan ,Pengawasan/ Pemeriksaan dan Pengolahan Survei Harga Perdesaan (HD), (2) Pencacahan, Pengawasan/ Pemeriksaan dan Pengolahan Survei Harga Perdagangan Besar (SHPB) Maret: (1) Pencacahan ,Pengawasan/ Pemeriksaan dan Pengolahan Survei Harga Perdesaan (HD), (2) Pencacahan, Pengawasan/ Pemeriksaan dan Pengolahan Survei Harga Perdagangan Besar (SHPB) Mei: Pendataan SPDT IHPB Juni: (1) Pencacahan ,Pengawasan/ Pemeriksaan dan Pengolahan Survei Harga Perdesaan (HD), (2) Pencacahan, Pengawasan/ Pemeriksaan dan Pengolahan Survei Harga Perdagangan Besar (SHPB), (3). Pengawasan, Pencacahan Pemeriksaan SIMOPEL Bulanan 2023, (4) Pengawasan, Pencacahan dan Pengolahan Jasa Pariwisata (VHT-S) Juli: Pengumpulan data HD & SHPB Agustus: Pengumpulan data HD, SHPB, SHKK & SPDT IHPB September: Pengumpulan data HD & SHPB Oktober: Pengumpulan data HD, SHPB & SHKK November: Pengumpulan data HD & SHPB Desember: Pendataan Statistik Harga Des 2023
7	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2896 Pengembangan dan Analisis Statistik	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	004 PUBLIKA SI/LAPO RAN ANALISIS DAN PENGEM BANGAN STATISTI K (layanan)	1	6	96,26	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian ouput bulan Mei 2023 Juni: Bulan Juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Realisasi bulan september 2023 Oktober: bulan Oktober 2023

No	Satker	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
									November: Bulan November 2023 Desember: -
8	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2897 Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	BDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga (Lembaga , Unit Kerja, Tim)	003 LAPORAN PENYEL ENGGARAN SISTEM STATISTIK NASIONAL (SSN) (Lembaga)	1	5	72,6	Januari: - Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian output bulan Mei 2023 Juni: Bulan Juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan September 2023 Oktober: bulan Oktober 2023 November: Bulan November 2023 Desember: -
9	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2897 Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	004 LAPORAN DISEMIN ASI DAN METADATA STATISTIK (layanan)	1	5	97,46	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: Realisasi Bulan Juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan September 2023 Oktober: Bulan Oktober 2023 November: bulan November 2023 Desember: -
10	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2898 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	007 PUBLIKASI/LA PORAN STATISTIK NERACA PENGELUARAN (layanan)	1	5	97,66	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: Bulan Juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan September 2023 Oktober: Bulan Oktober 2023 November: LAPORAN STATISTIK NERACA Desember: -
11	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2898 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	008 PUBLIKASI/LA PORAN PENYUSUNAN DISAGREGASI PMTB (layanan)	1	5	60,54	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: Bulan Juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan September 2023 Oktober: bulan Oktober 2023 November: SP2D Desember: -
12	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2899 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	006 PUBLIKASI/LA PORAN NERACA PRODUKSI (layanan)	1	4	92,66	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: Bulan Juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: bulan September 2023 Oktober: bulan Oktober 2023 November: Bulan November 2023 Desember: -
13	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan	2900 Pengembangan Metodologi	BMA Data dan Informasi Publik	005 DOKUMEN, LAPORAN	1	5	94,62	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai

No	Satker	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
		Pelayanan Informasi Statistik	Sensus dan Survei	(layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	N, DAN PUBLIKASI PENGEMBANGAN METODOLOGI SENSUS DAN SURVEI (layanan)				dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian output bulan Mei 2023 Juni: Bulan Juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan September 2023 Oktober: Bulan Oktober 2023 November: SP2D Desember: -
14	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2902 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	004 PUBLIKASI/LAORAN STATISTIK DISTRIBUSI (layanan)	1	5	77,71	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: Bulan Juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan September 2023 Oktober: bulan Oktober 2023 November: November 2023 Desember: -
15	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2903 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	009 PUBLIKASI/LAORAN STATISTIK HARGA (layanan)	1	5	71,91	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: Realisasi Bulan Juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan September 2023 Oktober: Bulan Oktober 2023 November: bulan November 2023 Desember: -
16	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2904 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	006 PUBLIKASI/LAORAN STATISTIK INDUSTRI, PERTAMBANGAN DAN PENGGA LIAN, ENERGI, DAN KONSTRUKSI (layanan)	1	5	74,46	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: Realisasi Bulan Juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan September 2023 Oktober: bulan Oktober 2023 November: November 2023 Desember: -
17	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2905 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	004 PUBLIKASI/LAORAN SAKERNAS (layanan)	1	5	62,7	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: Realisasi Bulan Juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan September 2023 Oktober: Bulan Oktober 2023 November: November 2023 Desember: -
18	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan	2906 Penyediaan dan Pengembangan	BMA Data dan Informasi Publik	006 PUBLIKASI/LAORAN	1	5	90,71	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai

No	Satker	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
		Pelayanan Informasi Statistik	gan Statistik Kesejahteraan Rakyat	(layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	SUSENAS (layanan)				dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: Realisasi Bulan Juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: bulan September 2023 Oktober: bulan Oktober 2022 November: November 2023 Desember: -
19	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2907 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	006 PUBLIKASI/LAORAN STATISTIK KETAHANAN SOSIAL (layanan)	1	5	88,46	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: Realisasi bulan Juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan September 2023 Oktober: Bulan Oktober 2023 November: November 2023 Desember: -
20	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2908 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	004 PUBLIKASI/LAORAN STATISTIK KEUANGAN, TEKNOLOGI INFORMASI, DAN PARIWISATA (layanan)	1	5	96,66	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: realisasi bulan juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan September 2023 Oktober: Bulan Oktober 2023 November: November 2023 Desember: -
21	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2909 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	005 PUBLIKASI/LAORAN STATISTIK PETERNAKAN, PERIKANAN, DAN KEHUTANAN YANG TERBIT TEPAT WAKTU (layanan)	1	4	94,45	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output bulan Mei 2023 Juni: realisasi bulan juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: bulan September 2023 Oktober: Bulan Oktober 2023 November: November 2023 Desember: -
22	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	BMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	008 PUBLIKASI/LAORAN STATISTIK HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN (layanan)	1	3	49,45	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: realisasi bulan juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan September 2023 Oktober: Bulan Oktober 2023 November: November 2023 Desember: -
23	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan Pelayanan	2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik	QMA Data dan Informasi Publik (layanan,	006 PUBLIKASI/LAORAN SENSUS	1	3	90,54	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret:

No	Satker	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
		Informasi Statistik	Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	PERTANIAN (layanan)				Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: Realisasi bulan juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan september 2023 Oktober: bulan Oktober 2023 November: November 2023 Desember: -
24	BPS KAB. SUPIORI	GG Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	2910 Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	QMA Data dan Informasi Publik (layanan, dokumen, publikasi, Wilayah, Peta, Data, Lokasi)	007 PUBLIKASI/ LAPORAN STATISTIK TANAMAN PANGAN (layanan)	1	4	43,7	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: realisasi bulan juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan September 2023 Oktober: Bulan Oktober 2023 November: November 2023 Desember: -
25	BPS KAB. SUPIORI	WA Program Dukungan Manajemen	2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan, Laporan, Dokumen, Rekomendasi, Unit)	994 Layanan Perkantoran (Layanan)	2	5	93,9	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: realisasi bulan juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan September 2023 Oktober: Bulan Oktober 2023 November: November 2023 Desember: -
26	BPS KAB. SUPIORI	WA Program Dukungan Manajemen	2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	EBB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit, m2, Paket)	971 Layanan Prasarana Internal (Unit)	1	6	69,71	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: realisasi bulan juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: bulan September 2023 Oktober: bulan Oktober 2023 November: Bulan November 2023 Desember: -
27	BPS KAB. SUPIORI	WA Program Dukungan Manajemen	2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	952 Layanan Perencanaan dan Penganggaran (Dokumen)	1	5	64,71	Januari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Februari: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui Maret: Progres capaian dihitung secara proporsional sesuai dengan bulan yang sudah dilalui April: - Mei: Capaian Output Bulan Mei 2023 Juni: Realisasi Bulan Juni 2023 Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan September 2023 Oktober: Bulan Oktober 2023 November: bulan November 2023 Desember: -
28	BPS KAB. SUPIORI	WA Program Dukungan Manajemen	2886 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	EBD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen, Layanan, Laporan, Rekomendasi)	961 Layanan Reformasi Kinerja (Dokumen)	1	3	25,5	Januari: - Februari: - Maret: - April: - Mei: - Juni: - Juli: Bulan Juli 2023 Agustus: - September: Bulan september 2023 Oktober: bulan Oktober 2023 November: November 2023 Desember: -
29	BPS	WA	2886	EBC	954	2	100	100	Januari: - Februari: Kegiatan sedang

No	Satker	Program	Kegiatan	KRO	RO	TVRO	RVRO	Progres	Keterangan
	KAB. PESAWARAN	Program Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi	Layanan Manajemen SDM Internal (Orang, Layanan, Rekomendasi)	Layanan Manajemen SDM (Orang)				berjalan namun belum ada yang membutuhkan pengeluaran anggaran. Maret: kegiatan sudah berakhir April: sudah 100 persen Mei: kegiatan sudah berakhir Juni: kegiatan telah selesai Juli: KEGIATAN SELESAI Agustus: Kegiatan sudah berakhir September: kegiatan sudah selesai Oktober: kegiatan sudah berakhir November: kegiatan sudah selesai Desember: Kegiatan sudah selesai

F.10 LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Secara umum kinerja BPS periode Tahun 2023 masih dalam kategori baik dengan kinerja sebesar 103,31 persen. Capaian kinerja tersebut menurun dari tahun 2022 akan tetapi masih di atas 100 persen. Dari 7 (tujuh) Indikator Kinerja Utama (IKU), capaian realisasi dari 5 (lima) IKU di atas 100 persen, dan 2 (dua) IKU di bawah 100 persen.

Perbandingan realisasi kinerja IKU BPS dari Tahun 2020 hingga 2023 menunjukkan pola yang fluktuatif dari tahun ke tahun tapi masih berada pada capaian di atas 100 persen. Jika dibandingkan dengan target di tahun akhir periode Renstra 2020-2024, sebanyak lima IKU telah mencapai kinerja lebih dari 100 persen dan dua IKU lainnya telah mencapai kinerja lebih dari 97 persen.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dari program dan kegiatan yang diusulkan, pada tahun 2023 BPS mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp7.737,05 milyar dengan realisasi sampai dengan akhir periode TA 2023 sebesar Rp7.504,61 milyar atau 97,00 persen. Realisasi anggaran Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS) sebesar Rp4.391,03 milyar atau 96,58 persen dari total pagu PPIS. Untuk realisasi anggaran Program Dukungan Manajemen (Dukman) sebesar Rp3.113,57 milyar dengan kontribusi 97,59 persen dari total pagu Dukman.

F.11 PENGUNGKAPAN LAIN-LAIN

1. Laporan Keuangan Badan Pusat Statistik (BPS) periode Tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 disusun berdasarkan aplikasi MonSAKTI dengan pedoman dari surat Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor S-8/PB/PB.6/2024 tanggal 3 April 2024 perihal Pelaksanaan Koreksi Data/Transaksi dan Penyampaian LKKL Tahun 2023 Audited.
2. Rincian Penggolongan Kualitas Piutang Penerimaan Negara Bukan Pajak BPS periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023 terdapat pada Lampiran Pendukung I Laporan Keuangan
3. Implementasi Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK) Tahun 2023 di

Lingkungan BPS berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.09/2019 tentang Pemerintah Pusat. Penerapan dan penilaian PIPK dilakukan terhadap akun signifikan yang telah disepakati dan ditetapkan objek PIPK Tahun 2023 yaitu akun persediaan (117xxx). Berdasarkan hasil penilaian PIPK adalah efektif, kesimpulan tersebut dinyatakan bahwa PIPK adalah memadai.

4. Berdasarkan data MonSAKTI pada *To Do List*, BPS masih ada selisih pada Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang sebanyak 6 satuan kerja dengan total Rp300.968.000,00 dan Ketidaksesuaian Akun vs Kode Barang Aset Tetap/ATB sebanyak 26 satuan kerja dengan total Rp17.848.497.283,00. Rincian Ketidaksesuaian Akun terdapat pada lampiran Pendukung 1 Laporan Keuangan.

Jakarta, 20 Mei 2024

Plt. Kepala Badan Pusat Statistik



Amalia Adininggar Widyasanti